

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

POLITIK APARTHEID DI AFRIKA SELATAN

TAHUN 1948-1990

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Odilia Elvira Haba

NIM : 021314051

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2007

SKRIPSI

POLITIK APARTHEID DI AFRIKA SELATAN

TAHUN 1948 - 1990

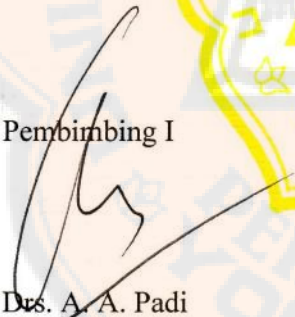
Oleh :

Odilia Elvira Haba

NIM : 021314051


Telah disetujui oleh

Pembimbing I


Drs. A. A. Padi

Tanggal 6 Pebruari 2007

Pembimbing II


Drs. B. Musidi, M.Pd

Tanggal 6 Pebruari 2007

SKRIPSI

POLITIK APARTHEID DI AFRIKA SELATAN

TAHUN 1948 - 1990

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Odilia Elvira Haba

NIM : 021314051

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 24 Pebruari 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Drs. Sutarjo Adisusilo J. R., S. Th.

Sekretaris : Drs. B. Musidi, M. Pd

Anggota : Drs. A. A. Padi

Anggota : Drs. B. Musidi, M. Pd

Anggota : Drs. Sutarjo Adisusilo J. R., S. Th.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 24 Pebruari 2007

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph.D

MOJO

*Nil Valentibus Arduum
Bagi Mereka Yang Sungguh-Sungguh Berusaha
Tidak Ada Yang Terlalu Sulit.*

*Segala Perkara Dapat Kutanggung di Dalam DIA Yang
Memberi Kekuatan Padaku
(Kolose 4:13)*

*Kesempatan Anda untuk Sukses di Setiap Kondisi
Selalu dapat diukur oleh Seberapa Besar
Kepercayaan Anda Pada Diri Sendiri
(Robert Collier)*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN

Dengan Penuh Syukur dan Kasih Kupersembahkan Karya ini

untuk :

- ❖ Tuhan Yesus, atas segala berkatNya di dalam hidupku
- ❖ Bapa Anton dan Mama Theres tersayang, terima kasih
untuk Doa, Dukungan, Kasih Sayang dan Cinta
- ❖ Adik-Adikku yang terkasih Yeny dan Erlan

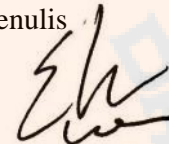
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah

Yogyakarta, 24 Pebruari 2007

Penulis



Odilia Elvira Haba



ABSTRAK

POLITIK APARTHEID DI AFRIKA SELATAN TAHUN 1948-1990

Oleh : Odilia Elvira Haba
NIM 021314051

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) latar belakang munculnya politik *apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948 -1990 (2) pelaksanaan politik *apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948-1990 (3) reaksi terhadap pelaksanaan politik *apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948-1990 dan (4) Afrika Selatan setelah masa *apartheid*.

Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Tahap-tahap dalam penulisan sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, analisis sumber (interpretasi) dan historiografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dan sosiologis. Skripsi ini ditulis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, munculnya politik *apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948 – 1990, dilatarbelakangi oleh tiga hal yaitu latar belakang historis, latar belakang keagamaan dan latar belakang ekonomis. *Kedua*, pelaksanaan politik *apartheid* di Afrika Selatan secara sistematis dilembagakan dan dituangkan dalam undang-undang yang bersifat diskriminatif dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. *Ketiga*, reaksi terhadap pelaksanaan politik *apartheid* di Afrika Selatan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Reaksi dalam negeri diwujudkan dengan adanya perlawanan dari rakyat Afrika Selatan terutama dari ANC (*the African National Congress*) sedangkan reaksi dari luar negeri berasal dari OAU (*the Organization of African Unity/ Organisasi Persatuan Afrika*) dan PBB melalui resolusi-resolusinya yang menentang *apartheid*. *Keempat*, situasi di Afrika Selatan pasca *apartheid* yaitu munculnya pertikaian organisasi kulit hitam antara ANC pimpinan Nelson Mandela dan IFP (*the Inkatha Freedom Party*) pimpinan Mangosuthu Buthelezi, kemiskinan, meningkatnya pengangguran, kriminalitas, serta meningkatnya buta huruf dan wabah AIDS.

ABSTRACT

**THE APARTHEID POLITICS IN SOUTH AFRICA
BETWEEN 1948 – 1990**

By: Odilia Elvira Haba
NIM 021314051

This thesis was intended to describe: (1) the background of the apartheid politics in South Africa between 1948–1990, (2) the implementation of the apartheid politics in South Africa between 1948–1990, (3) the reaction toward the implementation of the apartheid politics in South Africa between 1948–1990, and (4) South Africa after the period of the apartheid politics.

The thesis applied historical method. Stages in historiography are including heuristic, source criticism, source analysis (interpretation), and historiography. This research employed political and sociological approaches. The thesis was written in analytical descriptive.

The results of this research revealed that: *First*, apartheid politics in South Africa between 1948–1990 had three things as its background, that was, the historical background, the religious background, and the economic background. *Second*, the implementation of the apartheid politics in South Africa was systematically institutionalized and shaped into discriminatory acts and was employed in several aspects especially in the sectors of education, social, politics, and economics. *Third*, the reaction toward the implementation of the apartheid politics in South Africa came from the domestic and abroad countries. The domestic reaction was implemented through the resistance from people of South Africa especially from the *African National Congress* (ANC) while the reaction from abroad countries came from the *Organization of Africa Unity* (OAU), and also the United Nations through its resolutions which against the apartheid politics. *Fourth*, the situation in South Africa after the period of the apartheid politics was the emergence of conflict in the blacks' organization between the ANC led by Nelson Mandela and the *Inkatha Freedom Party* (IFP) led by Mangosuthu Buthelezi, the poverty, increasing number of unemployment, the criminality, the illiteracy, and the epidemic of AIDS.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Politik *Apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948 - 1990”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Bapak Drs. A. A. Padi sebagai pembimbing I yang dengan tulus dan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. B. Musidi, M. Pd., selaku pembimbing II atas penguatan, bimbingan dan pendampingan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Bapak Drs. A. K. Wiharyanto, M.M., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.
7. Seluruh karyawan Sekretariat Pendidikan Sejarah dan perpustakaan Universitas Sanata Dharma.
8. Semua pihak yang turut memberi dukungan dan bantuan kepada penulis, khususnya kepada : Ka Ricard, Ka Tarsi, Ka Poly yang telah banyak membantu penulis dalam menterjemahkan sumber-sumber yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi ini, sahabatku tersayang Theresia Tatarina. P dan Martha Setia. P. (terima kasih untuk penguatan, dukungan dan kebersamaan), teman-teman angkatan 2002, Rm. Emil, Fransindhu Njoo, Eno, rekan-rekan kost Dahlia 4a, Silvi, Koni, dan Ka Nasti dkk.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu untuk melengkapi dan menyempurnakan tulisan ini agar semakin menjadi lebih baik, penulis bersedia menerima segala bentuk informasi tambahan, kritik, koreksi dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi civitas akademi Universitas Sanata Dharma secara khusus bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah.

Yogyakarta, 24 Pebruari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Persetujuan Pembimbing..... | ii |
| Halaman Pengesahan..... | iii |
| Halaman Moto..... | iv |
| Halaman Persembahan..... | v |
| Pernyataan Keaslian..... | vi |
| Abstrak..... | vii |
| <i>Abstract</i> | viii |
| Kata Pengantar..... | ix |
| Daftar Isi..... | xi |
| Daftar Tabel..... | xiii |
| Daftar Foto..... | xiv |
| Daftar Peta..... | xv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 11 |
| F. Landasan Teori..... | 15 |
| G. Metode dan Pendekatan..... | 36 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 43 |
| BAB II LATAR BELAKANG MUNCULNYA POLITIK APARTHEID DI AFRIKA SELATAN TAHUN 1948-1990 | |
| A. Keadaan Demografi dan Ekonomi di Afrika Selatan Tahun 1948- 1980..... | 45 |
| B. Latar Belakang Munculnya Politik <i>Apartheid</i> di Afrika Selatan Tahun 1948-1990..... | 51 |
| 1. Latar Belakang Historis..... | 55 |
| 2. Latar Belakang Keagamaan..... | 69 |
| 3. Latar Belakang Ekonomis..... | 74 |

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III PELAKSANAAN POLITIK *APARTHEID* DI AFRIKA SELATAN

TAHUN 1948-1990

| | |
|----------------------------|-----|
| A. Bidang Pendidikan | 84 |
| B. Bidang Ekonomi..... | 93 |
| C. Bidang Sosial | 99 |
| D. Bidang Politik..... | 109 |

BAB IV REAKSI TERHADAP PELAKSANAAN POLITIK *APARTHEID*

DI AFRIKA SELATAN TAHUN 1948-1990

| | |
|---|-----|
| A. Reaksi Dalam Negeri..... | 124 |
| B. Reaksi Luar Negeri..... | 135 |
| 1. Organisasi Persatuan Afrika (<i>African Organization Unity</i>)..... | 135 |
| 2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) | 137 |
| C. Upaya Penyelesaian | 148 |

BAB V AFRIKA SELATAN SETELAH MASA *APARTHEID*

| | |
|---|-----|
| A. Situasi di Afrika Selatan Pasca <i>Apartheid</i> | 152 |
| 1. Dalam Bidang Politik | 153 |
| 2. Dalam Bidang Ekonomi..... | 155 |
| 3. Dalam Bidang Sosial | 156 |
| B. Upaya Rekonsiliasi dan Rehabilitasi | 160 |

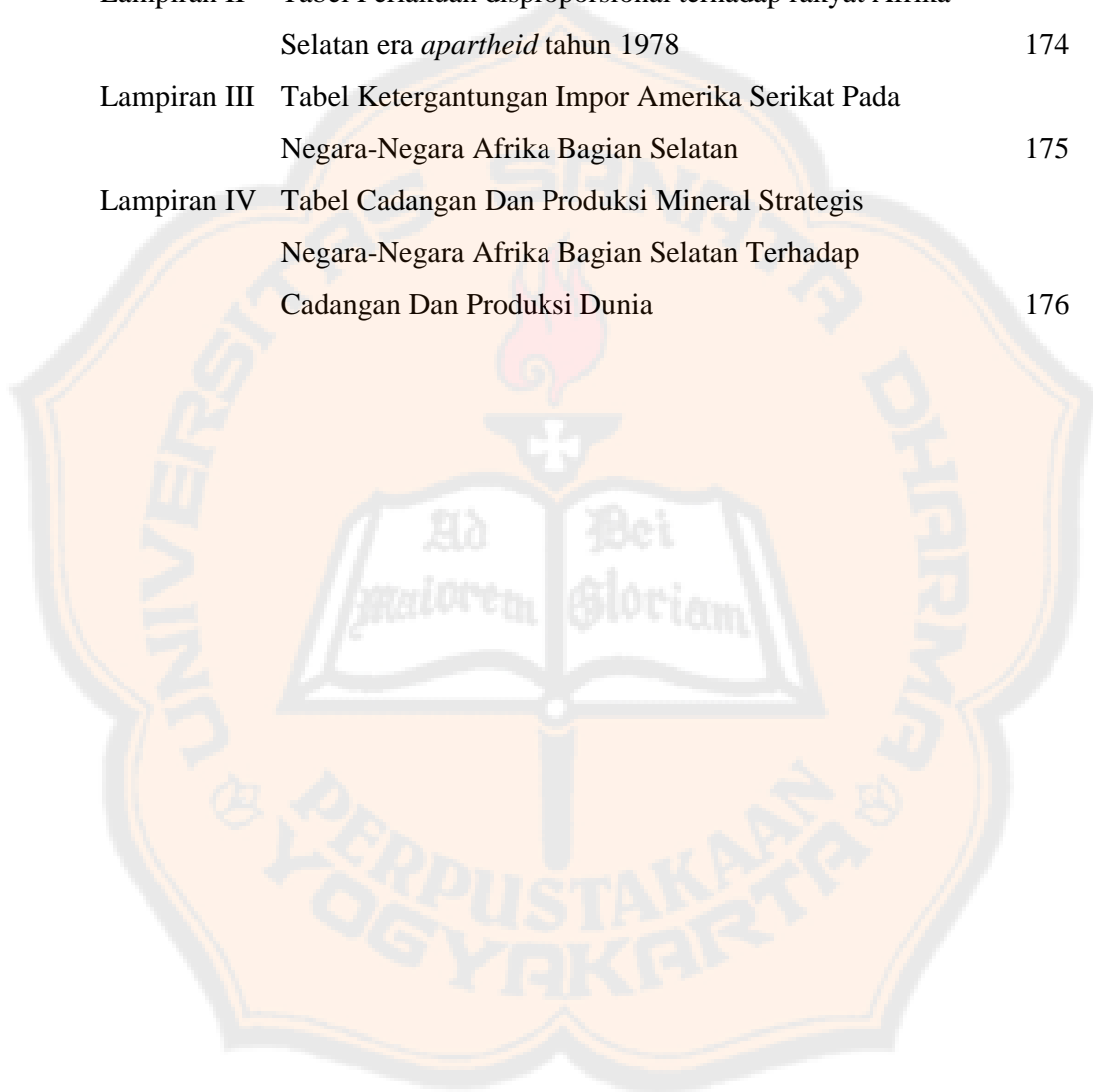
BAB VI KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran I Tabel Pemimpin Pro <i>apartheid</i> di Afrika Selatan | 173 |
| Lampiran II Tabel Perlakuan disproportional terhadap rakyat Afrika Selatan era <i>apartheid</i> tahun 1978 | 174 |
| Lampiran III Tabel Ketergantungan Impor Amerika Serikat Pada Negara-Negara Afrika Bagian Selatan | 175 |
| Lampiran IV Tabel Cadangan Dan Produksi Mineral Strategis Negara-Negara Afrika Bagian Selatan Terhadap Cadangan Dan Produksi Dunia | 176 |

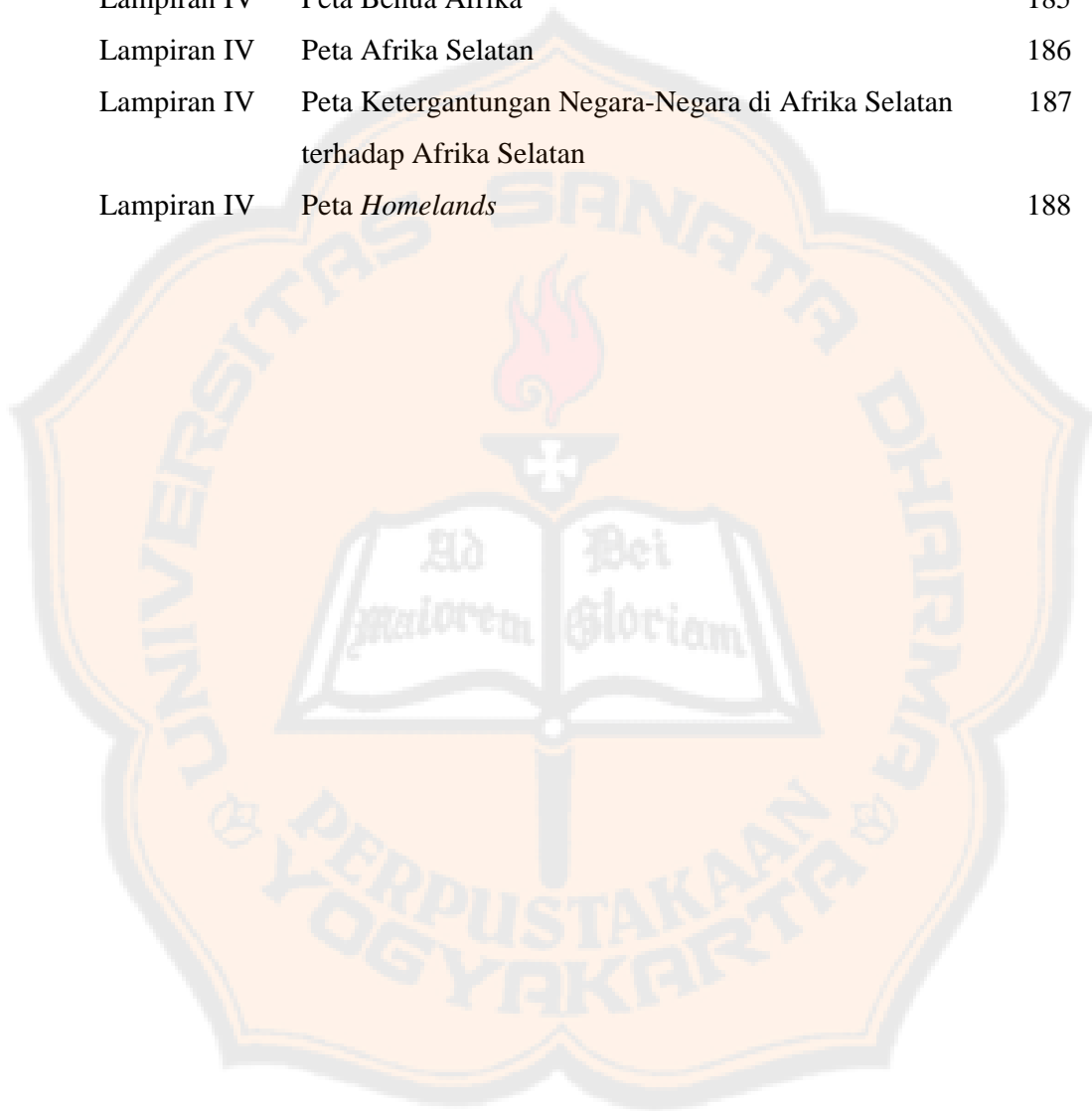


DAFTAR LAMPIRAN FOTO

| | | Halaman |
|---------------|---|---------|
| Lampiran V | PassBook (Foto 1&2) | 177 |
| Lampiran VI | Perumahan Kulit Hitam Era <i>Apartheid</i> di Soweto | 178 |
| Lampiran VII | Peringatan/ancaman yang bersifat rasis di Afrika Selatan | 179 |
| Lampiran VIII | Nelson Mandela | 180 |
| Lampiran IX | Frederick Willem de Klerk | 181 |
| Lampiran X | Lambang ANC (<i>the African National Congress</i>) | 182 |
| Lampiran XI | Penjara <i>Robben Island</i> | 183 |
| Lampiran XII | Lambang Partai Nasional (<i>the National Party</i>) di Afrika Selatan | 184 |

DAFTAR LAMPIRAN PETA

| | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran IV Peta Benua Afrika | 185 |
| Lampiran IV Peta Afrika Selatan | 186 |
| Lampiran IV Peta Ketergantungan Negara-Negara di Afrika Selatan terhadap Afrika Selatan | 187 |
| Lampiran IV Peta <i>Homelands</i> | 188 |



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Republik Afrika Selatan secara geografis terletak di ujung selatan benua Afrika, dibatasi di timur laut oleh Swaziland dan Mozambik, di utara oleh Botswana dan Zimbabwe dan di barat laut oleh Namibia (Afrika Baratdaya). Di sebelah barat terletak Samudra Atlantik, sedangkan di sebelah timur Samudra Hindia¹. Negara ini terdiri dari empat propinsi yaitu Tanjung Harapan (*Cape of Good Hope*) sekarang disebut Cape Town, Natal, Negara Merdeka Oranye (*Oranye Free State*) dengan ibu kotanya Bloemfontein, dan Pretoria dengan ibu kota Transvaal. Ada tiga kota yang berfungsi sebagai ibu kota Afrika Selatan, yaitu Cape Town, Pretoria, dan Bloemfontein. Masing-masing kota tersebut menjalani fungsi pemerintahan yang berbeda. Urusan legislatif terdapat di Cape Town, sedangkan eksekutif di Pretoria. Adapun Bloemfontein adalah sebagai ibu kota untuk urusan yudikatif. Cape Town merupakan kota terbesar di Afrika Selatan dan merupakan kota pelabuhan penting serta menjadi pusat aktivitas perindustrian berat. Satu kota lain yang penting di Afrika Selatan adalah Johannesburg. Kota ini tidak termasuk ibu kota Afrika Selatan, namun menjadi salah satu pusat bisnis dan industri pertambangan, karena banyak tambang emas yang terletak di daerah ini.

¹ Grolier International, *Negara Bangsa Asia dan Afrika*, Widyadara, Jakarta, 1988, hlm. 158. Lihat lampiran XIII (Peta Benua Afrika) dan lampiran XV (Peta Afrika Selatan) hlm. 185 & 186.

Selain letak geografis, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek historis juga perlu diterangkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan dengan latar belakang dalam penulisan ini. Khusus untuk keadaan ekonomi dan demografi, penulis hanya akan menjelaskan secara garis besar saja, selengkapnya akan dibahas pada Bab II.

Walter F. Han dan Alvin Cottrell dalam buku mereka *Soviet Shadow Over Africa* menyatakan bahwa Afrika mempunyai arti yang sangat penting dari aspek ekonomi. Pertama, Afrika kaya akan bahan-bahan mentah yang vital bagi industri modern. Kekayaan alam itu khususnya berlimpah di Afrika bagian selatan, setelah ditemukannya tambang-tambang intan di antara Sungai Vaal dan Sungai Orange dan tambang-tambang emas di Witwatersrand dan Afrika bagian tengah. Afrika Selatan merupakan negara yang kaya akan bahan tambang, terutama bahan tambang bernilai tinggi seperti emas, platinum dan berlian. Selain bahan tambang, Afrika Selatan juga kaya akan bahan mineral yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara industri barat, yaitu uranium, dan merupakan satu dari tujuh daerah penghasil uranium yang penting. Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang menghasilkan enam belas persen uranium dunia². Kedua, negara-negara industri barat membutuhkan bahan-bahan mentah yang dihasilkan oleh Afrika dan sekitar delapan puluh persen suplai minyak dan tujuh puluh persen suplai bahan mentah negara-negara industri barat diangkut lewat jalur pelayaran Tanjung Harapan (*Cape of Good Hope*)³. Afrika bagian selatan adalah

² Kebutuhan negara-negara Barat terhadap kekayaan tambang yang ada di Afrika Selatan dapat dilihat pada lampiran III dan IV hlm. 175 dan 176 .

³ Kirdi Dipoyudo, *Afrika Dalam Pergolakan 2*, Yayasan Proklamasi Centre For Strategic and International Studies, Jakarta, 1983, hlm. 61-62.

daerah yang paling berharga bagi kepentingan perdagangan dan penanaman modal serta kolonisasi bangsa kulit putih. Oleh karena itu kekayaan yang terdapat di Afrika Selatan menjadi salah satu alasan yang bersifat ekonomis bagi pemerintah Afrika Selatan untuk menerapkan politik *apartheid*.

Afrika Selatan dari aspek sosial budaya adalah negara multiras dan multi-etnik. Di negara ini terdapat empat kelompok ras utama: kulit hitam (68%), kulit putih (19%), kulit berwarna (10%, berdarah campuran Afrika dan bangsa lain) dan Asia (3%). Adapun etnik pada kulit hitam antara lain terdiri dari etnik Zulu, Xhosa, Sotho Utara, Tswana, Sotho Selatan, Tsonga, Venda, dan Ndebele. Sebagian besar penduduk Afrika Selatan beragama Kristen. Adapun bahasa yang digunakan bervariasi, yaitu bahasa *Afrikaans*, Inggris dan Bantu⁴. Meskipun mayoritas penduduk Afrika Selatan adalah kulit hitam tetapi yang mengendalikan roda pemerintahan adalah bangsa kulit putih (minoritas) terutama Inggris dan Belanda.

Aspek historis, selain aspek ekonomi dan sosial budaya juga merupakan hal yang sangat penting untuk dijelaskan karena sejarah Afrika Selatan tidak terlepas dari kolonialisme dan imperialisme terutama oleh bangsa Inggris dan Belanda. Inggris dan Belanda merupakan dua negara Eropa yang pernah menduduki Afrika Selatan dan menjadikan negara tersebut sebagai daerah koloni. Natal dan Cape Colony merupakan daerah-daerah koloni Inggris sedangkan Transvaal dan Orange Free State merupakan daerah koloni Belanda. Pengetahuan orang Eropa yang pertama tentang Afrika bagian selatan muncul dengan

⁴ *Ibid*, hlm.169.

ditemukannya Tanjung Harapan oleh Bartolomeus Dias pada tahun 1488. Pada abad ke-17 orang Belanda dan Inggris mulai bersaing untuk menguasai perdagangan di Timur Jauh. Karena pelayaran dari Eropa ke Timur Jauh itu jauh, maka diperlukan adanya stasiun persinggahan dan perbekalan. Oleh karena itu pada tahun 1652, *Dutch East India Company* mendirikan stasiun persinggahan di teluk *Table* di ujung utara semenanjung Tanjung. Tiga kapal penuh pemukim dikirimkan di bawah pimpinan Jan van Riebeeck. Setelah mendarat, orang Belanda dengan segera mendirikan sebuah benteng dan mulai melakukan kolonisasi. Banyak di antara para pemukim Belanda yang keluar dari benteng dan bermukim untuk memelihara sapi dan berdagang dengan orang Afrika. Tidak lama kemudian jumlah orang Eropa semakin banyak. Selain bangsa Belanda, datang juga bangsa Vlaam, Jerman, dan kaum Huguenot Perancis yang meninggalkan Perancis untuk mencari kebebasan beragama⁵.

Dengan semakin banyaknya orang Eropa, mereka mulai pindah menjauhi Cape Town menghindari kekuasaan *Dutch East India Company*. Ikatan dengan negeri Belanda terputus dan pecah untuk selamanya. Orang-orang Eropa tersebut mulai membentuk bahasa (bahasa *Afrikaan*) dan kebudayaan mereka sendiri. Akibatnya, muncul dua kelompok kulit putih di Afrika Selatan yaitu kelompok yang lebih besar berbahasa *Afrikaan* dan kelompok yang lebih kecil berbahasa Inggris.

Selama berkecamuknya Perang Napoleon, Inggris memperoleh Koloni Tanjung dari tangan Belanda. Pada tahun 1815 Kongres Wina dengan resmi

⁵ *Ibid*, hlm. 168.

menetapkan pemilikan Inggris atas Tanjung. Tahun 1820-an semakin banyak imigran Inggris mulai memasuki Koloni Tanjung. Penduduk Belanda (yang disebut kelompok *Boer*, yang dalam bahasa Belanda berarti “petani”) tidak senang terhadap pemukiman Inggris dan tidak lama kemudian kedua kelompok tersebut terlibat dalam pertikaian. Pada tahun 1830-an ketidaksenangan Belanda memuncak dan banyak warga *Boer* bertekad meninggalkan Tanjung. Diawali pada tahun 1835 dan berlangsung terus sampai pada tahun 1838, ratusan kereta meninggalkan Tanjung dan bergerak tersendat-sendat ke arah timur dan utara. Migrasi ini disebut *The Great Trek* (Perjalanan Besar). Perjalanan itu tidak sekali saja terjadi. Kelompok orang Belanda yang tak terkira banyaknya mengikuti jejak iring-iringan kereta perintis dan akhirnya melahirkan sejumlah negara merdeka, yang terbesar di antaranya adalah Negara Merdeka Oranye dan Transvaal.

Kericuhan terus memuncak dan pada tahun 1899 pertikaian antara kelompok *Boer* dan kelompok Inggris mencapai titik klimaksnya dan meletuslah perang yang disebut perang *Boer* yang dimenangkan oleh kelompok Inggris. Pada bulan Mei 1902 kelompok *Boer* menyerah kalah kepada pasukan Inggris. Inggris memberikan hak memerintah sendiri kepada kelompok *Boer* dan pada tahun 1910 Negara Merdeka Oranye, Transvaal, dan kedua koloni Inggris (Tanjung Harapan dan Natal) membentuk Uni Afrika Selatan.

Terbentuknya Uni Afrika Selatan merupakan kemenangan bagi kaum *Afrikaner*⁶, sebab sebagian besar anggota Parlemen Pusat adalah orang-orang *Afrikaner*. Orang-orang *Afrikaner* adalah orang-orang yang memiliki perasaan

⁶ *Afrikaner* adalah orang kulit putih yang berbicara dalam bahasa *Afrikaan* di Afrika Selatan dan umumnya keturunan orang *Boer*.

perbedaan ras yang amat kuat dan mempengaruhi budaya *Afrikaner*. Sikap yang membudaya ini dikukuhkan oleh kebijakan pemisahan yang resmi yang disebut *apartheid*. *Apartheid* dalam bahasa *Afrikaan* berarti “pemisahan” dan diucapkan “*apart-hate*” (*hate* artinya benci). *Apartheid* adalah pemisahan berdasarkan ras dan merupakan salah satu bentuk diskriminasi kulit putih terhadap orang lain karena perbedaan warna kulit. Secara teoritis, *apartheid* bertujuan mendirikan masyarakat rasial yang terpisah, sedangkan secara praktis *apartheid* bertujuan untuk mempertahankan supremasi kulit putih. *Apartheid* yang berarti “pemisahan” di Afrika merupakan suatu sistem sosial yang diterapkan oleh pemerintahan minoritas kulit putih di negara Afrika Selatan. Sistem ini memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi orang kulit putih Afrika Selatan yang merasa takut oleh ancaman terhadap supremasinya atas lebih dari sepuluh juta rekan sewarganegara non putih.

Politik *apartheid* sangat sarat dengan kolonialisme, paham yang semestinya sudah tidak dipakai lagi di abad ke-20 ini. *Apartheid* adalah suatu campuran antara praktek-praktek kolonial, superioritas rasial kulit putih, teologi Calvinis serta paternalisme yang pada intinya mengajarkan bahwa setiap ras mempunyai panggilan tertentu dan harus memberikan sumbangan budaya kepada dunia, dan oleh sebab itu ras-ras harus dipisahkan satu sama lain agar dapat hidup dan berkembang sesuai dengan kepribadian dan kebudayaannya. Kontak antara ras yang dapat membahayakan kemurnian budaya ras harus dibatasi. Segregasi dan perkembangan terpisah itu tidak hanya berlaku bagi golongan-golongan rasial yang penting tetapi juga untuk kelompok-kelompok etnis yang lebih kecil.

Berdasarkan pandangan itu maka penduduk di Afrika selatan dipecah menjadi empat golongan rasial : kulit putih, kulit hitam, berwarna dan Asia. Tentu bukan pembagian ini yang menjadi soal dan dirasa menyesakkan, melainkan hak-hak dan kewajiban yang memang tidak adil. Kelompok putih yang hanya merupakan 16,7 % penduduk itu menguasai 87,1% wilayah Afrika Selatan. Wilayah yang dikuasai pun untuk tanah yang tergolong kelas satu atau yang strategis untuk ukuran ekonomi seperti daerah perindustrian dan pertambangan. Sisanya tanah-tanah yang tergolong tandus dan tidak produktif, diperuntukkan bagi penduduk hitam yang merupakan 71 % dari seluruh penduduk Afrika Selatan⁷.

Dengan sistem *apartheid* setiap orang dengan hukum telah dicap sejak lahir berdasarkan warna kulit, dan berdasarkan kriteria itu akan menjadi warga negara kelas satu, dua, tiga atau empat (Kulit Putih, Berwarna, Asia, dan Hitam). Orang kulit hitam meskipun merupakan 71% dari penduduk, tidak berhak memberikan suara dalam pemilihan umum, tidak dapat masuk bioskop atau restoran (bukan mewah) yang sering didatangi oleh kulit putih, hanya dapat menggunakan kamar kecil yang disediakan khusus untuk warna itu, dan tidak dapat naik bis yang sama dengan orang kulit putih. Yang bahkan tidak masuk akal lagi adalah bahwa orang kulit hitam harus tinggal di daerah yang berbeda dari orang kulit putih : mereka harus tinggal di kota khusus atau daerah khusus yang dinamakan *Bantustan* (daerah permukiman yang berbentuk “negara”, yang diperuntukkan untuk warga Afrika). Hanya seratus dua puluh ribu orang kulit hitam yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dibolehkan tinggal di

⁷ Drs. A.A.Padi, *Setelah Tembok Berlin Jebol, Kini Giliran Politik Apartheid ?*, BERNAS. Yogyakarta, 1990, hlm. 2.

Johannesburg, akan tetapi mereka harus tidur di bangunan yang terpisah dari orang kulit putih. Orang kulit hitam yang berjumlah kurang lebih tujuh puluh persen dari total populasi yang ada, dikucilkan dari area kerja atau pemukiman penduduk yang memiliki warna kulit putih, kecuali jika mereka memiliki izin. Izin dikeluarkan hanya untuk satu area saja di mana pemegang izin itu akan pergi dan hanya akan diberikan pada seseorang yang telah setuju untuk bekerja sedangkan pasangan dan anak-anaknya tetap tinggal di daerah yang khusus ditempati oleh kulit hitam. Kota-kota besar di Afrika Selatan seperti Pretoria dan Johannesburg, seluruh penduduknya terdiri dari orang kulit putih. N. Motlana, seorang pemimpin nasionalis kulit hitam mengatakan “kami bukan warga negara ini, kami hanya penduduk hantu“. Pernyataan ini seakan-akan menyiratkan bahwa rakyat Afrika tidak lagi berada di Afrika, akan tetapi berada di suatu bagian Eropa. Eksistensi mereka di negerinya sendiri sama sekali tidak diakui oleh orang kulit putih.

Segregasi rasial yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan terhadap orang kulit hitam dilaksanakan di segala bidang kehidupan. Proses pemisahan rasial ini dimulai dengan segregasi di tempat-tempat umum seperti, pantai, kereta api, bis dan angkutan lain. Fasilitas transportasi kulit hitam dan kulit putih dibedakan adanya. Kereta kelas tiga untuk orang kulit hitam. Bis kulit hitam berhenti di halte khusus untuk kulit hitam dan bis untuk kulit putih menempati halte khusus kulit putih. Pantai publik juga dibedakan secara rasial, di mana sebagian besar diperuntukkan bagi kulit putih, termasuk semua pantai yang

terbaik. Selain segregasi di tempat-tempat umum, dilakukan pula segregasi terhadap perkumpulan-perkumpulan sosial, kebudayaan dan keagamaan.

Dalam penulisan ini, pelaksanaan politik *apartheid* di Afrika Selatan dibatasi dari tahun 1948-1990. Alasan penulis membatasi tulisan ini dari tahun 1948-1990 adalah sebagai berikut : tahun 1948 adalah tahun di mana politik *apartheid* menjadi sistem penindasan yang resmi dan legal sejak partai nasionalis yang didominasi oleh orang *Afrikaner*, memenangkan pemilihan umum pada tahun 1948 di bawah pimpinan Dr. Daniel Francois Malan. Setelah kemenangan partai nasionalis dalam pemilihan umum tahun 1948, partai nasionalis segera mengimplementasikan kebijakan pemisahan rasialnya yang serba ketat dengan menciptakan sistem *apartheid*. Berbagai macam undang-undang pun dibuat oleh pemerintah Afrika Selatan yang dengan teliti mengatur seluruh kehidupan berbagai ras, terutama sekali “yang rendah” dan dengan ketat mengatur perincian-perincian kehidupan sehari-hari dan kehidupan pribadi bahkan yang paling kecil dan paling intim sekalipun. Sedangkan tahun 1990 merupakan tahun pembebasan Nelson Mandela, seorang tokoh yang menentang *apartheid* dan memperjuangkan kebebasan di Afrika Selatan. Pembebasan Nelson Mandela menjadi awal perjuangan untuk mengakhiri politik *apartheid* di Afrika Selatan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya politik *apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948-1990 ?

2. Bagaimana pelaksanaan politik *apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948-1990 ?
3. Bagaimana reaksi terhadap pelaksanaan politik *apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948-1990 ?
4. Bagaimana situasi di Afrika Selatan setelah masa *apartheid* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Mendeskripsi latar belakang munculnya politik *apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948 – 1990.
2. Mendeskripsi pelaksanaan politik *apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948 – 1990.
3. Mendeskripsi reaksi terhadap pelaksanaan politik *apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948 – 1990.
4. Mendeskripsi situasi di Afrika Selatan setelah masa *apartheid*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Sejarah, penulisan ini dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang sejarah Afrika Selatan khususnya mengenai latar belakang munculnya politik *apartheid* di Afrika Selatan, bagaimana pelaksanaannya dan reaksi terhadap politik *apartheid* serta situasi di Afrika Selatan setelah masa *apartheid*.

2. Bagi para pembaca, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan mengenai politik *apartheid* di Afrika Selatan

3. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan mengenai politik *apartheid* di Afrika Selatan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder sebagai sumber pendukung. Adapun sumber-sumber buku yang digunakan yaitu :

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi, dengan mata kepala sendiri atau dengan pancaindera lain hadir pada peristiwa yang diceritakannya atau menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Beberapa buku yang digunakan sebagai sumber primer dalam penelitian ini yaitu :

Nelson Mandela Langkah Menuju Kebebasan Surat-surat dari Bawah Tanah karya Nelson Mandela (terjemahan) Penerbit Yayasan Obor Jakarta, tahun 1993. Buku ini berisi uraian tentang perjuangan Nelson Mandela merebut kembali hak-hak kemanusiaan rakyat kulit hitam di Afrika Selatan.

Perjalanan Panjang Menuju Kebebasan karya Nelson Mandela (terjemahan) Penerbit Bina Rupa Aksara Jakarta, tahun 1995. Buku ini berisi tentang otobiografinya yang menceritakan tentang kehidupannya yang luar biasa, mengenai perjuangannya, harapan-harapannya sampai pada keberhasilannya.

Dalam buku ini Nelson Mandela bercerita mengenai tahun-tahun awalnya sebagai mahasiswa miskin di Johannesburg, mengenai pertumbuhan kesadaran politiknya yang lambat dan mengenai peranannya yang penting dalam melahirkan kembali *the African National Congress* (satu-satunya organisasi yang menaruh harapan dan aspirasi untuk semua orang Afrika) yang mandek. Selain itu, ia juga menceritakan bagaimana peperangan politik meningkat pada dekade 50-an antara *the African National Congress* dan pemerintah, berpuncak dalam petualangan dramatisnya sebagai seorang pemimpin bawah tanah dalam sidang Rivonia yang terkenal pada tahun 1964 di mana ia dihukum penjara seumur hidup. Ia menceritakan dua puluh tujuh tahun di penjara yang ternyata penuh peristiwa dan negosiasi-negosiasi rumit dan sulit yang membawa pada perubahan-perubahan dan awal dari berakhirnya *apartheid* yang akhirnya menghasilkan suatu demokrasi multirasial yang bebas di Afrika Selatan.

Nelson Mandela, Pemimpin Afrika yang Dipenjara selama 27 Tahun Karena Menentang Apartheid (terjemahan Hilmar Farid) penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta, tahun 1993. Buku ini berisi uraian tentang kampanye tanpa kekerasan oleh Nelson Mandela dan keputusannya untuk memimpin *the African National Congress* ketika terjun dalam perlawanan dengan kekerasan untuk mengakhiri *apartheid*.

Alasan penulis menggunakan buku-buku karya Nelson Mandela sebagai sumber primer, karena beliau adalah warga kulit hitam Afrika Selatan yang menyaksikan dan mengalami sendiri kepedihan dan kekejaman *apartheid* di

Afrika Selatan. Kejadian-kejadian yang dialaminya selama masa *apartheid* diceritakan kembali melalui tulisan dalam bentuk buku.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya⁸. Beberapa sumber sekunder yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut :

Afrika dalam Pergolakan 2 karya Kirdi Dipoyudo Penerbit Yayasan Proklamasi *Centre For Strategic and International Studies* Jakarta, tahun 1983. Buku ini berisi penjelasan tentang pergolakan-pergolakan yang terjadi di negara-negara Afrika, pasca kolonialisme dan dominasi rasial kulit putih di benua Afrika dan bertekad untuk menghancurkannya.

Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah karya Cassese Antonio (terjemahan A.R.Zainuddin) diterbitkan oleh Yayasan Obor Jakarta, tahun 1994. Buku ini berisi tentang perkembangan hak asasi manusia baik sebagai gagasan maupun sebagai perangkat nilai sosial dalam hubungan internasional, pengaruh dari nilai-nilai hak-hak asasi manusia itu terhadap perilaku, pola hubungan antarnegara, hukum internasional dari zaman LBB (Lembaga Bangsa-Bangsa) sampai pecahnya Perang Dunia II, dan pembentukan PBB hingga perkembangannya dewasa ini. Isi buku ini tersusun dalam tiga bagian. Penulis lebih memfokuskan pada bagian II, bab VI, yang berjudul "catatan-catatan tentang *apartheid*". Bagian II, bab VI dalam buku ini berisi tentang ciri-ciri pemisahan

⁸ Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah (terjemahan)*, Jakarta UI Press, 1985, hlm. 35.

rasial di Afrika Selatan di mana setiap orang dengan hukum telah dicap sejak lahir berdasarkan warna kulit, dan berdasarkan kriteria tersebut akan menjadi warga negara kelas satu, dua, tiga atau empat (kulit putih, hitam, berwarna dan Asia). Di samping itu, buku ini juga menjelaskan tentang alasan utama mengapa Afrika Selatan berangsur-angsur mengubah negaranya menjadi sebuah negara rasial yang radikal, juga menjelaskan reaksi masyarakat internasional terhadap pelaksanaan politik *apartheid* di Afrika Selatan.

Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai (terjemahan), editor oleh Peter Davies, Penerbit Yayasan Obor Jakarta tahun 1994. Buku ini memuat tiga belas buah karangan lepas yang meninjau hak asasi manusia dari berbagai seginya. Salah satu karangan yang dipilih penulis yaitu karangan yang berjudul "Perjuangan Menentang *Apartheid*" karya Donna del Gaudio. Karangan ini berisi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menentang politik *apartheid* di Afrika Selatan dengan menyetujui sejumlah sanksi yang tujuannya adalah mengakhiri politik *apartheid* di Afrika Selatan.

Apartheid In Action dalam *History of South Africa* karya Tom Hopkinson diterbitkan oleh Life World Library South Africa, tahun 1964. Buku ini berisi penjelasan tentang sejarah Afrika Selatan di masa *apartheid* yang dimulai pada tahun 1948 sejak Partai Nasionalis yang didominasi oleh orang *Afrikaner* di bawah pimpinan Dr. Daniel Francois Malan memenangkan pemilihan umum serta secara legal dan formal mulai mengimplementasikan kebijakan rasialnya yang serba ketat dengan menciptakan sistem *apartheid* di Afrika Selatan.

The Atlas Of Apartheid karya A.J.Christoper diterbitkan oleh Routledge, New York tahun 1994, membahas tentang perkembangan diskriminasi rasial pada era kolonial, pelaksanaan *apartheid* dalam berbagai aspek kehidupan, perlawanan terhadap *apartheid* dan respon internasional terhadap pelaksanaan *apartheid* di Afrika Selatan. Selain itu dalam buku ini juga terdapat peta-peta *apartheid* yaitu peta yang menunjukkan lokasi-lokasi yang memisahkan antara ras yang satu dengan ras yang lain baik dalam bidang pendidikan, transportasi, ekonomi, wilayah atau tempat tinggal dan sebagainya.

F. LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan skema pemikiran atau kerangka konseptual, yang dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian yang relevan dan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik. Untuk mengkaji penelitian yang berjudul “Politik *Apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948–1990”, dasar teori yang digunakan sebagai landasan berpikir yaitu: superioritas kulit putih. Rasa superioritas (merasa lebih unggul) inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya diskriminasi ras, penjajahan dan kebencian antar ras. Di samping itu, penulis juga perlu menjelaskan atau menguraikan beberapa hal yang mendukung dan berkaitan dengan judul dan istilah yang akan muncul dalam penulisan ini. Konsep-konsep tersebut adalah konsep politik dan *apartheid*.

1. Superioritas Kulit Putih

Joseph–Arthur Comte de Gobineau dalam karyanya *An Essay on the Inequality of Human Races* pada pertengahan abad ke-19, dalam tulisannya

mengajarkan tentang superioritas ras kulit putih atas semua ras⁹. Joseph-Arthur Comte de Gobineau menyetujui atau menganut paham bahwa “ras Arya” merupakan ras yang paling maju dan ras ini pada dasarnya merupakan ras yang paling tinggi dibandingkan ras lainnya. Contoh yang paling nyata adalah ketika Adolf Hitler berkuasa di Jerman. Adolf Hitler dengan nasionalisme-sosialisme (Nazi)-nya mengajarkan bahwa ras Aria adalah ras yang paling unggul, sedangkan Yahudi dan non Aria adalah bangsa inferior. Keyakinan Adolf Hitler dengan superioritas Jerman dan kebenciannya kepada orang-orang Yahudi tercermin dalam kebijakan Nazi, berupa pembantaian terhadap sekitar enam juta orang Yahudi selama kurun waktu tahun 1930 an dan 1940 an.

An Essay on the Inequality of Human Races (Perbedaan Ras-Ras Umat Manusia, Sebuah Esei) yang ditulis oleh Joseph-Arthur Comte de Gobineau merupakan sebuah esei tentang tidak samanya ras-ras umat manusia dengan dalil bahwa semua manusia itu secara anatomis, fisik, dan psikologis tidaklah sama, oleh karena itu mempunyai bakat sosial dan intelektual yang berbeda. Mengapa peradaban dapat muncul, kemudian ambruk dijelaskannya, karena kesatuan ras dari pemiliknya rusak akibat kemasukan pengaruh unsur-unsur dari luar. Menurut Joseph-Arthur Comte de Gobineau untuk meningkatkan suatu peradaban, diperlukan dua sumber pada manusia sendiri, yakni sumber materialistis yang jantan dan sumber kerohanian yang betina¹⁰.

⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/An_Essay_on_the_Inequality_of_Human_Races.

¹⁰ Dikutip oleh N. Daldjoeni dari judul asli *An Essay of the Inequality of Human Races* oleh Joseph Arthur de Gobineau, *Ras-Ras Umat Manusia (Biogeografis, Kulturhistoris, Sosiopolitis)*, Citra Aditya, Bandung, 1991, hlm. 226.

Joseph-Arthur Comte de Gobineau melawan paham yang mengatakan bahwa asal-usul manusia itu berasal dari berbagai tempat. Sejak semula, mungkin hanya ada satu ras saja yang tumbuh menjadi tiga, yakni: ras putih (Kaukasis, Semitis atau Japhetis), ras hitam (Hamitis) dan ras kuning (Mongolis, Altais, Fins dan Tartar). Menurutny, bagaimanapun ras putih adalah ras yang superior. Bahkan Gobineau membuat suatu konklusi dengan menyatakan bahwa segala peradaban bersumber pada ras putih. Peradaban atau kebudayaan Eropa berada dalam taraf yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kebudayaan dari bangsa-bangsa non Eropa (Asia, Afrika), bahkan kebudayaan kulit putih dipandang sebagai acuan perkembangan bagi semua budaya. Dari sinilah muncul pandangan superioritas dan inferioritas satu ras terhadap ras yang lain. Orang kulit putih menurut keyakinan Joseph-Arthur Comte de Gobineau mempunyai kemampuan memerintah bagi kepentingan setiap orang dan dengan demikian memajukan peradaban. Superioritas kulit putih merupakan suatu keyakinan rasis bahwa ras kulit putih lebih tinggi atau lebih unggul dari ras lainnya¹¹. Istilah ini kadang secara khusus digunakan untuk mendeskripsikan suatu pandangan filosofis bahwa ras kulit putih tidak hanya lebih tinggi dibandingkan ras lain melainkan harus berkuasa atas mereka.

Superioritas kulit putih selalu menganggap kelompok mereka sebagai kelompok yang baik menurut ras, agama, kelas, ekonomi, sosial politik dan sebagainya. Mereka beranggapan bahwa kelompoknya adalah kelompok terbaik, satu-satunya yang benar dan yang memiliki cita-cita yang paling luhur untuk

¹¹ *Ibid*, hlm. 227.

mendominasi dunia. Paham superioritas ini menempatkan pihak-pihak lainnya (terutama kulit hitam/kulit berwarna) sebagai kelompok yang tingkatannya lebih rendah dari mereka. Hampir semua peneliti modern menganggap bahwa doktrin superioritas satu ras manusia di atas ras yang lain adalah tidak masuk akal. Bila dilihat dari pandangan sejarah dan penelitian saintis, jelas doktrin ini merupakan kepercayaan yang artifisial (tidak alami atau dibuat-buat). Keragaman dan perbedaan warna kulit seharusnya dipahami sebagai kemajemukan ras, bukan menunjukkan suatu superioritas.

Di Afrika Selatan, superioritas kulit putih tercermin dalam bentuk politik *apartheid* yang menyebabkan adanya diskriminasi ras antara orang-orang kulit putih dan kulit berwarna (khususnya mayoritas kulit hitam) dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Politik

Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Perkataan “politik” pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani kuno, Aristoteles (384-322 M). Dalam bukunya yang berjudul *Politeia*, ia membahas mengenai negara kota (polis). Kata polis ini kemudian berkembang menjadi politik yang berarti “masalah yang berkaitan dengan negara”. Ungkapan dari Aristoteles yang terkenal “manusia pada dasarnya adalah mahluk politik atau disebut *zoon politikon* mengandung makna yang sangat luas tentang politik. Menurut Aristoteles, manusia merupakan mahluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesamanya untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Keinginan manusia itu dapat berupa

kedudukan (kekuasaan) dalam masyarakat atau kepemilikan atas sumber materi (kesejahteraan). Cakupan kajian ilmu politik tentang ketatanegaraan dan kekuasaan ditempatkan dalam kaitannya dengan proses pembentukan kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari politik atau praktek politik akan diformalkan dalam suatu keputusan. Keputusan tersebut menjadi sah lewat keputusan hukum. Karena itu keputusan hukum (undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain) hakikatnya merupakan formalisasi keputusan dan kemauan politik rakyat (lewat wakil-wakilnya). Pelaksanaan politik pemerintah menjadi benar bilamana merupakan penjabaran dari cita-cita/tujuan negara yang telah disepakati¹². Dengan demikian, untuk melihat warna politik suatu negara, tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana/siapa yang menyusun aturan hukum dan bagaimana pelaksanaannya. Menurut Profesor A. Hoogerwerf, pengertian politik dapat dibagi dalam beberapa kategori, dilihat dari sudut pandangan tertentu. Pembagiannya adalah sebagai berikut¹³ :

1. Mengandung pengertian kebijakan, artinya
 - a. Kehidupan politik itu mencakup segala aktivitas yang berpengaruh terhadap kebijakan atau *policy* yang berwibawa dan berkuasa yang diterima oleh suatu masyarakat (David Easton, 1963).
 - b. Politik merupakan perbuatan yang berkaitan dengan perjuangan kolektif dengan segenap kebijakannya untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif tertentu (Talcott Parson, 1966).

¹² Abdul Syukur, Ensiklopedi Umum Untuk pelajar Jilid 8, PT. Ichtiar Baru van Hoeke, Jakarta, 2005, hlm. 55

¹³ Dr. Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar Maju.Bandung, 1996, hlm. 15-17.

- c. Politik merupakan perbuatan intensional, bertujuan, terorganisir, dan mengikuti satu perencanaan pasti, yang teguh memperjuangkan tegaknya, pemeliharaan, dan perubahan suatu pengaturan masyarakat (Peter von Oertzen).
2. Mengandung pengertian kekuasaan, artinya
 - a. Politikologi merupakan studi mengenai bentuk-bentuk dan pembagian kekuasaan. Jadi, politik terutama merupakan perjuangan untuk mencapai kekuasaan (Harold Laswell dan Abraham Kaplan, 1950).
 - b. Politik bisa didefinisikan sebagai tujuan yang (ingin) dicapai dengan menggunakan kekuasaan. Tujuan tersebut diwujudkan dengan jalan memberikan bentuk-bentuk tertentu kepada masyarakat, dan selalu dilandasi satu filsafat sosial atau filsafat negara tertentu.
 3. Mengandung pengertian negara, artinya
Pengetahuan politik adalah pengetahuan yang mempelajari keberadaan dan kehidupan negara.
 4. Mengandung pengertian konflik dan kerjasama, artinya
 - a. Ada upaya pembedaan dalam politik, sehingga terjabarkan perbuatan politik dan motif politik yaitu perbedaan kawan dari lawan (Carl Schmit, 1932).
 - b. Politik adalah perbuatan kemasyarakatan yang terarah secara intensional ke usaha mempengaruhi tingkah laku orang lain; dan bisa

bertujuan ke pengadaan peraturan secara mengikat terhadap konflik-konflik mengenai nilai-nilai materiil.

- c. Aktivitas politik yang murni ialah menciptakan, memperkuat, dan mempertahankan bentuk-bentuk kerjasama manusia (Bertrand de Jouvenel, 1955).

5. Mengandung pengertian distribusi

- a. Politik ialah siapa mendapatkan sesuatu, bilamana, dan bagaimana cara mendapatkannya (Harold D.Laswell).
- b. Sistem politik merupakan segenap interaksi yang dipakai untuk membagi dan mendistribusikan nilai-nilai materiil serta immaterial pada saat itu, dan bisa berlangsung di dalam dan untuk masyarakat
Selanjutnya van Dale menerjemahkan kata benda “politik” sebagai :
 - 1) segenap pengurusan pemerintahan yang dipakai oleh suatu pemerintah untuk menguasai dan memerintah negara, negeri, wilayah dan seterusnya.
 - 2) Cara bertindak, garis tingkah laku suatu pemerintahan.
 - 3) Cara penampilan tindakan dan taktik negara.

Kemudian “politik” sebagai kata sifat diterjemahkan van Dale di dalam kamusnya, sebagai berikut : kenegaraan berhubungan dengan pemerintahan, penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam keadaan tertentu terhadap organisasi kehidupan kenegaraan¹⁴.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 20

Dengan beraneka ragamnya pengertian politik itu, maka pengertian politik berkaitan dengan politik *apartheid* di Afrika Selatan adalah pengertian yang mengandung arti kebijakan, karena dimensi kebijakan (*policy*) pemerintah merupakan unsur asasi dari politik. Politik *apartheid* yang terjadi di Afrika Selatan merupakan bentuk kebijakan pemerintah minoritas kulit putih yang digunakan untuk mempertahankan supremasi orang-orang kulit putih dan menjadikannya sebagai suatu sistem politik yang sah dan pantas untuk mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan berdasarkan segregasi ras. Selain untuk mempertahankan supremasi kulit putih, *apartheid* juga menjadi alat untuk mencapai kekuasaan demi mempertahankan eksistensi kulit putih. Teori politik yang menjelaskan makna konsep politik seperti demokrasi, kebebasan, hukum, legitimasi dan hak tidak berlaku di Afrika Selatan karena kehidupan rakyat dibatasi oleh undang-undang yang bersifat diskriminatif dan peraturan rasial yang membatasi kehidupannya dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-undang yang merupakan kerangka bagi *apartheid* dengan jelas memperlihatkan bahwa sistem segregasi tersebut lebih banyak berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk dapat mencapai gagasan-gagasan rasial mereka.

3. *Apartheid*.

Apartheid dalam bahasa *Afrikaans* berarti pemisahan. Istilah *apartheid* sangat sarat dengan kolonialisme karena di dalamnya terdapat aspek penindasan. Penindasan yang dilakukan oleh orang kulit putih terhadap orang-orang kulit berwarna khususnya mayoritas kulit hitam melalui diskriminasi ras. *Apartheid* merupakan pemisahan berdasarkan ras atau diskriminasi kulit putih terhadap

orang atau ras lain karena perbedaan warna kulitnya. Hal ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa dalam segala hal, orang kulit putih lebih unggul/superior dari pada kulit berwarna.

Oleh karena itu, beberapa konsep yang perlu dijelaskan berkaitan dengan istilah *apartheid* (pemisahan berdasarkan ras) yaitu: kolonialisme dan ras/rasisme. Rasisme adalah salah satu persoalan yang erat terkait dalam wacana kolonialisme. Kolonisasi Barat atas dunia Timur menyimpan sebuah *ism* tentang keunggulan bangsa Eropa, sedangkan konsep ras/rasisme perlu dijelaskan karena dalam penerapannya, *apartheid* sangat menekankan perbedaan ras, antara orang-orang kulit putih dan orang-orang kulit berwarna (khususnya mayoritas kulit hitam).

a. Kolonialisme

Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan suatu negara atas negara atau daerah lain dengan maksud memperluas wilayah kekuasaannya. Kolonialisme (dari kata Latin: *Colonia* =pertanian-pemukiman) berarti penaklukan dan penguasaan atas tanah dan harta penduduk asli oleh penduduk pendatang. Dalam membentuk pemukiman baru (oleh pendatang) kerap terjadi hubungan yang kompleks dan traumatik dalam sejarah manusia, antara penduduk lama dan pendatang baru. Terkadang pembentukkan komunitas (koloni) baru ini ditandai oleh usaha membubarkan dan membentuk kembali komunitas-komunitas yang sudah ada dengan melibatkan praktek-praktek perdagangan, penjarahan dan pembunuhan massal, perbudakan dan pemberontakan-pemberontakan¹⁵.

¹⁵ Mudji Sutrisno (ed), *Hermeneutika Pascakolonial Soal Identitas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 9.

Kolonialisme telah muncul dalam kamus politik di Eropa sejajar dengan ekspansi kekuasaan negara-negara Eropa ke seberang lautan. Pelaku kolonialisme adalah negara maupun kelompok ekonomi atau kepercayaan, yang melakukan ekspansi ke daerah-daerah yang sampai saat itu "belum dikenal" dengan sering memakai dukungan "negara-negara induk". Dalam konteks ini, kolonialisme bagi kalangan aktivis sosial demokrat di Eropa pada pertengahan abad ke-19 menyadari bahwa kolonialisme jelas mengisyaratkan aspek penindasan terhadap rakyat jajahan¹⁶. Sejak abad ke-16 hingga abad ke-18 kolonialisme mempunyai ciri yang berbeda. Ciri pertama, negara kolonial bermaksud untuk menyebarkan agama serta kejayaan bangsanya. Namun tujuan selanjutnya adalah mencari dan memonopoli pasar rempah-rempah seperti yang dilakukan oleh bangsa Spanyol dan Portugal. Ciri kedua tampak ketika kolonialisme Spanyol dan Portugal digantikan oleh Inggris, Perancis, dan Belanda. Perkembangan kapitalisme yang pesat di Eropa memaksa kaum kapitalis Inggris, Perancis, dan Belanda untuk mencari sumber kekayaan alam baru di luar Eropa dan mencari daerah pemasaran perdagangannya. Penguasaan kolonial negara-negara keluar Eropa bertujuan terutama membesarkan kekayaan negara (merkantilisme) melalui eksploitasi koloni. Terbukti sangat membawa keuntungan adalah eksploitasi dan perampasan logam-logam mulia di Amerika Latin dan perdagangan segitiga antara Afrika, Inggris dan Amerika yang dikuasai Inggris. Budak-budak Afrika dibeli dengan harga murah dan dijual sebagai tenaga kerja di Amerika.

¹⁶ Andi Achdian. *Tentang Kolonialisme: Multatuli dan Pemikirannya*. Driyarkara. 1982. Volume XXII. No.3.

Oleh Frantz Fanon, kolonialisme banyak diartikan sebagai penonmanusiawian (*dehumanization*) rakyat di daerah koloni. Orang-orang yang dijajah tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi lebih sebagai benda. Warna kulit hitam, cokelat atau kuning menunjukkan bahwa rakyat terjajah itu bukan hanya mereka yang kerjanya dirampas, tetapi juga mereka yang dalam jiwanya diciptakan kompleks inferioritas. Kompleks inferioritas ini ditanamkan dalam kesadaran budaya masyarakat koloni¹⁷. Kelompok-kelompok dengan ciri tertentu, dengan sedikit kekuasaan dan status yang rendah, adalah inferior; sedangkan kelompok-kelompok lainnya, dengan ciri yang lain, yang memiliki kekuasaan lebih besar dan status yang tinggi, dianggap superior.

Dalam perkembangannya, gejala kolonialisme erat kaitannya dengan rasisme. Kolonisasi Barat atas dunia Timur menyimpan sebuah *ism* tentang keunggulan bangsa Eropa. Hal ini juga diuraikan Edward W. Said dalam *Orientalism*, yaitu tentang cara pandang mereka atas Timur. Keyakinan ini terbawa pada saat mereka melihat masyarakat jajahannya sebagai masyarakat yang tak berperadaban (*uncivilized*). Dengan mengadopsi konsep Deleuze dan Guattari tentang deterritorialisasi, Robert J.C. Young menguraikan hubungan antara penjajah dan yang terjajah. Dalam penguasaan penjajah atas masyarakat yang dijajah terjadi apa yang ia sebut sebagai cangkakan atau hibriditas dari dua kebudayaan tersebut. Hal ini lahir dari proses deterritorialisasi dan reteritorialisasi

¹⁷ *Ibid*, hlm. 13.

kolonialisme. Salah satu wacana yang diartikulasi oleh proses deterritorialisasi ini adalah tentang ras¹⁸.

b. Ras/Rasisme.

Ras adalah salah satu konsep penting dalam ilmu antropologi. Ras berasal dari bahasa Arab yang artinya keturunan. Bersama konsep etnisitas (kesukuan), ras merupakan salah satu cara untuk melakukan kategorisasi terhadap sekelompok manusia. Ras berarti kategorisasi manusia berdasarkan perbedaan bentuk fisik, misalnya secara fisik orang Melayu berasal dari kelompok ras berbeda dengan orang keturunan Cina. Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875), antropolog Belanda, menyatakan ras adalah segolongan manusia yang memiliki kesamaan sifat jasmani dan rohani yang diturunkan. Antropolog Grosce mendefinisikan ras sebagai segolongan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena memiliki kesamaan sifat jasmani dan rohani yang diturunkan, sehingga berdasarkan itu dapat dibedakan dari kesatuan yang lain. Haldane mendefinisikan ras sebagai sebuah pengelompokan grup berdasarkan karakteristik fisik dan latar belakang geografis grup tersebut¹⁹. Menurut Horton dan Hunt, ras adalah suatu kelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya selain dalam segi ciri-ciri fisik bawaan, dalam banyak hal juga ditentukan oleh pengertian yang digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian, perbedaan masyarakat atas dasar ras bisa didasarkan atas perbedaan ciri fisik maupun sosial. Para antropologi fisik umumnya membedakan ras berdasarkan lokasi geografis,

¹⁸ *Ibid*, hlm. 123

¹⁹ Abdul Syukur, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar* Jilid 8, PT.Ichtiar Baru van Hoeke, Jakarta, 2005, hlm. 21.

ciri-ciri fisik seperti warna rambut, warna mata, bentuk wajah, bentuk kepala dan prinsip evolusi rasial²⁰.

Rasisme adalah suatu gagasan atau teori yang mengatakan bahwa kaitan kausal antara ciri-ciri jasmaniah yang diturunkan dan ciri-ciri tertentu dalam hal kepribadian, intelek, budaya atau gabungan dari semua itu, menimbulkan superioritas dari ras tertentu terhadap ras yang lain. Teori-teori rasis mengatakan bahwa ras manusia berbeda-beda, mempunyai bakat sosial dan intelektual yang tidak sama. Dari sinilah muncul pandangan superioritas dan inferioritas satu ras terhadap ras yang lain. Pandangan superioritas merasa mempunyai kemampuan memerintah bagi kepentingan setiap orang dan dengan demikian memajukan peradaban. Ras inferior tidak dapat melaksanakannya, namun tidak akan mengakui kerendahannya²¹. Ras dalam kaitannya dengan makna rasisme, merujuk ke kelompok manusia yang ditentukan oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lain, yang berlainan secara kultural berdasarkan ciri-ciri jasmaniah yang tak dapat berubah. Jadi, ras dalam rasisme ditentukan secara sosial, tetapi berdasarkan ciri-ciri fisik.

Di samping rasisme dikenal juga istilah rasialisme. Rasialisme adalah paham yang menyatakan bahwa ras sendiri adalah ras yang paling unggul, jauh melebihi ras-ras yang lain, membela perlakuan istimewa terhadap anggota-anggota ras sendiri seraya mendukung perlakuan semena-mena, eksploitatif terhadap anggota-anggota ras yang lain; bisa diwujudkan dalam sistem

²⁰ Bagong Suyanto, J. Dwi Narwoko (ed), *Sosiologi Teks dan Terapan*, Penada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 195.

²¹ Ubed. S. Abdilah, *Politik Identitas Etnis pergulatan Tanpa Tanda Identitas*, Indonediatara, Magelang, 2002, hlm. 61.

pemerintahan diskriminatif yang menggulirkan kebijakan berbeda-beda atas dasar pembedaan warna kulit yang sangat ketat terhadap kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat²². Secara umum rasialisme juga dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat terutama karena identitas ras. Dalam buku *Hoakiau di Indonesia*, Pramoedya Ananta Toer menulis, rasialisme adalah paham yang menolak sesuatu golongan masyarakat yang berdasarkan ras lain, yang dapat timbul apabila masyarakat atau minoritas yang mempunyai kelainan-kelainan daripada keumuman biologis yang ada pada warga-warga masyarakat itu dan rasialisme dapat timbul karena segolongan kecil atau minoritas itu tidak dapat mempertahankan diri²³.

Rasialisme merupakan praktek diskriminasi terhadap kelompok lain ras. Hal ini didasarkan pada prasangka bahwa ras yang berbeda memiliki ukuran moral, kecerdasan, serta ciri fisik yang berbeda dan kemampuan seseorang pertama kali ditentukan oleh rasnya. Apabila suatu kelompok di dalam masyarakat tertentu ditentukan dalam peristilahan menurut warna kulitnya, tekstur rambutnya, raut mukanya, atau bentuk tubuhnya dan sebagainya maka hal itu dalam peristilahan rasisme disebut ras. Selain itu, rasialisme juga memandang bahwa ras dapat disusun ke dalam sebuah hierarki yang bisa dipertahankan melalui suatu tindakan politik yang kadang berbentuk kekerasan²⁴. Jadi, antara rasisme dan rasialisme terdapat perbedaan. Rasisme berhubungan dengan teori

²² Save. M.Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Jakarta, 2006, hlm. 938.

²³ Pramoedya Ananta Toer, *Hoakiau di Indonesia*, Garba Budaya, Jakarta, 1998, hlm. 50.

²⁴ *Ibid*, hlm. 165.

sedangkan rasialisme berhubungan dengan penerapannya di dalam praktek kehidupan. Rasialisme dipandang sebagai sebuah kebodohan karena tidak mendasarkan (diri) pada satu ilmu apa pun, serta berlawanan dengan norma-norma etis, perikemanusiaan, dan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, orang dari suku bangsa lain sering didiskriminasikan, dihina, ditindas bahkan sampai dibunuh.

Aspek-aspek yang terdapat dalam rasisme adalah prasangka ras (*race prejudice*) dan diskriminasi ras²⁵. Aspek pertama dari rasisme yaitu prasangka ras. Prasangka (*prejudice*) adalah sebuah sikap (biasanya negatif) terhadap anggota kelompok tertentu, semata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Ciri atau sifat dan tingkah laku individual mereka memainkan peran yang kecil, mereka tidak disukai (atau dalam beberapa kasus disukai) hanya karena mereka termasuk dalam kelompok tertentu. Para ahli psikologi berpendapat, kesalahan orang yang punya prasangka, sebagiannya berasal dari kecenderungan berpikir stereotif terhadap suatu kelompok sosial.

Alasan mengapa begitu banyak orang yang membentuk dan memiliki prasangka, karena dengan melakukannya (secara individu) mereka dapat meningkatkan citra diri mereka sendiri. Ketika individu dengan pandangan prasangka memandang rendah sebuah kelompok yang dipandang negatif, hal ini membuat mereka yakin akan harga diri mereka sendiri, untuk merasa superior dengan berbagai cara. Dengan kata lain, pada beberapa orang, prasangka dapat memainkan sebuah peran penting untuk melindungi atau meningkatkan konsep

²⁵ N.Daldjoeni, *Ras-Ras Umat Manusia (Biogeografis, Kulturhistoris, Sosiopolitis)*, Citra Aditya Bandung, 1991, hlm. 84.

diri mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika *self esteem* (harga diri) mereka terancam, individu dengan prasangka akan menyerang kelompok yang tidak mereka sukai. Hal ini membantu untuk meningkatkan atau mengembalikan *self esteem* (harga diri) mereka²⁶. Pendorong munculnya prasangka dalam pergaulan antar ras adalah sugesti, kepercayaan keyakinan dan emulasi (persaingan, perlombaan). Biasanya prasangka ras muncul di negara-negara Barat (Amerika Serikat, Afrika Selatan) yang masyarakat umumnya berkulit putih lalu meremehkan kaum berkulit hitam atau berwarna gelap²⁷.

Prasangka ras dapat dipandang sebagai soko guru dari kebencian diskriminasi ras. Antropolog terkenal A .L . Kroeber setelah meneliti seluk-beluk prasangka ras, menemukan ada enam faktor penyebab munculnya prasangka ras, yaitu : faktor ekonomis, faktor politis, faktor sosio-kultural, faktor psikologis, faktor religius dan faktor biologis.

Faktor Ekonomis. Kebutuhan ekonomis bersama dengan persaingan sengit yang mendampinginya dapat menjadikan jurang kebencian antar kelompok manusia. Hal ini dapat menyangkut tingkat upah dan jaminan serta pelayanan sosial penduduk yang pelaksanaannya dapat berbeda secara mencolok. Jika peraturan yang berlaku merugikan pihak tertentu sehingga terjadi pemerasan secara ekonomis, di situ muncul prasangka ras²⁸.

Faktor Politis. Para diktator modern meningkatkan keangkuhan ras untuk mempertahankan posisinya dan meningkatkannya. Di negara-negara demokrasi

²⁶ Roberta A, Baron, Don Byrne, *Psikologi Sosial*, Erlangga Jakarta, hlm. 213-214.

²⁷ Roberta A, Baron, Don Byrne, *Op cit*, hlm. 85.

²⁸ N. Daldjoeni, *Ras-Ras Umat Manusia (Biogeografis, Kulturhsitoris, Sosiopolitis)*, PT.Citra Aditya, Bandung, 1991, hlm. 220.

juga bisa muncul prasangka ras, terutama di kalangan politisi negara. Contoh di Eropa pada masa lampau adalah munculnya antisemitisme di Jerman tahun 1871.

Faktor Sosio-Kultural. Prasangka ras dapat tumbuh sebagai akibat dari perbedaan budaya antara bangsa-bangsa. Orang-orang Timur misalnya tidak mau dipengaruhi oleh kebiasaan yang berasal dari bangsa Barat, karena takut merusak struktur sosial mereka.

Faktor Psikologis. Dalam mengagungkan superioritas jasmani rohani suatu ras, terdapat unsur-unsur rasional yang tidak dapat dijelaskan secara politik ataupun kultural. Misalnya di Afrika Selatan, saat-saat konflik antar ras mencapai titik kritis yang membahayakan.

Faktor Religius. Perbedaan agama pun sudah melahirkan kebencian antar ras. Meski setiap agama yang bersangkutan menganjurkan saling pengertian, kasih dan toleransi, dalam sejarah terbukti peperangan serta penindasan dapat merajalela. Misalnya di Timur Tengah, perbedaan antar agama dapat menjadi kebencian yang bisa mengakibatkan munculnya korban jiwa, misalnya perang saudara di Libanon, perang Iran-Irak dan seterusnya. Faktor Biologis, juga bisa menimbulkan prasangka ras bila dilihat dari ciri-ciri jasmani seseorang.

Aspek kedua dari rasisme adalah diskriminasi ras. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Istilah diskriminasi ras mencakup segala bentuk perilaku yang membedakan berdasarkan ras. Dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (PSBDR), terminologi diskriminasi rasial diartikan sebagai:

“Segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pilihan berdasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal negara atau bangsa yang memiliki tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan, pada dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan bidang lain dari kehidupan masyarakat” (Bagian I, Pasal I, ayat I)²⁹.

Diskriminasi merujuk pada aksi negatif terhadap kelompok yang menjadi sasaran prasangka. Bentuk yang nampak jelas dalam masyarakat adalah gejala segregasi yakni adanya pemisahan tempat tinggal warga ras tertentu, juga tata pergaulan antar ras di mana berlaku etiket (tata sopan santun) berdasarkan superior atau inferiornya golongan tertentu. Prasangka dan diskriminasi saling menguatkan. Prasangka mewujudkan suatu rasionalisasi bagi diskriminasi, sedangkan diskriminasi acap kali membawakan ancaman serta perilaku. Dengan kata lain, diskriminasi merupakan perwujudan prasangka dalam bentuk tingkah laku dan tingkah laku tersebut membawa ancaman bagi golongan-golongan tertentu yang menjadi sasaran prasangka.

Gejala rasisme dalam perkembangannya bertalian erat dengan gejala kolonialisme dan imperialisme. Hal ini dapat dibuktikan ketika bangsa-bangsa Eropa mulai menaklukkan bangsa-bangsa di benua lain. Batas-batas antar wilayah jajahan dibuat dan dipandang sebagai wilayah kekuasaan aristokrat yang unggul. Kemudian pada abad ke-16 sampai awal abad ke-19, kolonialisme bertumbuh di mana merkantilisme berubah menjadi imperialisme. Bangsa-bangsa berkulit putih sambil menaklukkan bangsa-bangsa non putih lambat laun menjadi sadar akan kemenangan yang diperoleh ras yang satu terhadap ras yang lain. Meski

²⁹ Dicky Lopulan, *Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 1999, hlm. 9.

berdasarkan pandangan agama Kristen semua jenis manusia di hadapan Tuhan sama, tetapi dalam praktek kehidupan ras-ras yang berkulit hitam dipandang rendah dan remeh sedangkan ras-ras kulit putih dianggap memiliki keunggulan. Bangsa yang tak putih, secara rasial lebih rendah posisinya dalam peradaban, jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa penghuni benua Eropa.

Darwinisme sosial³⁰ abad ke-19 meletakkan landasan bagi apa yang disebut “rasisme ideologis”. Logikanya adalah sebagai berikut : alam memberikan hadiah kepada kelompok-kelompok yang memenangkan perjuangan untuk mempertahankan keberadaannya; kelompok kuat, sebagai pemenang, mendapatkan hak untuk menguasai dan, dengan demikian, menentukan nasib kelompok yang kalah, yaitu kelompok yang lebih lemah. Kelompok yang kalah mengakui kelemahan dan inferioritas mereka. Karena ideologi ini muncul bersamaan dengan bangkitnya imperialisme dan kolonialisme Eropa di beberapa benua, dan menegaskan peristiwa-peristiwa ini, dan karena bangsa-bangsa dan ras-ras yang dijajah adalah bangsa-bangsa Afrika, Asia, dan penduduk Asli Amerika, maka hubungan erat antara ras, warna kulit dan gagasan-gagasan tentang superioritas atau inferioritas dianggap oleh bangsa-bangsa Eropa dan Amerika sudah mendapatkan pengakuan. Karena kekuatan politik, ekonomi dan budaya bangsa-bangsa Eropa semakin dalam tertanam di wilayah “dunia kulit

³⁰ Teori Darwin yang diterapkan pada masalah sosial. Intinya; pandangan bahwa anggota-anggota masyarakat saling berjuang untuk tetap hidup secara egois, tanpa belas kasihan, kompetitif, ambisius, manipulatif, terencana, dengan menggunakan intelegensi, kekuatan, kekayaan dan kekuasaan. Dalam pergulatan yang bertindak sebagai proses seleksi alam ini, golongan kuatlah yang menang, sementara golongan lemah tersingkir. Paham ini mengajak individu, kelompok sosial, etnis dan agama serta negara untuk berkompetisi satu sama lain, hal ini memperkuat munculnya pemikiran-pemikiran kapitalisme, rasisme dan nasionalisme yang telah berkembang sebelumnya, Suparman, Sobirin Malin, *Ide-Ide Besar Sejarah Intelektual Amerika*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 41.

berwarna”, dilakukan upaya lain untuk mengesahkan ketidakadilan rasial yang kemudian disebut “rasisme ilmiah”. Rasisme ini menggunakan “cara-cara ilmiah” untuk memantapkan kepercayaan akan adanya superioritas rasial bangsa Eropa dan Amerika. Cara pertama adalah dengan penggunaan tes IQ (*intelligence quotient*) “obyektif” yang hasilnya digunakan untuk menegaskan posisi bangsa-bangsa Eropa yang lebih tinggi daripada posisi ras-ras lain dalam sebuah hirarki rasial. Hampir bersamaan dengan digunakannya “tes ilmiah” itu juga digunakan ukuran otak untuk membuktikan inferioritas dan superioritas. Pierre van Den Berghe (1964) menyatakan bahwa meskipun inferioritas atau superioritas sering dibicarakan, namun beberapa kelompok mendominasi kelompok lain karena hanya dengan melakukan hal itulah mereka bisa menegaskan dan melaksanakan ketidakadilan. Namun dapat dikatakan bahwa ketidakadilan itu memiliki motif yang terselubung yang bahkan lebih penting daripada gagasan tentang rasisme itu, yaitu untuk mengisolasi, menghukum, mengasingkan, dan mengusir kelompok paria (sampah masyarakat; orang yang memiliki kedudukan rendah dalam masyarakat) itu keluar dari kehidupan normal dan dari wacana sosial, politik, ekonomi dan budaya sehingga dalam kenyataannya kelompok paria itu akan dibuat “inferior”³¹.

Dengan demikian, berkembangnya imperialisme pada abad ke-19 menunjukkan kecenderungan bahwa ras-ras yang lemah haruslah punah untuk memberi tempat bagi ras-ras yang kuat. Yang menarik dan penting untuk disimak pada waktu itu adalah bahwa ras-ras yang tergolong inferior dipandang sebagai

³¹ Adam Kuper, Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* edisi kedua (terjemahan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 891-892.

ras proletariat, yang seakan-akan memang ditakdirkan untuk ditindas saja. Untuk itu diterapkan dasar-dasar yang tidak ilmiah, dengan tujuan membenarkan terjajahnya ras lemah oleh yang kuat. Hubungan antara ras yang satu dengan yang lain dipandang sekadar berdasarkan faktor-faktor sosial dan ekonomi belaka, sedangkan gejala ras tidak perlu dihubungkan dengan realitas yang ada. Namun pada umumnya orang masih juga berpendapat bahwa perbedaan antara ras itulah yang menjadi penyebab adanya perbedaan sosial dan ekonomi, dan justru perbedaan ras tersebut telah dipakai sebagai argumen untuk membenarkan segala macam aksi penindasan secara politik

Politik *apartheid* yang diterapkan di Afrika Selatan oleh penguasa negeri itu adalah contoh rasialisme. Oleh Teun A. van Dijk, perlakuan orang kulit hitam sebagai kelompok inferior dengan terang-terangan, kasar, dan melembaga dimasukkan dalam kategori rasisme lama. Rasisme lama dilegitimasi oleh ideologi rasis yang mengklaim keunggulan biologis dan “alamiah” orang kulit putih³². Manifestasi rasisme lama yang khas dapat dilihat pada pemberlakuan

³² Charles Linnaeus, biolog Swedia bisa dibilang sebagai pembuka kebekuan pertama akan variasi manusia lewat empat ras yang dicantulkannya dalam *General System Nature* (1740) edisi kedua, yakni orang Eropa Putih, Amerika Merah, Asia Kuning, dan Afrika Hitam. Dalam edisi ke-10 Linnaeus mencantumkan karakter dari masing-masing ras itu: Orang Eropa “Putih”: lembut dan kreatif, Amerika “Merah”: keras kepala, Asia “Kuning”: melankolis dan tamak, Afrika “Hitam”: malas dan sembrono. Perbedaan warna semakin tajam setelah Fisikawan Jamaica Edward Long, kerap dijuluki sebagai Bapak rasialisme biologis, pada tahun 1774 menyatakan “Negro” lebih rendah tingkatannya dalam urutan manusia, bahkan mungkin “species yang berbeda dari satu genus”. Pandangan-pandangan itu semakin melegitimasi pemaknaan simbol yang berlaku dalam masyarakat Inggris yang mengartikan warna hitam dalam konotasi negatif dan punya ikatan emosional. Orang yang mengenakan warna itu pun akan mendapat respon yang negatif. Sebaliknya, warna putih sangatlah bagus. Padahal, di masa sebelumnya perbedaan warna kulit dipahami sebagai akibat dari perbedaan iklim tempat kelompok manusia berdiam. Terpaan sinar matahari yang sangat kuat membuat kulit orang Afrika lebih gelap dan rambutnya menjadi keriting. Sedangkan kelompok lain yang berada di wilayah lebih utara berkulit lebih terang dan pucat karena sedikitnya sinar matahari. Data-data diambil dari tulisan anggota Dewan Pendidikan Toronto, Kanada, Tim McCaskell (1994) berjudul *A History of Race/ism* dengan alamat situs: <www.aqualopp.web.net/whatis.htm>.

sistem *apartheid* di Afrika Selatan. Masyarakat Afrika Selatan secara garis besar dibagi menjadi kelompok kulit hitam dan kulit putih. Pembagian tersebut semata-mata hanya karena perbedaan ras atau warna kulit. Minoritas kulit putih di Afrika Selatan menganggap bahwa orang-orang kulit putih lebih unggul, sedangkan orang kulit berwarna (khususnya kulit hitam) adalah ras yang bernilai sangat rendah. Oleh karena itu, kelompok kulit hitam di Afrika Selatan mengalami diskriminasi di berbagai bidang kehidupan sosial, agama, pendidikan, ekonomi dan politik dengan tujuan menghalangi kemajuan bagi kulit hitam di segala bidang, sehingga segala pintu ke arah kemajuan ditutup bagi mereka.

G. METODE DAN PENDEKATAN

1. Metode

Skripsi yang berjudul “Politik *Apartheid* di Afrika Selatan Tahun 1948-1990”, menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji, menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau³³. Metode sejarah juga menekankan usaha mensistematiskan atau mengkategorikan fakta-fakta demikian rupa sehingga bisa dicapai suatu penghubungan fakta-fakta yang secara instrinsik memberikan arti bagi keseluruhan peristiwa masa lampau³⁴. Dengan metode sejarah ini penulis berusaha untuk menguji serta menganalisis atau merekonstruksi sebanyak-banyaknya rekaman masa lampau secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang ada.

³³ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (terjemahan Nugroho Notosusanto), UI Press Jakarta, hlm. 32.

³⁴ IG Widja, *Pengantar Ilmu Sejarah dalam Persepektif Pendidikan*, Satya Wacana, Semarang, hlm. 3.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan empat tahap untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah yaitu : heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (penulisan sejarah)³⁵. Keempat tahap tersebut adalah sebagai berikut :

a. Heuristik (pengumpulan sumber).

Heuristik berasal dari bahasa Yunani “*heuriskein*” yang berarti mencari atau menemukan (dalam tahap ini berarti menemukan jejak-jejak sejarah)³⁶. Heuristik atau pengumpulan sumber, diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang atau saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri atau dengan panca indra yang lain atau alat mekanik yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Sumber sekunder adalah kesaksian dari kesaksian orang lain atau kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.

Sumber primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, dokumen, di mana buku tersebut ditulis oleh orang yang menyaksikan peristiwa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Contoh sumber primer yang digunakan yaitu buku-buku karya Nelson Mandela misalnya, *Langkah Menuju Kebebasan* karya Nelson Mandela (terjemahan) penerbit yayasan Obor Jakarta, *Perjalanan Panjang Menuju Kebebasan* karya Nelson Mandela (terjemahan) penerbit Bina Rupa Aksara Jakarta. Sumber sekunder misalnya buku-buku pendukung yang berkaitan dengan pengetahuan tentang

³⁵ *Ibid*, hlm. 35.

³⁶ *Ibid*, hlm. 19.

Afrika, khususnya Afrika Selatan. Misalnya *Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Modern* jilid I dan jilid II karya Darsiti Soeratman tahun 1965 penerbit Vita Yogyakarta, *Afrika Dalam Pergolakan 2* karya Dipoyudo Kirdi tahun 1966 penerbit yayasan proklamasi *centre for stratregic and international studies* Jakarta, dan beberapa buku lain yang berkaitan dengan judul. Sumber-sumber ini diperoleh dari perpustakaan yang ada yaitu Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Perpustakaan Muhammad Hatta, Perpustakaan Pusat Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Daerah Yogyakarta. Selain dari perpustakaan juga terdapat sumber dari internet dan koran.

b. Kritik Sumber

Apabila semua sumber yang diperlukan sudah terkumpul baik sumber primer maupun sumber sekunder, maka dilakukan kritik terhadap sumber yang diambil. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat otensitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas sehingga terhindar dari kepalsuan atau ketidakadilan³⁷. Secara singkat yang dimaksudkan dengan kritik sumber adalah usaha untuk menilai, menguji serta menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan sumber yang autentik (asli) serta benar-benar mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang ingin disusun³⁸. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah kritik sumber yang digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan kritik intern adalah kritik sumber yang digunakan untuk meneliti kebenaran isi dokumen atau tulisan tersebut. Kritik intern harus bisa

³⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Benteng Budaya Yogyakarta, 2001, hlm. 99.

³⁸ *Ibid*, hlm. 21.

membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber itu memang dapat dipercaya. Untuk itu yang perlu dilakukan pertama-tama ialah mengadakan penilaian intrinsik terhadap sumber untuk menentukan sifat dari informasi yang diberikannya. Ini hakekatnya menyangkut sorotan terhadap posisi dari pembuat kesaksian tersebut. Hal ini antara lain dicapai dengan mempersiapkan apakah pembuat kesaksian mampu memberikan kesaksian yang menyangkut misalnya, kehadirannya pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa, menyangkut derajat dan keahliannya dalam hubungan peristiwa tersebut dan juga menyangkut kebenaran kesaksian yang diberikan³⁹.

Contoh kritik sumber khususnya kritik intern yang digunakan dalam membahas skripsi yang berjudul Politik *Apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948-1990 adalah buku karya Nelson Mandela dengan judul *Langkah Menuju Kebebasan*, dan *Surat-surat dari bawah Tanah*, 1993, Jakarta, Yayasan Obor. Sebagai pembanding, penulis juga melakukan kritik intern terhadap buku-buku karya Darsiti Soeratman (*Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Modern* Jilid I dan Jilid II) dan buku karya Dipoyudo Kirdi (*Afrika Dalam Pergolakan 2*). Beberapa buku tersebut, baik karya Nelson Mandela maupun karya Darsiti Soeratman dan Dipoyudo Kirdi terdapat kesamaan dalam hal data-data dan informasi tentang politik *apartheid*. Perbedaannya adalah, data atau informasi yang lebih lengkap terdapat dalam buku karya Nelson Mandela. Informasi tersebut menurut penulis lebih *credible*, karena buku-buku karya Nelson Mandela ditulis berdasarkan pengalamannya selama mengalami penindasan *apartheid* di Afrika Selatan.

³⁹ *Ibid*, hlm. 22.

c. Analisis Sumber (interpretasi)

Interpretasi adalah menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya, kemudian menganalisa sumber yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. Menurut Widja, dalam melakukan interpretasi fakta-fakta yang telah diwujudkan dihubung-hubungkan dan dikait-kaitkan satu sama lain demikian rupa sehingga antara fakta satu dengan fakta lainnya kelihatan sebagai suatu rangkaian yang masuk akal dalam arti menunjukkan kesesuaian antara satu sama lain. Dengan kata lain, bahwa rangkaian fakta-fakta itu harus menunjukkan diri sebagai suatu rangkaian “bermakna” dari kehidupan masa lampau suatu masyarakat atau bangsa⁴⁰. Dalam tahap ini dituntut untuk mencermati dan mengungkapkan data-data yang diperoleh. Oleh sebab itu di dalam interpretasi perlu dilakukan analisis sumber untuk mengurangi unsur subyektifitas dalam kajian sejarah, sebab unsur subyektifitas dalam suatu penulisan sejarah selalu ada yang dipengaruhi oleh jiwa jaman, kebudayaan, pendidikan, lingkungan sosial dan agama yang melingkupi penulisnya⁴¹. Untuk itu analisis sumber dilakukan dengan menjelaskan data-data yang ada atau menguraikan informasi dan mengkaitkannya antara satu sumber dengan sumber yang lainnya. Setelah analisis sumber dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah sintesis sumber yang dilakukan dengan membandingkan dan memadukan data-data yang ada.

Contoh analisis sumber berdasarkan judul skripsi “Politik *Apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948-1990” dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Setelah memenangkan pemilihan umum pada tahun 1948 Pemerintahan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 23.

⁴¹ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu sosial Dalam Metodologi Sejarah*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1992, hlm. 72.

Nasionalis yang didominasi oleh orang-orang *Afrikaner* secara resmi menerapkan politik *apartheid* di Afrika Selatan. Pada tahun tersebut ditemukan data tentang undang-undang segregasi rasial yang memisahkan kulit putih dari kulit hitam serta kulit berwarna yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan data tersebut ditemukan fakta bahwa telah terjadi diskriminasi rasial melalui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah nasionalis, yang dalam bahasa orang *Afrikaner* disebut *apartheid*.

d. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah. Pada tahap ini penulisan atau penyusunan sejarah memerlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk menjaga standar mutu ceritera sejarah, misalnya prinsip serialisasi (cara-cara membuat urutan peristiwa) yang mana memerlukan prinsip-prinsip seperti prinsip kronologi (urut-urutan waktu), prinsip kausasi (hubungan dengan sebab akibat) dan bahkan juga kemampuan imajinasi (kemampuan untuk menghubungkan-hubungkan peristiwa-peristiwa yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian yang masuk akal dengan bantuan pengalaman. Jadi, membuat semacam analogi antara peristiwa di waktu yang lampau dengan tindakan yang telah kita saksikan dengan mata kepala sendiri di waktu sekarang, terutama bagi peristiwa-peristiwa yang sulit dicari dasar kronologi dan kausasi dalam penghubungannya⁴².

2. Pendekatan

Untuk menganalisa lebih lanjut diperlukan berbagai pendekatan ilmu dan konsep-konsep ilmu sosial lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan

⁴² *Ibid*, hlm. 25.

multidisipliner. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan yang menggunakan dua atau lebih disiplin ilmu yang saling berjalanan berdasarkan interaksional masing-masing. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik dan pendekatan sosiologis.

Pendekatan pertama yaitu pendekatan politik. Pendekatan politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat⁴³. Pendekatan politik digunakan untuk mengetahui keadaan politik di Afrika Selatan setelah pemerintah nasionalis *Afrikaner* melaksanakan kebijakan *apartheid*. *Apartheid* secara resmi dilaksanakan di Afrika Selatan ketika pemerintah nasionalis *Afrikaner* meraih kekuasaan setelah menang dalam pemilihan umum yang hanya diikuti oleh orang kulit putih pada tahun 1948.

Pendekatan kedua adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang melihat semua gejala dari aspek sosial yang mencakup hubungan sosial, interaksi, jaringan hubungan sosial yang semuanya mencakup dimensi sosial dan kelakuan manusia. Segala macam perwujudan tindakan yang menyangkut relasi antar individu diungkapkan dengan tepat dengan melihat dimensi sosial perikelakuan orang seperti yang terwujud sebagai gejala⁴⁴. Pendekatan sosiologis dipilih untuk memberikan gambaran kehidupan sosial masyarakat di Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan negara yang penduduknya multirasial. Lebih dari tujuh puluh persen penduduk adalah orang

⁴³ Deliar Noer, *Pengantar Kepemimpinan Politik*, Dwipa.Medan, 1965, hlm. 6.

⁴⁴ *Ibid*, hlm, 87.

Afrika; sekitar sembilan belas persen adalah penduduk kulit putih; sepuluh persen adalah penduduk kulit berwarna (berdarah campuran Afrika dan bangsa lain), dan sekitar tiga persen adalah kelompok masyarakat Asia. Di bawah politik *apartheid*, penduduk Afrika Selatan “dikotak-kotakkan” dalam kelompok-kelompok manusia yang berbeda-beda berdasarkan warna kulit mereka dan berdasarkan kriteria itu akan menjadi warga negara kelas satu, dua, tiga atau empat (Kulit Putih, Berwarna, Asia, dan Hitam).

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi yang berjudul “Politik *Apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948-1990” mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I. Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode dan pendekatan, sistematika penulisan.
- Bab II Berupa uraian tentang latar belakang munculnya politik *apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948-1990. Ada tiga hal yang melatarbelakangi munculnya politik *apartheid* di Afrika Selatan yaitu, latar belakang historis, latar belakang religius dan latar belakang ekonomis.
- Bab III Berupa uraian mengenai pelaksanaan politik *apartheid* di Afrika Selatan. Pelaksanaan politik *apartheid* (pemisahan berdasarkan ras) diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, politik, pendidikan dan ekonomi.

Bab IV Berupa uraian tentang reaksi terhadap pelaksanaan politik *apartheid* di Afrika selatan yaitu reaksi internal dan reaksi eksternal. Reaksi internal berasal dari penduduk Afrika selatan sedangkan reaksi eksternal terutama berasal dari negara-negara di luar Afrika Selatan yang tergabung dalam OAU (*the Organization of African Unity*/ Organisasi Pesatuan Afrika) dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Bab V Berupa uraian tentang situasi di Afrika Selatan setelah masa *apartheid*.

Bab VI Kesimpulan yang isinya tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah diuraikan dalam bab II, III, IV dan V.

BAB II

LATAR BELAKANG

MUNCULNYA POLITIK *APARTHEID* DI AFRIKA SELATAN

TAHUN 1948-1990

A. Keadaan Demografi di Afrika Selatan tahun 1948-1980

Demografi adalah Ilmu tentang susunan, jumlah dan perkembangan penduduk, ilmu yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik : /ilmu kependudukan. Keadaan demografi yang akan dibahas, terutama tentang keadaan penduduk di Afrika Selatan. Selain keadaan demografi, juga akan dibahas keadaan ekonomi.

1. Penduduk.

Afrika Selatan mempunyai penduduk yang bhineka. Bhineka, karena penduduknya multiras dan multietnik. Di negara ini terdapat empat kelompok ras utama yaitu: 68% penduduk adalah orang Afrika; sekitar 19% adalah penduduk kulit putih; 10% adalah penduduk kulit berwarna (berdarah campuran Afrika dan bangsa lain), dan sekitar 3% adalah kelompok masyarakat Asia. Adapun etnik pada kulit hitam antara lain terdiri dari etnik Zulu, Xhosa, Sotho Utara, Tswana, Sotho Selatan, Tsonga, Venda, dan Ndebele. Penduduk Afrika Selatan menurut sensus tahun 1970 terdiri dari 15.900.000 jiwa (perkiraan terakhir sensus tahun 1980 terdiri dari 31.600.000) dibagi dalam 3.000.000 kulit putih, 10.900.000

Bantu (orang kulit hitam), 1.500.000 *coloured* (kulit berwarna) dan sekitar 800.000 orang Asia (India dan Pakistan)⁴⁵.

Berikut ini uraian atau penjelasan tentang keempat kelompok masyarakat tersebut :

a. Kelompok Masyarakat Afrika

Kelompok masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan menggunakan bahasa yang terkait dengan bahasa *Bantu*. Sekitar 50% dapat membaca dan menulis dalam bahasa Inggris dan bahasa *Afrikaans*, yaitu dua bahasa resmi Afrika Selatan. Kelompok masyarakat kulit hitam terbesar adalah Nguni, yang mencakup masyarakat Zulu (masyarakat kulit hitam terbesar di Afrika Selatan), Xhosa dan Swazi. Berbagai penemuan arkeologi dan catatan tertulis mengungkapkan bahwa kelompok masyarakat Nguni telah menghuni Afrika Selatan sejak tahun 1500, jauh sebelum kedatangan pemukim kulit putih. Kelompok masyarakat Nguni bermukim di sepanjang pesisir timur di antara Drakensberg dan Samudra Hindia sampai sekarang. Kelompok masyarakat kulit hitam terbesar kedua adalah Sotho, mencakup masyarakat Sotho Utara, Sotho Selatan, Ndebele Selatan, Ndebele Utara, dan Tswana. Kelompok Nguni dan kelompok Sotho mencakup lebih dari 90% seluruh penduduk kulit hitam Afrika Selatan. Kelompok kulit hitam yang lebih kecil adalah Venda dan Shangana-Tsonga⁴⁶.

b. Kelompok Masyarakat Eropa

Pada kenyataannya, di Afrika Selatan terdapat dua kelompok masyarakat kulit putih atau Eropa yaitu *Afrikaner* dan Inggris. Kelompok *Afrikaner* adalah

⁴⁵ N.N, "Masalah-Masalah Internasional", *Analisa*, No.1, 1974, Jakarta, hlm. 19.

⁴⁶ Grolier International, *Negara Bangsa Asia dan Afrika*, Jakarta, Widyadara, 1988, hlm. 163.

keturunan pemukim asli yang datang bersama *Dutch East India Company* pada tahun 1652. Kemudian disusul oleh kaum Protestan Jerman dan kaum Huguenot Perancis yang melarikan diri dari penyiksaan keagamaan di Eropa. Kelompok Inggris adalah keturunan para pemukim yang datang pada awal abad ke-19 setelah Inggris mengambil alih kekuasaan atas Tanjung.

Sebagian besar warga *Afrikaner* lazimnya menjadi petani (karena itulah mereka disebut juga orang *Boer*, *Boer* artinya petani) yang hidup terpencil di kawasan Veld tinggi. Mereka adalah kelompok masyarakat yang tegar, cinta kebebasan, yang bekerja berjam-jam untuk mencari nafkah. Kelompok *Afrikaner* lambat laun semakin menutup diri dan membiarkan diri mereka tertinggal dari dunia sekitarnya. Ketika kondisi sosial mengalami perubahan, mereka belum siap untuk ikut berubah. Gereja Reformasi Belanda di Afrika Selatan, yang dianut oleh kebanyakan warga *Afrikaner*, percaya kepada doktrin keunggulan ras. Mereka memandang kelompok Afrika sebagai anak cucu Ham yang telah dikutuk dan dijadikan orang-orang barbar yang dengan demikian, lebih rendah daripada golongan Kristen kulit putih. Meskipun sebagian besar orang *Afrikaner* ini tinggal di berbagai kota besar dan kota kecil, mereka tetap mempertahankan banyak sikap tradisional mereka. Kebanyakan di antara mereka menjadi anggota Partai Nasional yang mendukung perluasan politik *apartheid*.

Kelompok *Afrikaner* menggunakan bahasa yang khas, yaitu bahasa *Afrikaner*, yang dikembangkan dari bahasa Belanda abad ke-17 yang digunakan oleh para pemukim pertama. Sekarang banyak kata yang berasal dari bahasa Jerman, Prancis, dan Afrika yang dimasukkan ke dalam bahasa tersebut, dan

bahasa itu tidak lagi merupakan suatu logat Belanda, melainkan menjadi suatu bahasa yang berdiri sendiri⁴⁷.

Inggris mulai masuk ke Afrika Selatan setelah wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Inggris pada tahun 1814. Akan tetapi, baru pada akhir abad ke-19, yaitu dengan ditemukannya intan dan berlian, sejumlah besar orang Inggris tiba di sana. Sejak saat itu kebanyakan di antara mereka tinggal di kota besar, bekerja di pertambangan, industri dan perdagangan. Banyak di antara orang Inggris itu adalah penganut Gereja Anglikan, berbagai kelompok Protestan, dan Gereja Katolik Roma. Terdapat pula kelompok masyarakat Yahudi yang cukup besar. Penduduk yang berbahasa Inggris umumnya menjadi partai anggota oposisi yang lebih liberal. Ada sekolah khusus dengan bahasa pengantar bahasa *Afrikaan* dan ada pula yang berbahasa pengantar bahasa Inggris, koran pun demikian pula, dan pada umumnya juga dalam hal kehidupan budaya.

c. Kelompok Masyarakat Berwarna

Kelompok masyarakat kulit berwarna, atau penduduk dengan darah campuran, kebanyakan tinggal di kawasan Tanjung (sekarang disebut Cape Town). Mereka adalah keturunan budak Afrika dan Melayu; atau orang Bushman, Hottentot, dan Eropa. Kelompok Melayu merupakan kelompok tersendiri yang terpenting dalam kelompok masyarakat kulit berwarna. Kebanyakan di antara mereka beragama Islam dan keturunan budak yang semula dimasukkan ke dalam

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 164.

negara itu dari jajahan Belanda di Malaysia. Mayoritas kelompok masyarakat kulit berwarna ini berbahasa *Afrikaan* dan menganut Gereja Reformasi Belanda⁴⁸.

d. Kelompok Masyarakat Asia

Kelompok masyarakat Asia merupakan golongan minoritas kecil Asia di Afrika Selatan, sebagian besar tinggal di propinsi Natal. Kelompok masyarakat Asia ini hampir seluruhnya terdiri dari orang India, meskipun ada juga sekelompok kecil orang Cina.

2. Ekonomi.

Afrika Selatan merupakan negara paling kaya dan paling maju di benua Afrika. Penemuan berlian pada akhir abad ke-19 telah mengubah sejarah Afrika Selatan, dari negara pertanian yang miskin menjadi negara yang kaya akan aneka macam barang tambang. Pertambangan merupakan landasan ekonomi Afrika Selatan. Bidang inilah yang mendorong Afrika Selatan menjadi negara industri raksasa di Afrika. Sumber alam terbesar negeri ini adalah kandungan emas dan berliannya yang sangat besar. Selain itu juga ditemukan kromit, batubara, tembaga, biji besi, magnesium, platina, perak, dan uranium dalam jumlah yang besar pula.

Untuk mengolah sumber-sumber pertambangan telah didirikan industri-industri ringan, sedang dan berat. Afrika Selatan adalah satu-satunya negara di benua Afrika yang dapat memproduksi dan mengekspor barang-barang hasil industri. *Gross Domestic Product* antara tahun 1960 dan 1970 meningkat sampai dua kali, menunjukkan pertumbuhan yang meningkat mencapai 9% per tahun.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 165.

Gross Domestic Product tahun 1969 mencapai 11,635 R atau 503 R per capita. Angka-angka ini jauh melampaui angka-angka dari negara-negara Afrika lainnya. Namun, distribusi pendapatan tidak seimbang bila diadakan perbandingan antara penghasilan orang kulit putih dan penghasilan orang kulit hitam. Misalnya, dalam bidang pertambangan gaji seorang buruh kulit putih adalah enam belas kali dari gaji seorang buruh kulit hitam, atau dalam industri ratio mencapai enam kali lebih besar. Perkembangan industri dan pertambangan di Afrika Selatan membawa kenaikan dalam kebutuhan akan buruh. Untuk mengembangkan tambang emas, penduduk Afrika telah direkrut menjadi buruh dan dilatih untuk menjalankan bor, mendorong gerobak tambang dan mengerjakan ribuan pekerjaan sampingan yang diperlukan dalam perusahaan yang mempekerjakan lebih dari empat ratus ribu orang. Sekitar lima puluh ribu orang bukan Afrika, yang kebanyakan orang *Afrikaner*, melakukan berbagai pekerjaan ahli atau pekerjaan yang lebih terampil⁴⁹. Hal ini merupakan bagian dari politik pemerintah untuk memisahkan berbagai ras dalam setiap aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang ekonomi. Orang Afrika boleh bekerja di perusahaan milik orang kulit putih, tetapi yang menjadi pengawas atau pekerja terampilnya harus orang Eropa. Situasi perekonomian di Afrika Selatan, seluruhnya dikuasai oleh minoritas kulit putih mulai dari situasi ekonomi pertanian pada abad ke-17 sampai dengan penemuan berlian dan emas pada pertengahan abad ke-19 yang kemudian mendorong Afrika Selatan menjadi negara industri yang kuat dan kaya akan bahan tambang.

⁴⁹ N.N, "Masalah-Masalah Internasional", *Analisa*, No.1, 1974, Jakarta, hlm. 20.

B. Latar Belakang Munculnya Politik *Apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948-1990.

Afrika Selatan dikenal di seluruh dunia sebagai sebuah negeri yang mempraktekkan bentuk-bentuk diskriminasi berdasarkan ras atau warna kulit yang dikenal dengan *apartheid*. *Apartheid* adalah sebuah kata dalam bahasa *Afrikaans* yang berarti “pemisahan”, merupakan suatu sistem sosial yang diterapkan oleh pemerintahan minoritas kulit putih di negara Afrika Selatan yang didasarkan atas diskriminasi rasial terhadap rakyat bukan kulit putih. Menurut Ian Brownlie, yang dimaksudkan *apartheid* adalah sebagai berikut :

“Menurut *apartheid*, status, hak-hak, kewajiban, kesempatan dan beban penduduk ditentukan dan diberikan dengan sewenang-wenang atas dasar ras, warna kulit dan suku bangsa, dalam suatu pola yang mengabaikan kebutuhan dan kemampuan kelompok dan individu, dan menomorduakan kepentingan mayoritas penduduk demi kepentingan minoritas penduduk.....” demikianlah *apartheid* dalam praktek, yang sebenarnya dan benar-benar terjadi dalam kehidupan rakyat di Wilayah tersebut.....(memorial hlm. 108)⁵⁰.

Sedangkan oleh sejarawan Kirdi Dipoyudo dikatakan :

Politik *apartheid* adalah politik pemisahan kelompok-kelompok penduduk berdasarkan warna kulit. Dalam teori, politik *apartheid* berusaha memelihara *identitas rasial golongan kulit putih*. Jika dilaksanakan secara konsekuen, hal itu akan menuntut suatu wilayah terpisah bagi golongan warna kulit masing-masing. Dalam praktek, politik *apartheid* dilaksanakan dengan Undang-Undang yang memisahkan golongan-golongan rasial dalam aspek kehidupan sosial ekonomi, segala sesuatu terpisah, perumahan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan, perkawinan dan sebagainya⁵¹.

Dalam masa *apartheid* tersebut mayoritas kulit hitam dipisahkan dan dianggap tidak memiliki kesetaraan hak ekonomi dan hak politik dengan

⁵⁰ Ian Brownlie, *Dokumen-Dokumen Mengenai Hak Asasi Manusia*, UI Press, Jakarta, 1993, hlm. 586.

⁵¹ Emerita Wagiyah, *Sekilas Tentang Politik Apartheid di Afrika Selatan*, 1995, Arena Almamater Volume X-35

minoritas penduduk kulit putih. *Apartheid* merupakan sistem hukum dan ukuran yang dirancang untuk menindas hak orang kulit hitam⁵². dan menjunjung keunggulan orang-orang kulit putih⁵³ baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat⁵⁴.

Melalui undang-undang yang merupakan kerangka *apartheid*, setiap orang dengan hukum telah dicap sejak lahir dan berdasarkan kriteria itu akan menjadi warga negara kelas satu, dua, tiga atau empat (Kulit Putih, Berwarna, Asia dan Hitam). Dalam praktek, *apartheid* dimaksudkan sebagai suatu sistem pemisahan, penindasan, dan eksploitasi yang terlembaga di mana kebebasan bergerak dan hak-hak politik, sosial dan ekonomi, orang-orang yang bukan kulit putih dibatasi dengan tegas dan ketat. Pemisahan itu dilaksanakan dengan cara membagi-bagi negara Afrika Selatan menjadi kawasan putih (Eropa) dan daerah pemukiman Afrika, dan masih ditambah lagi dengan membagi-bagi orang yang tinggal di daerah putih ke dalam apa yang dinamakan “wilayah kelompok”. Ada sembilan daerah pemukiman yang dinamakan “bantustan”, yang khusus disediakan untuk orang kulit hitam Afrika saja, kendati orang Afrika jauh lebih banyak jumlahnya dari orang kulit putih.

⁵² Kulit Hitam : Di Afrika Selatan istilah ini digunakan untuk menyebut semua orang yang berkulit gelap. Tahun-tahun belakangan ini, banyak orang Asia dan “kulit berwarna” di Afrika Selatan yang menyebut dirinya “kulit hitam” untuk menunjukkan solidaritas di antara kelompok-kelompok tertindas. Pada tahun 1987, dari 29 juta penduduk, ada 20 juta penduduk yang berkulit hitam.

⁵³ Kulit Putih : Istilah yang digunakan untuk menyebut setiap penduduk keturunan Eropa yang berkulit coklat-pucat di Afrika Selatan. Pada tahun 1987, dari jumlah penduduk keseluruhan yang diperkirakan berjumlah 29 juta orang, 4,9 juta di antaranya berkulit putih.

⁵⁴ Lihat tabel perlakuan disproporsional terhadap rakyat Afrika Selatan era *apartheid* tahun 1987 Lampiran II, hlm. 174. Kebencian orang kulit putih terhadap orang kulit hitam juga ditunjukkan melalui pernyataan rasis seperti yang terdapat lampiran VII, hlm. 179.

Diskriminasi rasial juga terdapat di banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, tetapi praktek diskriminasi rasial yang paling menonjol terjadi di Afrika Selatan, karena segregasi ras dilembagakan dan dituangkan dalam undang-undang serta meresapi segala aspek kehidupan masyarakat. Diskriminasi rasial di Afrika Selatan secara sistematis dilembagakan dan dituangkan dalam undang-undang setelah Partai Nasional yang didominasi oleh orang-orang Afrikaner berkuasa, tetapi perkembangannya telah ada pada masa kolonial. Bahkan harus dikatakan bahwa diskriminasi rasial itu adalah inheren dalam setiap pemerintahan kolonial. Di manapun kaum penjajah merasa dirinya lebih unggul dari rakyat jajahannya dan memperlakukan mereka sesuai dengan anggapan itu. Hal itu juga berlaku di Afrika Selatan, di mana pendatang-pendatang kulit putih berhasil menundukkan dan menguasai rakyat pribumi dan secara berangsur-angsur menumpas dan mengurangi hak-hak rakyat pribumi.

Masalah rasial di Afrika Selatan berpangkal pada kenyataan bahwa pendatang-pendatang kulit putih dan Eropa merebut negeri itu dari penduduk kulit hitam dan menggunakan kedudukan mereka yang kuat itu untuk menanamkan kekuatan politik mereka. Akibatnya, hak-hak politik dikuasai oleh sekitar 4 juta orang kulit putih, sedangkan delapan belas juta orang kulit hitam tidak mempunyai perwalian dalam lembaga-lembaga negara di Afrika Selatan. Sampai pertengahan abad ke-20 penyerbuan dan pendudukan serta dominasi kulit putih diberbagai bagian dunia pada intinya memiliki persamaan yaitu pendatang-pendatang dari Eropa yang lebih unggul perlengkapan ekonomi, teknologi dan

militernya dengan mudah menundukkan rakyat pribumi Afrika dan secara berangsur-angsur mendapatkan hak-hak serta kedudukan serba istimewa⁵⁵.

Para pendatang kulit putih telah berakar di Afrika Selatan dan mereka sudah tidak mempunyai negeri untuk kembali. Pada masa orang-orang kulit putih melepaskan koloni-koloni mereka dan pulang ke negeri asal mereka masing-masing dengan senang atau dengan berat hati, orang-orang kulit putih di Afrika Selatan justru berusaha mengukuhkan hak-hak dan kekuasaan mereka. Orang-orang kulit putih di Afrika Selatan tidak dapat pulang ke tanah asal mereka seperti orang-orang Inggris atau Prancis, tetapi juga tidak bersedia memandang bawahan mereka sebagai sesama yang mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Oleh sebab itu mereka hanya mempunyai dua alternatif, yaitu terus memerintah rakyat kulit hitam seolah-olah tidak terjadi suatu perubahan atau memberikan kepada mereka suatu otonomi tertentu. Sejak memenangkan pemilihan umum tahun 1948, Partai Nasional yang berkuasa di Afrika Selatan mencoba menempuh dua jalan itu sekaligus, untuk mempertahankan supremasi serta kedudukan istimewa kulit putih di satu pihak dan menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat kulit hitam sejauh tidak mengancam supremasi kulit putih di lain pihak.⁵⁶

Apartheid merupakan kebijakan pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan untuk mempertahankan supremasi serta kedudukan istimewa kulit putih. Dengan diciptakannya *apartheid*, seluruh aspek kehidupan rakyat kulit hitam diatur berdasarkan hukum. Hukum yang dibentuk, dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan pembatasan-pembatasan berdasarkan ras. Di bawah

⁵⁵ Dipoyudo Kirdi, *Afrika Dalam pergolakan 2*, Jakarta, Yayasan Proklamasi *Centre for strategic and International Studies*, 1983, hlm. 72-73.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 73.

hukum rasis ini, Afrika Selatan menjadi negara pertama yang secara legal mengesahkan rasisme dengan mengizinkan diskriminasi manusia berdasarkan warna kulit. Alasan utama mengapa Afrika Selatan secara berangsur-angsur mengubah dirinya menjadi sebuah negara rasial yang radikal dapat diteliti berdasarkan latar belakang yang bersifat kesejarahan/historis, keagamaan dan ekonomi. Berikut ini, merupakan penjelasan mengenai ketiga latar belakang tersebut yaitu : latar belakang kesejarahan/historis, latar belakang keagamaan dan latar belakang ekonomi yang mendorong Afrika Selatan menjadi sebuah negara rasial yang terkenal dengan kebijakan *apartheid*nya.

1. Latar Belakang Historis

Diskriminasi rasial yang terjadi di Afrika Selatan sesungguhnya telah terjadi jauh sebelum tahun 1948. Sejarahnya dapat ditelusuri melalui kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat terutama Belanda. Pemukiman Belanda di Afrika Selatan yang berasal dari tahun 1652, sejak dari semula adalah manifestasi khas dari kolonialisme kulit putih dan karena itu merupakan manifestasi khas pula dari dominasi dan perbudakan terhadap penduduk pribumi oleh pihak kolonis⁵⁷. Kolonialisme Belanda dimulai pada pertengahan abad ke-17 ketika Belanda masih menjadi bangsa dagang yang kuat. Perusahaan dagang VOC menguasai sebuah wilayah dagang yang luas di sekitar Samudra Hindia. Perjalanan dengan kapal memerlukan waktu yang panjang, sulit serta berbahaya, oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini Belanda memutuskan untuk mendirikan sebuah tempat persinggahan di tengah perjalanan

⁵⁷ Antonio Cassese, *Catatan-Catatan Tentang Apartheid dalam Hak Asasi Manusia di Dunia Yang berubah*, Yayasan Obor, Jakarta, 1994, hlm. 165.

untuk menyegarkan diri. Tempat persinggahan itu terletak di Tanjung Harapan Baik (Cape Colony), di mana Cape Town sekarang berdiri.

Pada tanggal 6 April 1652, Jan van Riebeeck dan sembilan puluh orang lainnya mendarat di Tanjung Harapan setelah menempuh perjalanan jauh dari negeri Belanda. Mereka diperintahkan untuk menyediakan segala sesuatu yang diperlukan kapal-kapal kompeni untuk menyegarkan diri dengan sayur- mayur, daging, air dan keperluan lainnya untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Tanjung Harapan yang semula menjadi tempat persinggahan bagi para kolonis Belanda, lambat laun menjadi tempat permanen dan menarik sejumlah pemukim dari negeri Belanda, dan juga sekelompok orang Huguenots serta orang Protestan yang lari dari Perancis karena disiksa⁵⁸. Para pemukim Belanda yang kemudian menetap di Afrika Selatan menyebut diri mereka orang *Boer* (*Boer* artinya petani), mereka tidak merasa sebagai orang Belanda dan tidak menganggap negeri Belanda sebagai tanah airnya bahkan mereka menggunakan sebuah bahasa yang disebut bahasa Afrikaan yang berbeda dari bahasa Belanda dan secara berangsur-angsur mengembangkan kebudayaan mereka sendiri.

Kedatangan kolonis-kolonis Belanda di Tanjung Harapan menyebabkan timbulnya konflik antara penduduk asli, yaitu orang Khoikhoi yang berkulit kuning dengan para pemukim Belanda. Hubungan dagang yang semula berlangsung dengan baik di antara para pemukim dan orang Khoikhoi mulai renggang ketika orang Khoikhoi merebut kembali daerah pertanian dan peternakan mereka, yang telah dikuasai oleh para kolonis Belanda. Pertentangan

⁵⁸ Grolier International, *Negara Bangsa Asia dan Afrika*, Widyadara, Jakarta, 1988, hlm. 60

itu sangat tidak seimbang, karena para pemukim memiliki senjata sedangkan orang Khoikhoi hanya bersenjatakan panah dan busur. Orang Belanda terus memburu mereka, dan kadang membunuh ratusan manusia. Nasib yang sama kemudian menimpa penduduk asli yang lain yaitu orang San atau Bushmen. Hanya dalam beberapa tahun pemukiman Eropa, pola masa depan Afrika Selatan telah terbentuk, dengan orang kulit putih sebagai tuan dan orang yang berkulit gelap sebagai pelayan. Hubungan seksual antara kelompok-kelompok juga menjadi salah satu untaian lain bagi masa depan, dengan tumbuhnya sekelompok besar orang yang berdarah campuran.

Sejak tahun 1814 bangsa *Boer* diperintah oleh Inggris sebagai konsekuensi dari *Convention of London* (Konvensi London) tahun 1814 di mana Tanjung (Cape Colony) di Afrika Selatan tidak dikembalikan oleh Inggris kepada pemerintahan Belanda. Sejak saat itu Inggris menguasai Tanjung dan membawa serta para pemukimnya sendiri. Hal ini mengakibatkan berkembangnya kelompok orang kulit hitam yang berbahasa Inggris di Afrika Selatan, di samping kelompok yang berbahasa Belanda. Kedatangan orang Inggris di Tanjung, membuat keadaan para pemukim Belanda semakin buruk karena orang asing yang menjadi penguasa. Para pemukim Belanda yang sejak semula mengembangkan suatu tata cara hidup yang dikenal dengan "*master-servant*" (tuan-hamba), tidak lagi bebas melakukan apa saja yang mereka kehendaki karena Inggris sudah menguasai Tanjung, daerah yang semula ditempati oleh para pemukim Belanda. Keluhan para pemukim Belanda masih bertambah ketika Inggris menghapus perbudakan pada tahun 1834. Banyak pemukim Belanda yang mengambil keputusan untuk

pergi dari tempat itu dan berangkat melakukan perjalanan besar yang kemudian dikenal dengan nama “*The Great Treak*”.

“*The Great Treak*” (perjalanan besar) merupakan perjalanan atau perpindahan bangsa *Boer* (sebutan untuk para pemukim Belanda) yang merasa hidupnya tertekan, ketika pada permulaan abad ke-19 Tanjung Harapan atau *Cape Colony* menjadi milik Inggris. Ketika bangsa *Boer* melakukan “*The Great Treak*” pada tahun 1836, pada waktu yang sama suku-suku Negro dari Afrika Tengah bergerak menuju ke selatan memasuki wilayah Afrika Selatan. Mereka itu adalah suku-suku Basuto-Bechuana dan Zulu-Xosa (semuanya memiliki darah Negro), Hamit dan Semit. Di Afrika Selatan suku-suku tersebut disebut suku Kaffir, Bantu, *Native* atau *African*. Sebutan Kaffir sebenarnya mereka peroleh dari orang-orang Arab, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak menganut agama. Pada permulaan abad ke-20, istilah Kaffir diganti dengan *Native*, sebutan yang diberikan oleh orang kulit putih untuk penduduk bumiputera. Penduduk bumiputera lebih senang menyebut dirinya *African*, yang berarti orang Afrika. Ketika orang-orang Xosa yang berdiam di sebelah tenggara Cape bergerak menuju ke arah barat, mereka bertemu dengan orang-orang *Boer* yang sedang menuju ke arah timur. Kontak antara dua ras terjadi yang selanjutnya diikuti dengan perselisihan dan peperangan. Bangsa *Boer* juga melakukan peperangan dengan orang-orang Zulu-Kaffir di Natal, dan berlangsung sejak akhir abad ke-18

sampai permulaan abad ke-19. Perang tersebut diakhiri dengan ketentuan bahwa masing-masing ras mendiami daerah-daerah yang telah mereka duduki⁵⁹.

Pada tahun 1899, keriuhan terus memuncak dan pertikaian antara kelompok *Boer* dan kelompok Inggris mencapai titik klimaksnya dan meletuslah perang. Perang tersebut dikenal dengan nama “Perang *Boer*”. Perang *Boer* merupakan suatu pemberontakan umum dari semua penduduk yang berbahasa Belanda di seluruh Afrika Selatan yang dilatarbelakangi oleh ketidaksenangan bangsa *Boer* terhadap Inggris. Perang tersebut dimenangkan oleh Inggris dan dalam waktu yang singkat Johannesburg dan ibukota Pretoria jatuh ke tangan Inggris.

Meskipun perang telah usai, tapi banyak orang *Boer* yang belum mau menyerah. Mereka beralih pada taktik komando, berperang di atas pelana di belakang garis pertahanan Inggris. Inggris kemudian menempatkan dua ratus lima puluh ribu prajuritnya dan menjalankan taktik bumi hangus. Mereka membakar pertanian dan rumah orang-orang *Boer*. Wanita, anak-anak, dan pria dewasa mereka tempatkan dalam kamp-kamp konsentrasi, di tempat-tempat yang terasing dan sama sekali tidak diberi perlindungan sampai perjanjian damai ditetapkan pada tahun 1902. Setelah bertempur selama tiga tahun, perang mulai menampakkan sisi negatifnya. Hilangnya nyawa, senjata dan ternak serta merajalelanya penyakit mengakibatkan kalahnya kelompok *Boer*. Pada bulan Mei tahun 1902, kelompok *Boer* menyerah kalah kepada pasukan Inggris.

⁵⁹ Darsiti Soeratman, *Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Modern* Jilid 2, Yogyakarta, Seri Penerbitan TextBook Universitas Gajah Mada, 1974, hlm. 158-159.

Perang antara orang *Boer* dan Inggris meninggalkan luka-luka bagi orang *Boer*, yang juga berpengaruh di masa depan. Orang *Boer* merasa sakit hati dengan kekalahan dan penderitaan mereka. Kekalahan yang dialami orang *Boer* membuat mereka semakin membenci orang Inggris dan pengaruh asing, dibanding sebelumnya. Kebencian ini makin hebat karena penguasa Inggris berusaha menekan orang *Boer* dengan menghantam bahasa *Afrikaans*, bahasa lokal yang dikembangkan dari bahasa Belanda. Anak-anak yang berbicara dalam bahasa Belanda di sekolah, mendapat hukuman berdiri di pojok kelas memakai “topi bodoh”, sebuah topi yang dikenakan pada anak-anak yang dianggap bodoh. Namun, orang *Boer-Afrikaner* tetap dapat bertahan hidup.

Pada tahun 1902 Jendral-Jendral *Boer* menyetujui perundingan perdamaian di Pretoria yang kemudian menghasilkan perjanjian yang disebut “Perjanjian Vereeniging”. Ketentuan perjanjian itu adalah sebagai berikut⁶⁰:

- (1) Republik-republik Transvaal dan Orange Free State dianeksasi pada British Empire.
- (2) Orang-orang *Boer* menjadi warga Inggris. Mereka diberi janji akan mendapat uang guna membangun kembali perkampungan mereka.
- (3) Pemerintahan sendiri akan diberikan secepat-cepatnya.
- (4) Bahasa Belanda dan bahasa Inggris diberikan di sekolah-sekolah dan dipakai di lapangan pengadilan

Sesudah Perang *Boer* II (1899-1902) berakhir dan diikuti dengan diadakannya Perjanjian perdamaian di Vereeniging, perjuangan bangsa *Boer*

⁶⁰ Darsiti Soeratman, *Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Modern Jilid I*, Yogyakarta, Vita, 1974, hlm.75.

selanjutnya adalah merealisasi salah satu perjanjian yang menyatakan : “Pemerintahan sendiri akan diberikan secepat-cepatnya kepada bekas Republik Boer”. Lord Milner, Gubernur di Transvaal dan Orange Free State berusaha membawa kemakmuran penduduk di kedua daerah tersebut dengan cara melakukan kerjasama sebaik-baiknya dengan koloni-koloni Inggris di Afrika Selatan. Perdagangan antara koloni tersebut dilakukan secara bebas. Pada tahun 1907, atas bantuan perdana menteri Inggris Sir Henry Campbell Bannerman dua koloni bekas Republik Boer (Transvaal dan Orange Free State) dilepaskan dari pengawasan kementerian Tanah Jajahan dan diberi pemerintahan sendiri. Louis Botha terpilih menjadi Perdana Menteri dibekas Republik Boer tersebut. Bersama Natal dan Cape Colony, Transvaal dan Orange Free State masuk dalam satu lingkungan politik. Pemerintah Inggris mengharapkan agar keempat daerah bekas koloni itu merupakan sebuah federasi dan mengharap pula dapat menekan rasialisme bangsa *Boer* yang ekstrim. Inggris ingin memperluas liberalisme pada provinsi-provinsi di utara, tetapi dalam kenyataannya bukan federasi yang terbentuk, melainkan sebuah uni; bukan liberalisme yang meluas ke utara, tetapi sikap dan psikologi utara yang mengutamakan prinsip “*No equality in Church*” meluas ke selatan⁶¹.

Pada bulan Oktober 1908, wakil-wakil dari empat daerah di Afrika Selatan yaitu Transvaal, Orange Free State, Natal dan Cape Colony bersidang untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan untuk membentuk sebuah uni yang memiliki sebuah pemerintah pusat dan satu parlemen pusat sebagai badan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 154.

legislatif. Parlemen pusat terdiri atas dua kamar : Majelis Rendah (*House of Assembly*) dan Senat. Majelis rendah terdiri atas wakil-wakil provinsi berdasarkan imbalan penduduk jumlah kulit putih. Anggota Senat berjumlah 40 wakil berasal dari empat provinsi, masing-masing mengirimkan delapan orang dan delapan orang lagi dipilih oleh Gubernur Jenderal⁶².

Usul pembentukan Uni di Afrika Selatan diratifikasi oleh parlemen Inggris dan pada tahun 1910 Orange Free State, Transvaal, Cape Colony (Cape Town) dan Natal menjadi uni yang disebut Uni Afrika Selatan. Berdasarkan peraturan *Act of Union* pada tahun 1910, Louis Botha yang terpilih menjadi perdana menteri memutuskan bahwa Cape Town dijadikan tempat kedudukan parlemen, sedangkan Pretoria sebagai pusat administrasi negara dan Bloemfontein sebagai tempat kedudukan pengadilan tinggi.

Terbentuknya Uni Afrika Selatan merupakan kemenangan bagi kaum *Afrikaner* (nama yang dipakai untuk menyebut bangsa *Boer*), sebab sebagian besar anggota Parlemen Pusat adalah orang-orang *Afrikaner*. Hal ini nampak dari jabatan perdana menteri yang dipegang oleh orang-orang *Afrikaner*. Misalnya, Jendral Louis Botha, bekas pejuang gigih melawan Inggris dalam perang *Boer* merupakan orang pertama yang menjadi perdana menteri sejak Uni Afrika Selatan terbentuk. Jendral Louis Botha kemudian digantikan oleh Jendral Smuts, teman seperjuangannya dalam perang *Boer* dan ia juga berperan dalam meletakkan dasar-dasar pemerintahan uni Afrika Selatan. Beberapa perdana menteri

⁶² Darsiti Soeratman, *Op.cit*, hlm. 45.

berikutnya antara lain : Herzog, Malan, Stridjom, semuanya adalah orang-orang Afrikaner.

Dengan demikian walaupun perang melawan Inggris secara resmi telah berakhir dan bangsa *Boer* ada pada pihak yang kalah namun sesudah Afrika Selatan menjadi Uni dan pemerintahan serta parlemennya dipegang oleh orang-orang *Afrikaner*, maka semangat anti Inggris yang selama itu belum lenyap sama sekali tumbuh makin lama makin kuat di setiap diri orang *Afrikaner*. Hal ini juga merupakan faktor mengapa dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, orang-orang *Afrikaner* banyak yang tidak setuju apabila Uni Afrika Selatan memihak Inggris⁶³. Sejak terbentuknya Uni Afrika Selatan, terbukalah kesempatan bagi orang-orang *Afrikaner* untuk meluaskan nasionalisme *Afrikaner* ke seluruh wilayah di Uni Afrika Selatan termasuk daerah-daerah yang berorientasi Inggris yaitu Natal dan Cape Colony.

Usaha untuk meluaskan nasionalisme *Afrikaner* dilakukan oleh pemimpin-pemimpin *Afrikaner* dengan cara berusaha mempengaruhi penduduk kulit putih yang berbahasa Inggris untuk : (1) menerima pola masyarakat *Afrikaner*, (2) menerima aristokrasi putih, (3) menerima keyakinan bahwa Afrika Selatan adalah satu-satunya tanah air mereka, (4) menolak integrasi dengan penduduk non putih.

1. Menerima Pola Masyarakat Afrikaner.

Sejak semula para kolonis di Afrika Selatan memiliki perasaan lebih tinggi dari pada penduduk asli. Jan van Rieboeck membedakan penduduk di

⁶³ *Ibid*, hlm. 157.

Afrika Selatan antara beradab dan belum beradab. Pihak Gereja membedakan antara Kristen dan Barbar, sedangkan para kolonis pada umumnya membedakan penduduk Afrika Selatan antara Putih dan Hitam. Para kolonis membedakan kulit hitam dan kulit putih berdasarkan perbedaan ras. Selanjutnya para kolonis tersebut membentuk suatu masyarakat yang berdasarkan sistem *master-servant*⁶⁴.

Pola masyarakat Afrikaner adalah pola masyarakat yang berdasarkan *master-servant*. *Master* berarti tuan, dan yang termasuk *master* adalah orang-orang kulit putih disertai hak-hak istimewa. Sedangkan yang termasuk *servant* (pelayan) adalah orang-orang kulit hitam yang dibebani dengan banyak kewajiban. Di Afrika Selatan, agama Kristen, pertanian dan kemakmuran diidentifikasi dengan kulit putih, sebaliknya pemujaan berhala, kemiskinan dan perbudakan disamakan dengan kulit hitam. *Servant* merupakan mayoritas yang diperintah dan *master* merupakan minoritas yang berkuasa dan memerintah. Agar kedudukan kulit putih sebagai *master* tetap terjamin, maka harus dijaga agar jangan sampai terjadi asimilasi antara kedua ras tersebut. Perkawinan campur antara dua bangsa tidak dibenarkan, bahkan pada tahun 1685 orang-orang Boer telah membuat peraturan resmi yang melawan perkawinan campur.

2. Menerima Aristokrasi Putih.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aristokrasi adalah pemerintah (kekuasaan) dipegang oleh kaum bangsawan atau kaum ningrat. Aristokrasi berasal dari kata Yunani, *aristos* (yang paling baik) dan *krateo* (memerintah). Jadi aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh orang-orang

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 162.

yang terpilih karena moralitas atau pun kemampuan intelektualnya. Dalam sejarah Yunani dan pemikiran Plato, aristokrasi diartikan pemerintahan dalam sistem negara demokrasi yang terdiri dari orang-orang terpilih karena akhlak dan kepandaianya. Dalam aristokrasi, pemegang kekuasaan pada umumnya mempunyai hak-hak tertentu yang tidak dimiliki oleh penduduk lainnya. Aristokrasi menurut perjalanan sejarah berasal dari pemimpin suku dan karena peperangan, pemimpin tadi bisa menaklukkan suku lain dan menguasai daerah yang lebih luas dari semula. Di samping hak-hak istimewa, golongan ini mempunyai kewajiban tertentu yaitu pelindung rakyat, khususnya dalam peperangan. Tetapi arti asli itu dipergunakan pula untuk orang-orang berkuasa⁶⁵.

Menerima aristokrasi putih di Afrika Selatan, berarti menerima kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang kulit putih saja, yaitu orang *Afrikaner* atau bangsa *Boer*. Prinsip-prinsip aristokrasi putih *Afrikaner* dengan tegas membedakan penduduk kulit putih dan kulit hitam. Warganegaranya hanya terdiri atas orang-orang Putih saja. Delapan puluh persen dari seluruh penduduk Eropa di Afrika Selatan, baik mereka yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa *Afrikaans*, baik yang kaya maupun yang miskin, semuanya setuju dipertahankannya aristokrasi putih.

3. Menerima Afrika Selatan Sebagai Tanah Air.

Selain memiliki pola masyarakat berdasarkan *master-servant* dan memegang teguh prinsip-prinsip aristokrasi putih, orang-orang *Boer* atau *Afrikaner* menganggap bahwa Afrika Selatan adalah satu-satunya tanah air

⁶⁵ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta, PT. Cipta Adi Pustaka, 1988, hlm. 244.

mereka. Pada akhir abad ke-18, banyak kolonis yang berasal dari Belanda menganggap diri mereka terpisah dari negeri asal mereka, mereka menggunakan sebuah bahasa yang disebut bahasa *Afrikaan* yang berbeda dari bahasa Belanda dan secara berangsur-angsur mengembangkan budaya sendiri. Dengan kata lain, orang *Boer* segera mulai membedakan diri dari kolonis-kolonis lain (misalnya Inggris, Belgia, Prancis, dan lain-lain) di wilayah-wilayah lain di Afrika yang baik dahulu maupun sekarang selalu menganggap diri mereka hanyalah perpanjangan dari sebuah negara Eropa.

Orang-orang *Boer* atau *Afrikaner* merasa bahwa Afrika Selatan adalah daerah yang dimilikinya dan akan dipertahankannya sekuat tenaga. Mereka telah membentuk masyarakat dengan pola tertentu, memiliki bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan sendiri. Mereka telah melepaskan segala ikatan dengan tanah asal mereka dan mereka tidak mungkin dapat kembali ke tanah asalnya jika mereka terdesak oleh penduduk bumiputera yang jumlahnya amat banyak. Orang-orang *Afrikaner* sangat bangga akan tata hidup yang diciptakannya dan sebagian besar dari mereka tidak ingin mengubah dasar-dasar pandangan hidup abad 17. Buku perjanjian lama mereka jadikan pegangan. Masyarakat nenek-moyangnya yang mereka sebut “*Voortrekkers*” merupakan masyarakat yang ideal. Oleh sebab itu walaupun mereka hidup pada abad 20, prinsip-prinsip abad 17 masih dipegang, di antaranya adalah masyarakat aristokrasi putih. Kelompok putih memerintah

bumiputera, menolak intervensi asing, hidup menyendiri dan menolak gagasan-gagasan liberal⁶⁶.

Berdasarkan pendapat bahwa mereka telah membentuk kepribadiannya sendiri dan menganggap bahwa Afrika Selatan adalah satu-satunya tanah air mereka, maka pada bangsa *Afrikaner* ini timbul perasaan nasionalisme *Afrikaner*. Nasionalisme *Afrikaner* tersebut timbul kembali setelah Uni Afrika Selatan terbentuk pada tahun 1910 dan mulai saat itu mereka berusaha untuk mendominasi Afrika Selatan. Selama perang dan sesudah perang, orang-orang *Afrikaner* berusaha dengan sekuat tenaga untuk memulihkan keadaan dan kemakmurannya yang lama. Kemiskinan pada bangsa *Boer* timbul pada waktu mereka dikuasai oleh Inggris. Masalah “*Poor Whites*” (orang-orang kulit putih yang miskin) yang berlangsung sejak tahun 1903-1930, merupakan masalah yang tidak kalah hebatnya dengan masalah bumiputera. Bahkan pada masa tersebut penduduk bumiputera dianggap sebagai kekuatan yang mengancam orang kulit putih yang sedang dalam keadaan merosot. “*Poor Whites*” ini merupakan masalah serius, yang sangat berpengaruh terhadap politik rasial yang akan dilakukan oleh orang-orang *Afrikaner*.

4. Menolak Integrasi dengan Penduduk Non Kulit Putih.

Sejak semula para kolonis di Afrika Selatan menganggap bahwa kedudukan mereka lebih tinggi dari penduduk asli. Perasaan lebih tinggi dari penduduk asli didukung oleh adanya anggapan bahwa kebudayaan atau peradaban Eropa lebih tinggi bila dibandingkan dengan kebudayaan penduduk asli dan ras

⁶⁶ Darsiti Soeratman, *Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Modern Jilid 2*, Seri Penerbitan TextBook Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1994, hlm.163-164.

kulit putih merupakan ras yang unggul. Penduduk non kulit putih terutama kelompok kulit hitam dianggap sebagai kelompok yang inferior. Oleh karena itu, segala macam bentuk intergrasi dengan penduduk non kulit putih, misalnya melalui perkawinan campur antara dua ras (kulit putih dan non kulit putih) tidak dilakukan. Hal ini dilakukan supaya supremasi kulit putih tetap terjamin.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang historis dapat mempengaruhi munculnya politik *apartheid* di Afrika Selatan. Sejarah kedatangan para pemukim Belanda di Afrika Selatan memiliki makna yang penting untuk menjelaskan kaitan antara motivasi historis dan munculnya politik *apartheid* di Afrika Selatan. Bangsa Eropa yang pertama kali bermukim di Afrika Selatan adalah Bangsa Belanda dan sejak semula, orang-orang Belanda (yang kemudian disebut orang *Boer/Afrikaner*) yang bermukim di Afrika Selatan adalah orang-orang yang telah memisahkan diri dari tanah airnya dan menganggap Afrika Selatan sebagai satu-satunya tanah air mereka. Sejak awal, orang-orang Boer telah menerapkan prinsip aristokrasi putih dengan sentimen rasialisme dan berusaha menjadikan Afrika Selatan sebagai “*White Man’s Land*” (daerah kulit putih). Di Afrika Selatan orang-orang *Boer* tersebut merupakan minoritas, tetapi menguasai seluruh kehidupan baik kehidupan sosial, politik maupun ekonomi. Mereka merupakan kelompok kecil yang hidup di tengah-tengah penduduk bumiputera yang amat besar jumlahnya dan hal ini menimbulkan perasaan khawatir di dalam diri orang-orang kulit putih akan adanya ancaman penduduk bumiputera. Orang-orang *Boer* tidak ingin kekuasaan yang telah mereka peroleh sejak awal diambilalih oleh penduduk pribumi yang

menurut kepercayaan mereka mengancam kemakmuran dan kemurnian bangsa *Afrikaans*. Oleh karena itu, agar supremasi kulit putih dapat dipertahankan dan eksistensi mereka sebagai kelompok minoritas tidak tersingkirkan oleh mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan, maka diterapkanlah suatu kebijakan yang dikenal dengan *apartheid*.

2. Latar Belakang Keagamaan

Afrika Selatan memiliki persentase orang Kristen lebih tinggi dari negara mana pun di benua Afrika. Posisi dominan dipegang oleh tiga Gereja Reformasi Belanda⁶⁷ yang berbeda tetapi berhubungan erat satu sama lain, dan hampir semua *Afrikaner/Boers* menjadi anggota di salah satu dari ketiga gereja ini. Fakta mendasar di Afrika Selatan adalah bahwa gereja dan negara, otoritas agama dan kekuasaan politik bergabung pada tingkat tertentu, suatu fakta yang hampir tidak pernah dijumpai di dunia modern lain. Hampir semua anggota kabinet merupakan anggota dari salah satu Gereja Reformasi Belanda, bersama dengan lebih dari 95% anggota parlemen Nasionalis. Dr. Daniel Francois Malan, Perdana Menteri Nasionalis pertama ketika pertama kali berkuasa pada tahun 1948 adalah seorang pendeta gereja. Tidak hanya politisi Nasionalis yang menjadi anggota pada salah

⁶⁷ Gereja Reformasi Belanda meliputi 3 pengelompokan utama yaitu : 1) *Nederduitse Gereformeerde* (dikenal dengan inisialnya N.G.K, 2) *Nederduitse Hervormde Kerk* (N.H.K), dan 3) *Gereformeerde Kerk*. Seperti tersirat dari nama-nama itu ketiganya berhubungan erat. Secara bersama-sama mereka mengklaim bahwa 50% dari tiga juta orang kulit putih di Afrika Selatan masuk dalam ketiga gereja ini. Gereja Reformasi Belanda, sebagaimana terbaca dari namanya, memiliki asal-usul serta inspirasi dari negara Belanda, tetapi Belanda abad 17, bukan Belanda saat ini. Gereja utama di Belanda sudah dipengaruhi oleh arus liberalisme dan humanisme yang besar yang melanda dunia selama 200 tahun. Namun gereja-gereja di Afrika Selatan hampir hingga akhir abad 19, terisolasi dari kontak-kontak bebas dan rutin dengan pusat-pusat pemikiran Barat, telah mempertahankan dogma yang kuat dan tak kenal kompromi yang khas dimiliki Protestanisme militan selama Reformasi, empat abad yang lalu. Tom Hopkinson, *Religion of The Elect* dalam *South Africa*, Life World Library, New York, 1994, hlm.106

satu dari Gereja-Gereja Reformasi Belanda, sebaliknya sebagian besar Pendeta Gereja Reformasi Belanda secara politik berasosiasi dengan Partai Nasionalis. Bahkan banyak sekali dari mereka adalah anggota perkumpulan rahasia *Afrikaner* yang sangat kuat, yang disebut *Broederbond* dan merupakan inti dari Nasionalisme Afrikaner⁶⁸.

Unsur rasis khusus, yang selalu ada pada setiap dominasi kolonial, ditekankan lagi oleh agama kolonis Belanda, yaitu Calvinisme dan Gereja Reformasi Belanda. Tiang utama rasisme yang berasal dari agama ini adalah sebuah ayat yang terkenal dalam *Bible* (Kitab Suci), di mana Noah mengutuk Ham dan mengucapkan kata-kata yang mengerikan terhadapnya: “Terkutuklah Kanaan: ia akan menjadi budak dari budak terhadap saudara-saudaranya” (Kejadian, 9, 25)⁶⁹. Kalau kita membaca ayat itu sekarang ini, mungkin tampaknya agak aneh bagi kita, atau sekurang-kurangnya tidak ada apa-apanya: Noah, mabuk, pergi ke dalam tendanya dalam keadaan telanjang; Ham, anaknya yang terkecil, melihatnya dan pergi menceritakan kepada saudara-saudaranya Shem dan Japheth; mereka mengambil sehelai kain dan menutupi ketelanjangan bapak mereka tanpa melihat; Noah terbangun, mengetahui apa yang terjadi dan mengucapkan kutukannya yang tidak berbelas kasihan itu terhadap Ham yang malang. Tetapi Gereja Reformasi Belanda menafisirkan ayat itu berarti bahwa *Bible* (Kitab Suci) mengatakan bahwa orang Ham (Afrika) harus menjadi budak Semit dan Japhithis.

⁶⁸ *Ibid*, hlm.107-108.

⁶⁹ Antonio Cassese, *Catatan-Catatan Tentang Apartheid* (terjemahan), Yayasan Obor, Jakarta, 1994, hlm. 166.

Tonggak rasisme yang lain adalah dogma “nasib ganda”, yang mengatakan bahwa masing-masing kita telah dilahirkan dengan stempel kebaikan (yang pilihan) atau stempel kehinaan (yang brengsek). Dogma agama ini, sebagaimana kita ketahui, adalah yang paling mengerikan dalam bentuk yang tidak dapat dilukiskan, karena Tuhan tidak menunjukkan dengan jelas tanda-tanda luar yang akan membedakan anggota kedua kategori itu, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita telah dipilih-Nya di kalangan mereka yang pilihan, dan bukan termasuk ke dalam golongan mereka yang terkutuk. Sukar untuk membayangkan adanya suatu sumber ketidaktenteraman yang lebih besar dari ini tentang diri sendiri dan tentang dunia. Juga cukup terkenal, karena telah dijelaskan dengan gamblang sekali oleh Max Weber, bahwa dogma itu merupakan suatu dorongan yang sangat kuat bagi pencarian yang bersifat neurotic terhadap “keberhasilan pribadi”, untuk membuktikan kepada diri sendiri dan kepada dunia bahwa kita termasuk orang yang pilihan. Kesuksesan pribadi ini, dalam tatanan sosial dan ekonomi di mana agama beroperasi, berarti penumpukkan kekayaan melalui kerja yaitu kerja tanpa lelah, menjadi obsesi dan tanpa henti-hentinya⁷⁰. Akan tetapi dengan perantaraan suatu manipulasi yang tidak tepat dari dogma agama, para anggota Gereja Reformasi Belanda mengemukakan pertanyaan ini: jika kita tidak diberi kesempatan untuk mengetahui dengan yakin apakah kita termasuk ke dalam kategori yang ini atau yang itu (termasuk orang pilihan atau tidak), tanda apakah yang dapat menjadi lebih jelas lagi daripada warna kulit? Dan

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 167.

dengan mencermati *Bible*, ditemukan sebuah ayat lain yang dapat diberikan penafsiran rasis :

Dan Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan kamu dan keturunanmu setelah kamu dalam generasi-generasi mereka untuk menjadi suatu perjanjian yang abadi, untuk menjadi Tuhan kamu, dan Tuhan keturunan kamu setelah kamu. Dan Aku akan memberikan kepada kamu, dan kepada keturunan kamu setelah kamu, tanah di mana kamu menjadi orang asing, semua tanah Canaan, menjadi hak milik abadi, dan Aku akan menjadi Tuhan mereka (Kejadian, 17, 7-8)⁷¹.

Orang *Afrikaner* menafsirkan ayat ini dengan suatu cara yang sangat khusus: Tuhan telah memberikan kepada mereka, dan hanya kepada ras mereka saja, tanah di mana mereka tinggal, yang karena itu harus disediakan hanya untuk orang yang terpilih saja, yang bersatu dengan Tuhan melalui suatu perjanjian keagamaan yang khidmat. Jadi, bukan kebetulan, sebagaimana dikemukakan dengan tepat sekali oleh Gerald Chaliand bahwa orang Boer itu telah menganggap sejarah mereka sebagai suatu peristiwa keagamaan yang hebat, kepindahan “perintis” yang hebat itu mereka rasakan sebagai suatu perjalanan ke tanah yang telah dijanjikan Tuhan, sebagai suatu jenis “pementasan” *Bible*. Seluruh bangunan negara Afrika Selatan dianggap dan dialami mereka sebagai suatu misi suci, sebagai pemenuhan perintah Tuhan yang akan merupakan suatu dosa apabila tidak dilakukan.

Dalam pandangan dunia orang Afrika, *apartheid* dan Gereja sejalan. Hal ini disebabkan karena Gereja Reformasi Belanda memberikan kepada *apartheid* landasan agama dengan menyatakan bahwa bangsa Afrika adalah bangsa pilihan Allah (khususnya orang kulit putih) dan bahwa orang hitam merupakan ras yang

⁷¹ Antonio Cassese, *Op.cit*, hlm. 168.

bernilai sangat rendah. Ironisnya, pengaruh Gereja Reformasi Belanda dalam membangun *apartheid* juga diyakini oleh Winnie Mandela, istri Nelson Mandela (pemimpin *African National Congress*) dalam pernyataannya ketika berada dalam penjara:

Saya lupa mengatakan bahwa saya mempunyai *Bible*, karena dalam keadaan itu ia (*Bible*) merupakan buku yang tidak ada gunanya. Saya membacanya empat kali. Saya tidak pernah tahu bahwa mungkin membaca *Bible* dari permulaan sampai ke akhirnya.

Apa yang demikian ironisnya—kami mengetahui bagaimana orang-orang Afrikaner yang bersifat keagamaan itu ingin menampilkan dirinya. Nah, hal itu kelihatan dari cara saya mendapatkan *Bible* dalam penjara—salah seorang petugas keamanan berdiri di pintu masuk, pintu terbuka lebar dan ia melemparkan Bibel itu ke kakiku—Ini *Bible*, mintalah kepada Tuhanmu untuk membebaskan kamu dari penjara!”

Bahkan untuk orang yang tidak begitu beragama, *Bible* itu masih tetap menimbulkan sebetuk penghormatan. Sekarang, inilah orang-orang yang dianggap beragama mempermain-mainkan Tuhan itu sendiri yang mereka percayai telah memberikan takdir kepada mereka untuk menjadi penguasa negeri ini. Ketika mereka menindas kami, mereka menindas kami atas nama Tuhan, mereka menamakan diri mereka orang-orang pilihan Tuhan. Atas nama Tuhan itu, ia melemparkan *Bible* kepada saya, dan namun demikian setiap hari Minggu ia berdiri di mimbar mengkhotbahkan apa yang tidak pernah dipercainya⁷².

Pernyataan Winnie Mandela tersebut, secara tidak langsung menyetujui anggapan bahwa orang-orang kulit putih (Kaum *Afrikaner*) adalah orang-orang pilihan Tuhan yang ditakdirkan menjadi penguasa, untuk menindas orang kulit hitam di Afrika Selatan dan penindasan tersebut dilakukan atas nama Tuhan.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa Gereja Reformasi Belanda mendukung kebijakan *apartheid* di Afrika Selatan dengan memberikan landasan agama yang menyatakan bahwa orang-orang *Afrikaner*

⁷² *Ibid*, hlm. 168-169.

adalah orang-orang pilihan Allah. Dukungan yang diberikan oleh Gereja Reformasi Belanda tersebut semakin memperkuat perasaan superior kaum *Afrikaner*. Kaum *Afrikaner* kemudian merasa bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah dan tugas mereka adalah menyingkirkan orang-orang yang bukan pilihan (khususnya orang kulit hitam), dari seluruh aspek kehidupan mereka. Hal inilah yang kemudian mendorong mereka untuk menerapkan *apartheid* di Afrika Selatan. Orang-orang yang pro *apartheid* berusaha melegitimasi *apartheid* melalui pandangan teologi yang palsu. Selain itu, dukungan yang diberikan Gereja Reformasi Belanda terhadap kebijakan *apartheid* juga merupakan sarana untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik para penguasa rezim *apartheid* di Afrika Selatan.

3. Latar Belakang Ekonomis

Negara Afrika Selatan, untuk ukuran benua Afrika merupakan negara industri yang kuat dan amat kaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ketergantungan ekonomi negara-negara di Afrika pada Afrika Selatan. Dalam bidang perekonomian Afrika Selatan memiliki dan menguasai sarana perhubungan seperti rel, jalan, pelabuhan yang diperlukan negara-negara *land locked* (tidak berpantai) tetangganya untuk mengekspor atau mendatangkan barang kebutuhannya. Negara-negara Zimbabwe, Zambia, Zaire dan Malawi mempercayakan pengangkutan barang-barang ekspornya pada jalan kereta api, gerbong dan lokomotif milik Afrika Selatan untuk kemudian mengapalkannya. Selain itu Afrika Selatan merupakan pensuplai bahan makanan bagi sebelas negara di kawasan Afrika Selatan, di samping listrik dan haban bakar. Di

Botswana misalnya, hampir semua perusahaan besar adalah milik orang Afrika Selatan. Bagi Lesotho pertambangan di Afrika Selatan merupakan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi mayoritas warganya. Demikian pula halnya dengan Botswana dan Swaziland yang hampir sembilan puluh persen kebutuhannya tergantung pada Afrika Selatan⁷³.

Kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Afrika Selatan semula berasal dari ditemukannya berlian pada tahun 1867 dan emas di daerah Transvaal selatan (Witwatersrand) pada tahun 1885. Sejak saat itu berbagai mineral lain ditemukan, misalnya batubara (Witbank dan Natal), perak dan uranium (Johannesburg dan Vereeniging), besi dan mangan di Postmansburg⁷⁴. Di samping itu, Afrika Selatan kaya akan hasil pertanian seperti buah jeruk, padi-padian, gula dan anggur. Namun, faktor utama yang menjadi sebab berubahnya negeri itu dari daerah pedesaan yang terbelakang menjadi kekuatan industri adalah pemanfaatan kekayaan yang didapat dari mineral untuk mengembangkan pabrik.

Ditemukannya intan, emas dan berlian menyebabkan kehidupan ekonomi penduduk Afrika Selatan mengalami banyak perubahan. Perkembangan industri ini menyebabkan lebih banyak orang Afrika bekerja di pabrik. Banyak pekerja diperlukan untuk menggali lubang dan terowongan dalam tambang emas. Ketika ribuan orang berdatangan ke tambang-tambang emas yang baru itu, para penambang yang kebanyakan berasal dari Eropa menetapkan pola kerja yaitu, orang kulit putih melakukan pekerjaan terampil dan mendapat bayaran tinggi

⁷³ Wisnu Dewanto, *Apartheid dan perkembangan di Afrika Bagian Selatan*, 1987, Analisa, Volume XIV No.2. Untuk melihat ketergantungan ekonomi negara-negara di Afrika terhadap Afrika Selatan lihat lampiran XV, hlm. 187.

⁷⁴ Ensiklopedi Indonesia I, Ichtiar Baru van Hoeke, Jakarta, 1980, hlm. 260.

sedangkan orang kulit hitam melakukan pekerjaan kasar dengan mendapat imbalan yang kecil. Walaupun orang kulit hitam memperoleh uang yang sangat kecil, kemiskinan di desa yang begitu buruk membuat mereka tetap berbondong-bondong menuju pertambangan.

Industrialisasi dan ekonomi modern di Afrika Selatan mengakibatkan adanya kelas buruh dan majikan. Buruh terdiri atas buruh terdidik, semi terdidik, dan tidak terdidik. Pada umumnya orang-orang Eropa menjadi majikan dan buruh terdidik (*skilled labour*); yang termasuk buruh semi terdidik adalah orang-orang kulit Putih, Coloured dan bumiputera, sedang kelas buruh tidak terdidik hampir seluruhnya adalah orang-orang Hitam. Keadaan buruh hitam pada umumnya melarat, demikian pula dengan keadaan buruh orang-orang Asia dan Coloured. Namun demikian di Afrika Selatan tidak ada kesatuan di antara buruh-buruh untuk menghadapi majikan. Pertentangan yang ada bukan antara kelas majikan dan buruh, seperti yang terjadi di negara-negara industri melainkan antara Putih dan Hitam. Suatu pertentangan yang tidak berdasarkan kelas tetapi berdasarkan perbedaan warna kulit atau ras⁷⁵.

Pada pertengahan tahun 1930-an, permintaan internasional terhadap ekspor mineral dari Afrika Selatan mulai meningkat terutama selama Perang Dunia II. Perang Dunia II bagi Afrika Selatan mempunyai efek mempercepat proses masuknya sebagian besar *African*⁷⁶ ke dalam ekonomi Eropa. Hal ini mengakibatkan ekspansi secara besar-besaran dari sektor tambang dan mempekerjakan ribuan pekerja kulit hitam. Masuknya sebagian besar *African* ke

⁷⁵ Darsiti Soeratman, *Sejarah Afrika Zaman Imperiaisme Modern Jilid 2*, Seri Penerbitan TextBook Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.166.

⁷⁶ Penduduk bumiputera lebih senang menyebut dirinya *African* yang berarti orang Afrika.

dalam ekonomi Eropa, mengakibatkan semakin banyaknya jumlah penduduk *African* di kota. Penduduk *African* yang tinggal di kota bertambah 5% tiap tahunnya. Kedudukan mereka yang makin hari makin baik dalam bidang ekonomi merupakan faktor yang menentukan bagi politik pemerintah terhadap *African*.

Oleh karena itu, untuk menopang perlindungan ekonomi dari pekerja kulit putih, diadakan pemisahan sosial antara kulit putih dan kulit hitam. Para petani kulit putih yang menginginkan persediaan buruh kulit hitam murah dalam jumlah yang besar, mengusahakannya dengan membatasi pekerjaan industri bagi kulit hitam atau dengan kata lain buruh non putih tidak diberi kesempatan untuk menjadi buruh terdidik. Orang-orang Afrika tidak diizinkan memiliki lahan pertanian. Semua langkah tersebut diupayakan untuk menunjang perlindungan ekonomi terhadap pekerja kulit putih.

Dengan demikian, selain latar belakang historis dan latar belakang agama harus pula ditambahkan latar belakang tertentu yaitu latar belakang ekonomis. Jika suatu ras dianggap rendah, maka secara alami akan lebih mudah untuk mewajibkan tugas-tugas yang hina, tidak enak dan berat kepadanya. Cukuplah kalau diingat kembali bahwa seandainya buruh murah tidak tersedia, maka penambangan emas akan sangat sukar dilakukan dan tidak akan memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan industri di Afrika Selatan. Alasan keberadaan kulit hitam terutama kebutuhan akan buruh dalam jumlah yang besar dalam bidang industri di Afrika Selatan adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang maksimum bagi negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Afrika Selatan (emas, intan, tembaga, batubara dan sebagainya) telah mendorong rezim Afrika Selatan untuk menciptakan suatu kondisi ekonomi yang memungkinkan diterapkannya politik *apartheid*. Pemerintah kulit putih tidak ingin kekayaan sumber daya alam yang berlimpah di Afrika Selatan dimiliki dan dikelola oleh kelompok rasial lain selain kulit putih. Oleh karena itu, agar kekayaan sumber daya alam sepenuhnya dikuasai oleh orang kulit putih maka diterapkanlah *apartheid* di bidang ekonomi. Misalnya, untuk menopang perlindungan ekonomi dari pekerja kulit putih, dilakukan pemisahan sosial menurut sistem *apartheid*. Para petani kulit putih yang menginginkan persediaan buruh kulit hitam murah dalam jumlah yang besar, mengusahakannya dengan membatasi pekerjaan industri bagi kulit hitam. Dengan kata lain, orang kulit hitam dipakai hanya sebagai buruh murah yang hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, bahkan pemerintah menetapkan berbagai peraturan rasial yang mendiskriminasikan orang-orang kulit hitam sehingga membuat orang Afrika tidak berdaya secara ekonomi. Jadi tidak heran bila melihat tingkat upah yang rendah dan posisi mereka yang kurang bagus dalam pekerjaan. Orang Afrika, selama hampir satu abad telah menjadi penyedia tenaga kerja terbesar dalam tambang-tambang emas dan intan, yang memberi sumbangan kekayaan terbesar bagi pemerintah kulit putih di Afrika Selatan. Semua ini dilakukan dengan tujuan memberikan jaminan bagi kelompok kulit putih untuk mengontrol kehidupan ekonomi di Afrika Selatan dan menguasai seluruh kekayaan sumber daya alamnya.

BAB III

PELAKSANAAN POLITIK *APARTHEID* DI AFRIKA SELATAN

TAHUN 1948 - 1990

Babak baru dalam sejarah Afrika Selatan dimulai dengan pemilihan umum tahun 1948. “Umum” hanya dalam arti bahwa tiga juta orang putih boleh berpartisipasi, tetapi tidak seorang pun dari tiga belas juta orang Afrika. Orang Afrika tidak bisa memberikan suara, tetapi bukan berarti mereka tidak peduli siapa yang akan memenangkan pemilihan umum. Pemilihan umum kulit putih pada tahun 1948 menghadapkan Partai Kesatuan (*United Party*) mewakili kepentingan orang-orang yang berbahasa Inggris, pimpinan Jendral Smuts yang pada saat itu berada pada puncak penghormatan dunia internasional, melawan Partai Nasional (*Nationalist Party*)⁷⁷ mewakili cita-cita politik *Afrikaner* yang baru saja bangkit kembali. Kalau Smuts menempatkan Afrika Selatan di pihak sekutu dalam Perang Dunia II, maka Partai Nasionalis secara tegas menolak mendukung Inggris dan secara terbuka mendukung Nazi Jerman. Kampanye Partai Nasional berpusat pada *swart gevaar* (ancaman hitam) dan mereka berkampanye dengan dua slogan kembar yaitu *Die kaffer op sy plek* (negro di tempatnya) dan *Die koelis uit die land* (para kuli keluar negara ini ; kuli merupakan ucapan penghinaan kepada orang-orang India)⁷⁸.

⁷⁷ Lihat lampiran XII (foto Partai Nasional) hlm. 184.

⁷⁸ Nelson Mandela, *Perjalanan Panjang Menuju kebebasan, Otobiografi Nelson Mandela* (terjemahan), Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1995, hlm.110. Lihat lampiran VIII, (foto Nelson Mandela) hlm. 180.

Kaum Nasionalis dipimpin oleh Dr. Daniel Francois Malan⁷⁹, seorang bekas pendeta Gereja Reformasi Belanda dan editor surat kabar yang sebagian terdorong oleh kegetirannya, getir terhadap orang Inggris yang selama berpuluh-puluh tahun memperlakukan mereka sebagai warga kelas dua, dan kegetirannya terhadap orang Afrika, yang menurut kepercayaan orang Nasionalis mengancam kemakmuran dan kemurnian bangsa *Afrikaans*. Orang Afrika memang tidak mempunyai loyalitas kepada Jendral Smuts tetapi lebih tidak loyal lagi terhadap Partai Nasionalis.

Dasar dari kampanye Malan itu dikenal dengan nama *Apartheid*. *Apartheid* adalah istilah yang baru tetapi gagasan yang kuno. Arti harafiahnya adalah “pemisahan” dan istilah itu mewakili semua undang-undang dan peraturan yang menempatkan orang Afrika ke dalam posisi yang lebih rendah daripada orang putih selama berabad-abad, sehingga menjadi sistem penindasan yang resmi. Hal-hal yang selama ini lebih banyak bersifat *de facto*, tanpa ampun menjadi semakin *de jure*⁸⁰. Selama masa kampanye tahun 1948, ketika kaum Nasionalis yang kemudian turun dari kekuasaan dan mengusulkan kebijakan *apartheid* atau pemisahan total berdasarkan ras, program mereka memiliki daya tarik yang sangat besar bagi orang kulit putih di Afrika Selatan yang merasa takut oleh ancaman terhadap supremasinya atas lebih dari sepuluh juta rekan sewarganegara non putih. Pemisahan yang sering kali kurang tegas akan dikonsolidasi menjadi sistem monolitik (unit organisasi yang mempunyai

⁷⁹ Dr. Daniel Francois Malan adalah salah satu dari beberapa Perdana Menteri di Afrika Selatan yang menjadi pemimpin *apartheid*. Pergantian pemimpin *apartheid* setelah Dr. Daniel Francois Malan dapat dilihat pada lampiran I hlm. 173 .

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 111

kekuatan dan pengaruh yang sangat kuat) yang sangat jahat dalam perinciannya, yang jangkauannya tidak bisa dihindari dan kekuasaannya sungguh luar biasa.

Dasar *apartheid* adalah bahwa orang kulit putih lebih unggul daripada orang Afrika, campuran maupun India, dan bahwa tujuannya adalah untuk menjamin supremasi kulit putih untuk selamanya. Dalam bahasa kaum Nasionalis, “*Die wit man moet altyd baas wees*” yang artinya orang putih selamanya harus memimpin. Kampanye mereka bertumpu pada istilah *baasskap* atau secara harfiah berarti kepemimpinan, sebuah kata yang mempunyai makna yang berat, yang berdiri mewakili supremasi putih dengan seluruh kekejamannya. Kebijakan ini di dukung oleh Gereja Reformasi Belanda yang memberikan kepada *apartheid* landasan agama yang menyatakan bahwa bangsa Afrika adalah bangsa pilihan Allah dan bahwa orang hitam merupakan ras yang bernilai sangat rendah. Dalam pandangan dunia orang Afrika, *apartheid* dan gereja sejalan⁸¹.

Kemenangan pihak Nasionalis dalam pemilihan umum tahun 1948 menandai akhir dari dominasi orang Afrika oleh orang Inggris. Bahasa Inggris kini akan berada di belakang bahasa *Afrikaans*, bahasa yang dikembangkan dari bahasa Belanda. Bahasa itu digunakan oleh keturunan orang-orang *Boer* dan menjadi salah satu di antara dua bahasa resmi di Afrika Selatan. Kemenangan pihak Nasionalis tersebut bukan suatu kebetulan, melainkan hasil situasi Afrika Selatan itu sendiri. Dalam periode agraris, masyarakatnya mengembangkan suatu sistem stratifikasi ekonomi dan sosial berdasarkan ras di mana minoritas kulit putih menduduki tempat teratas dan mayoritas kulit hitam terbawah, sedangkan

⁸¹ Nelson Mandela, *loc.it*

tempat-tempat lain diduduki oleh golongan berwarna dan golongan Asia (India). Ketika kedudukan kulit putih terancam sebagai akibat perkembangan industri, golongan kulit putih berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dan memperkuat kedudukan mereka. Dengan maksud itu, Partai Nasional merumuskan program *apartheid*.

Slogan Partai Nasionalis menggarisbawahi misi mereka : “*Eie volk, eie taal, eie land*” yang artinya bangsa milik sendiri, bahasa milik sendiri, negara milik sendiri. Dalam kosmologi orang Afrika yang cacat, kemenangan nasionalis itu sama dengan perjalanan orang Israel ke Tanah Perjanjian. Kenyataan ini adalah penggenapan janji Allah dan pembenaran kepada pandangan bahwa Afrika Selatan harus menjadi negara untuk orang putih selamanya. Sejak partai Nasionalis berkuasa, Afrika Selatan menjadi negara yang untuk selanjutnya menjadi tempat yang penuh ketegangan dan perselisihan. Pertama kali dalam sejarah Afrika Selatan, sebuah partai eksklusif bangsa Afrika berhasil memegang pemerintahan. Malan dalam pidato kemenangannya mengatakan “sekali lagi bangsa Afrika milik kita”⁸².

Setelah Partai Nasionalis berkuasa, Dr. Daniel Francois Malan mulai mewujudkan programnya. Partai Nasional mulai bergerak secara sistematis untuk memperkuat kedudukannya dalam parlemen dan memperluas kekuasaannya di luar parlemen dengan semakin meningkatkan kekuasaan negara. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut hak-hak politik golongan kulit hitam, berwarna dan Asia, yang telah terbatas, dikurangi dan lambat laun dihapus. Pria kulit hitam

⁸² *Ibid*, hlm. 112.

tidak memiliki hak suara sebagaimana yang dimiliki oleh orang kulit putih dalam memilih anggota parlemen. Mereka tidak akan melakukan pekerjaan yang sama, atau tidak melakukannya secara bersama dan tentu saja tidak mendapatkan upah yang sama. Pada dasarnya mereka akan tinggal dalam kawasan yang berbeda dari orang kulit putih, dan setiap hukum yang bisa dirumuskan untuk memelihara pemisahan ras secara utuh akan diberlakukan dan ditegakkan.

Dr. Daniel Francois Malan, yang menjadi Perdana Menteri dari tahun 1948 sampai 1954 dan yang pada masa jabatannya *apartheid* terbentuk, secara eksplisit menulis “secara teoritis tujuan dari kebijakan *apartheid* bisa dicapai dengan membagi negara itu ke dalam dua bagian, satu bagian dihuni seluruhnya oleh orang kulit putih dan bagian lainnya oleh orang kulit hitam”⁸³. Dalam kenyataannya, secara praktis ungkapan Dr. Daniel Francois Malan tersebut tidak sepenuhnya terlaksana atau dengan kata lain pemisahan tersebut tidak pernah terjadi secara sempurna; pemisahan itu adalah sebuah pengecualian. Buktinya, pria kulit putih tidak bisa bekerja tanpa buruh kulit hitam. Buruh kulit hitam sangat dibutuhkan di pertambangan-pertambangan, perkebunan, toko, pabrik, rel kereta api, pembangunan jalan raya, untuk bekerja di dapur dan sebagai pengasuh anak. Bahkan hampir semua anak-anak kulit putih diasuh oleh pembantu kulit hitam, dan nyonya kulit putih tidak keberatan untuk diantarkan sarapan paginya ke kamar tidur oleh pelayan pria kulit hitam atau menyuruhnya membersihkan barang-barang pribadi miliknya. Penjelasan untuk fakta ini adalah bahwa

⁸³ Tom Hopkinson, *Apartheid In action* dalam History of South Africa, Life Word Library South Africa, 1964, hlm. 2.

meskipun prinsip-prinsip atau teori *apartheid* kelihatannya dilanggar, tetapi slogan *Baasskap*⁸⁴ masih tetap dipertahankan.

Sementara itu, kaum Nasionalis membuat banyak sekali perundang-undangan yang dirancang tidak hanya untuk mewujudkan pemisahan yang lebih besar antar ras tetapi juga untuk membuat orang Afrika lemah secara hukum dan ekonomi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ada tiga hal penting yang perlu digarisbawahi dalam mengembangkan roda pemerintahan pada waktu itu yaitu : Pertama, menekankan perbedaan ras atau rasisme. Kedua, perbedaan ras sebagai faktor utama untuk berpartisipasi dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Ketiga, untuk menghindari pemberontakan dengan orang-orang kulit hitam yang jumlahnya sekitar 83% dari jumlah penduduk, dibentuklah suatu badan kepolisian negara.

Berdasarkan tiga hal penting di atas, maka disusunlah berbagai macam undang-undang diskriminasi rasial oleh kaum Nasionalis yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan rakyat Afrika Selatan., terutama dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan pendidikan.

A. BIDANG PENDIDIKAN

Lingkup lain di mana pemerintah memperkenalkan gagasan-gagasan *apartheid*nya adalah bidang pendidikan. Pendidikan adalah alat penting bagi perkembangan pribadi. Melalui pendidikanlah putri seorang petani bisa menjadi seorang dokter, putra seorang buruh tambang bisa menjadi pimpinan pertambangan dan anak seorang buruh tani bisa menjadi presiden suatu negara.

⁸⁴ *Baasskap* dalam bahasa Afrikaans berarti pertuanan (kata bendanya *baas* yang berarti tuan). Secara harafiah *baasskap* berarti kepemimpinan. Prinsip *Baasskap* sama artinya dengan prinsip tuan-hamba.

Sebelum kedatangan orang kulit putih, pendidikan masyarakat Afrika lebih ditekankan pada aspek-aspek tradisi seperti kisah-kisah perwira, kepahlawanan dan cerita-cerita rakyat. Dalam masyarakat Khoisan dan Bantu, nilai-nilai budaya dan kemahiran hidup merupakan pendidikan penting yang diajari dari satu generasi ke generasi yang lain. Sedangkan dalam masyarakat Nguni, pendidikan untuk wanita dan pria berbeda. Kaum lelaki diajari kemahiran hidup sedangkan kaum wanita diajari kemahiran berumahtangga dan pertanian. Pendidikan tradisi semakin pudar sejak abad ke-19 dan abad ke-20, ketika kaum kulit putih memaksa penduduk kulit hitam untuk keluar dari perkampungan mereka dan bekerja di pabrik dan kawasan industri⁸⁵.

Sejak pergantian abad tersebut, orang Afrika pada umumnya memperoleh pendidikan dari Gereja dan misi asing yang mendirikan dan mensponsori sekolah-sekolah. Pada masa pemerintahan Partai Kesatuan pimpinan Jenderal Smuts, silabus sekolah-sekolah lanjutan Afrika dan silabus sekolah-sekolah kulit putih pada dasarnya sama. Sekolah-sekolah misi memberikan pendidikan bergaya barat berbahasa Inggris kepada orang Afrika. Meskipun silabus antara orang Afrika dan orang kulit putih sama, perbedaan dalam pendanaan membuktikan bahwa pendidikan terhadap orang-orang kulit hitam masih bersifat rasial. Pemerintahan Smuts menghabiskan enam kali lebih banyak dana untuk seorang siswa putih daripada untuk seorang siswa Afrika. Pendidikan untuk orang Afrika tidak bersifat wajib dan hanya gratis selama sekolah dasar saja. Kurang dari setengah anak Afrika pernah mengenyam pendidikan dan sangat sedikit anak Afrika yang

⁸⁵ *Sejarah Pendidikan di Afrika Selatan* dalam http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Pendidikan_Afrika_Selatan

lulus dari sekolah lanjutan. Pendidikan yang sangat minim ini, menurut kaum Nasionalis ternyata terlalu menjijikkan. Kaum *Afrikaans* selalu tidak senang dengan pendidikan untuk orang Afrika. Bagi mereka, pendidikan untuk orang Afrika merupakan suatu pemborosan karena seorang Afrika sudah pada dasarnya tidak mampu dan malas, dan pendidikan apa pun tidak akan mampu mengatasi kenyataan tersebut. Kaum *Afrikaans* sangat menentang orang Afrika mempelajari bahasa Inggris, karena bahasa Inggris bagi orang *Afrikaans* adalah bahasa asing.

Ketika Partai Nasionalis yang didominasi oleh orang-orang Afrikaner berkuasa, segregasi dalam bidang pendidikan mulai diterapkan secara resmi melalui undang-undang. Pada tahun 1953 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Pendidikan Bantu (*Bantu Education Act*), dan langsung mengambil alih kontrol otoritas daerah dan memperkenalkan rencana untuk mewujudkan suatu jenis pendidikan khusus "Afrika" yang dirancang untuk mendidik orang Afrika guna memegang posisi-posisi dalam kehidupan yang akan mereka isi dalam dunia apartheid. Dengan undang-undang tersebut, sekolah-sekolah dasar dan lanjutan yang dioperasikan oleh gereja dan misi diberi pilihan untuk menyerahkan sekolah mereka kepada pemerintah atau subsidi yang setiap tahunnya mereka terima terus menurun atau dengan kata lain, pemerintah mengambil alih pendidikan untuk orang Afrika atau tidak ada pendidikan sama sekali untuk orang Afrika.

Bantu Education Act yang disahkan pada tahun 1953 diciptakan oleh Dr. Hendrik Frensch Verwoerd dan Dr. W. M. Eiselen, dua orang ahli yang pernah belajar di universitas-universitas Jerman dan mengambil ilham dari elemen

falsafah Partai Nasional Sosialis Jerman (*NAZI/Nasional Sozialismus*) yang menekankan pada konsep kemurnian ras atau “*racial purity*”, yang mendasarkan pada keunggulan orang kulit putih dalam segala hal atas orang tidak putih. Konsep ini telah dijadikan rasional untuk membiarkan pendidikan penduduk kulit hitam berada ditahap yang paling rendah. Dr. Hendrik Frensch Verwoerd menyatakan bahwa hubungan rasial antara kulit putih dan kulit hitam tidak akan menjadi lebih baik jika jenis pendidikan yang salah diberikan kepada orang-orang Afrika⁸⁶. “Pendidikan yang salah” yang dimaksud, apabila pendidikan yang diberikan kepada orang-orang Afrika setara dengan pendidikan orang Eropa dan apabila hal itu terjadi, maka hubungan rasial antara keduanya menjadi lebih buruk. Hal itu tidak akan bertambah baik apabila hasil pendidikan Afrika itu ciptaan orang-orang kulit hitam sebagai akibat dari pendidikan yang mereka terima, menumbuhkan harapan-harapan dalam kehidupan yang sayangnya tidak dapat dipenuhi oleh situasi di Afrika Selatan. Terutama sekali, hubungan kebudayaan yang baik tidak akan dapat terjadi apabila pendidikan diberikan di bawah pengendalian orang-orang yang percaya akan persamaan rasial atau dengan kata lain pendidikan orang Afrika harus dirampas dari tangan orang-orang yang mengajarkan persamaan antara orang yang berkulit hitam dan yang berkulit putih. Oleh karena itu, pendidikan orang Afrika harus diawasi sedemikian rupa sehingga sejalan dengan kebijakan negara. Menurut Dr. Hendrik Frensch Verwoerd, tujuan dari Undang-Undang Pendidikan Bantu adalah untuk mengajar anak-anak kulit putih bahwa orang Afrika itu lebih rendah kedudukannya dari orang Eropa.

⁸⁶ Nelson Mandela, *Langkah Menuju Kebebasan, surat-surat dari bawah tanah* (terjemahan), Yayasan Obor, Jakarta, 1993, hlm.43.

Undang-undang pendidikan Bantu merupakan undang-undang yang melambangkan suatu ajaran atau suatu jenis pendidikan rendahan, yang dikenal sebagai pendidikan Bantu, yang direncanakan untuk merendahkan orang Afrika sehingga selalu berada dalam posisi budak yang melayani orang kulit putih selama-lamanya dalam suatu masyarakat yang dipimpin oleh orang-orang kulit putih dan undang-undang tersebut akan berlaku di hampir semua sekolah dasar dan semua sekolah menengah pertama.

Pemerintah menyatakan bahwa undang-undang pendidikan Bantu akan mempersiapkan anak untuk pekerjaan dan lingkungannya di masa depan, dan Dr. Hendrik Frensch Verwoerd yang menjabat sebagai Menteri Urusan Penduduk Pribumi (*Department of Native Affairs*) pada waktu itu memperjelasnya lagi bahwa pendidikan “harus melatih dan mendidik orang sesuai dengan kesempatan mereka dalam kehidupan”⁸⁷. Maksudnya adalah bahwa orang Afrika tidak akan pernah mempunyai kesempatan, jadi mereka tidak perlu mendapat pendidikan. Tidak ada tempat bagi orang Afrika dalam masyarakat Eropa lebih daripada tingkat-tingkat pekerjaan tertentu saja (tidak ada pekerjaan lain bagi orang kulit hitam selain menjadi pekerja buruh). Singkatnya, orang Afrika harus dilatih menjadi pekerja kasar, agar selamanya berada dalam posisi di bawah orang putih. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan, bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 41.

sepenuhnya dari kepribadian manusia, dan memperkuat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi.

Undang-undang Pendidikan Bantu (*Bantu Education Act*) dibentuk untuk mengatur perbedaan cita-cita dan harapan hidup di masa yang akan datang antara orang kulit putih dan kulit hitam. Perbedaan ini diatur sedemikian rupa sehingga silabus dan fasilitas sekolah kulit hitam tidak sama. Bagi pelajar kulit hitam, pendidikan ditekankan pada pendidikan teknik, dilengkapi kerja praktek, dan bahkan pemerintah menerapkan secara paksa agar di sekolah-sekolah kulit hitam, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Afrikaans hal ini berlawanan dengan kulit putih yang memperoleh pendidikan dengan tujuan kerja yang profesional. Hukum kerja untuk kulit putih dirancang sebagai kerja elit dan kerja profesi. Kulit hitam dilatih untuk menjadi tukang kayu, tukang batu, pedagang dan tenaga kerja semi terlatih. Alasan untuk keberadaan kulit hitam, menurut teori pemerintah adalah untuk dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang maksimum bagi negara⁸⁸. Selain itu, semua anak-anak kulit putih baik yang kaya maupun yang miskin mengikuti wajib belajar tanpa biaya dari orangtua mereka. Sedangkan anak-anak Afrika umumnya harus membayar lebih mahal untuk pendidikan mereka dibandingkan dengan orang kulit putih. Menurut angka-angka yang dikeluarkan oleh Lembaga Hubungan Ras Afrika Selatan dalam jurnalnya tahun 1963, kira-kira empat puluh persen dari anak-anak Afrika dalam kelompok umur antara tujuh dan empat belas tahun tidak bersekolah. Bagi mereka yang bersekolah, standarnya sangat jauh berbeda daripada yang diberikan kepada anak-

⁸⁸Education Under Apartheid, The Bantu Education Act dalam http://www.en.wikipedia.org/wiki/Bantu_Education_Act.

anak kulit putih. Pada tahun 1960-1961 pengeluaran pemerintah per capita untuk murid-murid Afrika di sekolah-sekolah yang dibantu pemerintah diperkirakan R 12'46 sedangkan untuk anak-anak kulit putih adalah R 144,57⁸⁹.

Perbedaan pendidikan antara orang kulit putih dan hitam tidak hanya berlaku pada tingkat dasar tetapi juga diterapkan pada tingkat universitas. Pada tahun 1959 disahkan undang-undang Ekstensi Pendidikan Universitas (*Extension to University Education Act*) yang memungkinkan eliminasi bertahap atas mahasiswa non kulit putih dari semua universitas kulit putih. Menurut undang-undang ini, Menteri diberi kekuasaan untuk mendirikan, mempertahankan dan melaksanakan fakultas-fakultas perguruan tinggi bagi orang non kulit putih. Mahasiswa yang diperbolehkan masuk ke universitas ini harus mendapat persetujuan Menteri. Pada tahun 1961, di universitas-universitas kulit putih masih terdapat 258 mahasiswa non kulit putih, tetapi pada tahun 1964 hanya tertinggal 11 mahasiswa. Setiap universitas campuran tidak akan diberi izin lagi untuk menerima mahasiswa baru non Eropa. Dengan demikian, universitas campuran Inggris di Cape Town, Witwatersrand, dan Rhodes terpaksa dikelompokkan bersama-sama dengan universitas-universitas orang Afrika di Pretoria, Potchefstroom, dan Orange Free State yang tertutup bagi orang-orang Afrika⁹⁰.

Tujuan utama dari undang-undang ini adalah memperluas prinsip pendidikan Bantu sampai mencakup perguruan tinggi. Orang-orang non Eropa yang dilatih di universitas-universitas campuran dianggap sebagai ancaman

⁸⁹ Nelson Mandela, *Langkah Menuju Kebebasan, Surat-Surat dari Bawah Tanah* (terjemahan), Yayasan Obor, Jakarta, 1993, hlm. 208.

⁹⁰ Tom Hopkinson, *Apartheid In Action* dalam *History of South Africa*, Life World Library South Africa, 1964, hlm. 91-92.

terhadap kebijakan rasial pemerintah. Persaudaraan dan keharmonisan antar ras yang dibentuk melalui pembauran dan perkumpulan berbagai kelompok rasial di universitas campuran itu merupakan suatu ancaman langsung bagi kebijakan apartheid dan *baasskap* dan undang-undang ini dibuat untuk menghilangkan ancaman itu. Jenis universitas yang dirancang dalam undang-undang itu tidak lebih daripada perguruan kesukuan yang dikendalikan oleh para politisi partai dan berdasarkan ajaran supremasi abadi dari orang kulit putih atas orang kulit hitam. Perguruan-perguruan tinggi seperti itu akan digunakan pemerintah untuk memaksakan ideologi politiknya di tingkat universitas dan indoktrinasilah yang menjadi tujuannya. Pendidikan yang akan diberikan tidak akan diarahkan pada melepaskan potensi keratif yang dimiliki orang, akan tetapi ke arah mempersiapkan mereka bagi perbudakan mental dan spiritual abadi bagi orang putih. Universitas-universitas itu hanya akan diberi izin untuk mengajarkan apa yang benar-benar sesuai dengan kebijakan rasial Pemerintahan Nasionalis. Gelar dan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi ini akan dibenci dan diperolokkan di seluruh negeri dan di luar negeri dan mungkin sekali tidak akan diakui di luar Afrika Selatan. Keputusan pemerintah untuk memperkenalkan pemisahan universitas didorong bukan hanya karena keinginan untuk memisahkan mahasiswa yang bukan Eropa dari mahasiswa Eropa. Implikasinya jauh lebih mendalam, karena undang-undang itu merupakan suatu gerakan untuk menghancurkan tradisi universitas terbuka yang secara universal diakui di seluruh dunia yang berperadaban dan yang sampai sekarang ini merupakan praktek yang

secara konsisten dilakukan oleh universitas-universitas terkemuka di negeri ini bertahun-tahun lamanya.

Seorang mantan Ketua Mahkamah Agung Uni Afrika Selatan, Mr. Van der Sandt Centliver dalam sebuah pidato yang diucapkannya dalam pertemuan di Klub Universitas di Cape Town pada tanggal 11 pebruari 1957 dan dilaporkan dalam *Rand Daily Mail* tanggal 11 pebruari 1957, berkata :

“Saya tidak pernah mengetahui adanya sebuah universitas yang terhormat di dunia luar yang melarang masuk mahasiswa atas dasar warna kulitnya. Universitas-universitas besar di dunia menyambut baik mahasiswa dari negeri lain terlepas dari warna kulit mereka. Mereka menyadari bahwa pandangan yang berbeda yang dibawa mahasiswa ini akan memajukan bidang ilmu pengetahuan dalam hubungan sesama manusia di tingkat internasional dan akan memberikan sahamnya kepada kebudayaan mereka sendiri”⁹¹

Universitas adalah salah satu institusi pendidikan yang berfungsi sebagai pusat penyebarluasan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada semua mahasiswa terlepas dari warna kulit dan kepercayaan mereka. Dalam masyarakat multirasial universitas berfungsi sebagai pusat perkembangan aspek-aspek budaya dan spiritual dari kehidupan rakyat. Dengan adanya undang-undang perguruan Tinggi Terpisah, maka universitas tidak dapat lagi berfungsi sebagai pusat perkembangan aspek-aspek budaya dan spiritual dari keseluruhan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan politik *apartheid* dalam bidang pendidikan dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Pendidikan Bantu yang diterapkan di sekolah tingkat dasar, menengah dan tingkat universitas (*Extension to University Education Act*). Undang-undang

⁹¹ Nelson Mandela, *Langkah Menuju Kebebasan, surat-surat dari bawah tanah* (terjemahan), Yayasan Obor, Jakarta, 1993, hlm.46.

Pendidikan Bantu tersebut dirancang secara khusus untuk orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan. Melalui undang-undang tersebut terjadi diskriminasi dalam bidang pendidikan antara orang kulit hitam dan orang-orang kulit putih. Bagi pelajar kulit hitam, pendidikan ditekankan pada pendidikan teknik, dilengkapi kerja praktek, dan bahkan pemerintah menerapkan secara paksa agar di sekolah-sekolah kulit hitam, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Afrikaans. Kulit hitam dilatih untuk menjadi tukang kayu, tukang batu, pedagang dan tenaga kerja semi terlatih sedangkan pendidikan yang diperoleh anak-anak kulit putih bertujuan agar mereka bisa menjadi tenaga-tenaga yang profesional. Biaya pendidikan yang dibebankan kepada pelajar kulit hitam juga sangat mahal, sehingga banyak di antara mereka yang tidak bersekolah. Dengan demikian, Undang-undang Pendidikan Bantu telah menciptakan suatu kualitas pendidikan yang sangat rendah bagi orang-orang kulit hitam yang mengakibatkan mereka hidup dalam kebodohan. Hal ini merupakan usaha pemerintah untuk merendahkan orang Afrika sehingga selalu berada dalam posisi budak yang melayani orang kulit putih selama-lamanya.

B. BIDANG EKONOMI

Undang-undang lain di mana rakyat Afrika Selatan sangat dirugikan oleh perundang-undangan yang semakin restriktif (bersifat membatasi) sejak tahun 1948, yakni bidang ekonomi. Diskriminasi hukum terhadap orang Afrika sebagai pekerja bukan sesuatu yang baru di Afrika Selatan. Sejak tahun 1926, disahkan sebuah “Undang-Undang Pelarangan Kulit Berwarna” yang menghambat orang Afrika untuk memegang pekerjaan ahli di bidang pertambangan. Tahun 1953

dikeluarkan *Native Labour (Settlement of Disputes Act)* yang menetapkan *Native Labour Office* sebagai penguasa tertinggi dalam penyelesaian sengketa-sengketa industri yang melibatkan tenaga kerja kulit hitam dan melarang pemogokan kulit hitam. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1956, Menteri Tenaga Kerja mendapat wewenang di bawah *Industrial Conciliation Act* (Undang-Undang Konsiliasi Industri) dan *Native Building Workers Act* (1951) untuk menetapkan kelas pekerjaan tertentu bagi kelompok ras tertentu. Sejak undang-undang tersebut berlaku, ditambah dengan prasangka yang sudah berlangsung lama serta regulasi-regulasi (peraturan) serikat kerja, keputusan itu telah berkembang menjadi jaringan restriksi (pembatasan) yang kompleks yang melarang orang Afrika mengerjakan hampir setiap pekerjaan yang diklasifikasikan sebagai “pekerjaan ahli”. Namun, sebagian restriksi ini dibatasi oleh sesuatu yang janggal. Misalnya, seorang Afrika bisa membuat tembok yang akan dicat, tetapi ia tidak bisa mengecatnya kecuali mengecat bangunan di pedesaan atau di salah satu kota yang khusus ditempati orang Afrika. Di wilayah Transvaal seorang pekerja Afrika boleh menyetir truk daging hingga ukuran berat tertentu, tidak boleh lebih (membawa truk bermuatan berat, karena alasan tertentu, merupakan pekerjaan yang dipertunjukkan bagi kaum kulit putih)⁹².

Tujuan yang sama diwujudkan dengan cara lain yakni dengan menciptakan kondisi yang hampir mustahil bagi orang Afrika untuk mengikuti pendidikan sehingga menghalangi mereka mendapatkan berbagai keahlian. Akibatnya, sedikit sekali persentase pekerja ahli di Afrika Selatan yang non kulit

⁹² *Ibid*, hlm. 92.

putih yakni orang Afrika, Kulit Berwarna atau Asia (khusus orang-orang kulit berwarna, masih diperbolehkan melakukan pekerjaan ahli), meskipun kelompok-kelompok ini mempunyai jumlah yang jauh lebih besar dibanding jumlah orang kulit putih yaitu empat berbanding satu. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan upah antara pekerja-pekerja non ahli (tidak terampil) dan pekerja-pekerja ahli (terampil). Para pekerja non ahli mendapat upah yang sangat rendah bila dibandingkan dengan para pekerja ahli. Kondisi inilah yang menyebabkan tidak adanya kemajuan ekonomi bagi orang Afrika.

Di daerah kulit putih, pria kulit hitam hampir-hampir hanya bisa melakukan pekerjaan non ahli atau semi ahli. Di dalam pekerjaan yang ia masuki, ia sama sekali tidak bisa bekerja secara efektif untuk meningkatkan upah atau kondisinya. Sejak tahun 1953 orang Afrika belum diijinkan untuk memasuki serikat perdagangan, suatu cara lebih jauh untuk menghalangi mereka menguasai berbagai keahlian. Undang-undang Konsiliasi Industri tahun 1965 juga melarang pembentukan baru serikat-serikat pekerja campuran putih dan non putih dan dalam serikat-serikat pekerja campuran yang sudah ada, orang-orang non putih dipaksa untuk menyelenggarakan pertemuan terpisah dan hanya orang kulit putih saja yang menempati posisi eksekutif. Selain itu, dalam Undang-Undang Regulasi Tenaga Kerja Pribumi tahun 1911, seorang Afrika dianggap melakukan pelanggaran kriminal bila tidak mematuhi perintah bos atau mandornya atau bahkan bisa keluar dari pekerjaannya. Undang-undang ini, serta masih banyak undang-undang lainnya yang diberlakukan selama beberapa tahun terakhir membuat orang Afrika tidak berdaya secara ekonomi. Jadi, tidak heran bila

melihat tingkat upah yang rendah dan posisi mereka yang kurang bagus dalam pekerjaan.

Orang Afrika, selama hampir satu abad menjadi tenaga kerja terbesar dalam tambang-tambang emas dan intan, yang memberi sumbangan terbesar bagi Afrika Selatan. Namun, pada tahun 1962 rata-rata upah tunai seorang pekerja tambang Afrika hanya sekitar \$207 per tahun dengan makanan, perumahan, perhatian medis, dan pasokan pakaian telah disediakan gratis. Untuk pekerjaan rumah tangga di daerah perkotaan, para pembantu Afrika hanya memperoleh \$16 hingga \$32 per bulan, makanan dan akomodasi disediakan. Sedangkan di daerah-daerah pedalaman, upah masih lebih rendah. Jhon Nkosi, seorang jurnalis Afrika ketika menulis dalam majalah *Star* Johannesburg pada bulan Oktober 1963, memberikan contoh seorang pembantu tua di suatu daerah pedesaan dengan pendapatan \$5.60 sebulan yang meminta kenaikan upah. Setelah pembantu tersebut memperlihatkan semua tanggungjawabnya dalam pekerjaan rumah tangganya dan ketidakcukupan upahnya, majikannya sepakat untuk menambah gajinya \$1.40 sehingga menjadi \$7⁹³.

Kondisi-kondisi di wilayah perkotaan pun tidak jauh lebih baik. Gaji bulanan seorang pekerja Afrika di sebuah industri bangunan di Pretoria rata-rata \$40 pada tahun 1952. Ini berarti bahwa ia hanya menerima antara seperlima dan seperenam dari gaji yang diterima tukang kayu, tukang batu, tukang ledeng, dan tukang cat, yang semuanya merupakan pekerjaan yang diperuntukkan secara khusus bagi orang-orang kulit hitam di kawasan-kawasan putih di kota tersebut.

⁹³ Tom Hopkinson, *loc.it*, hlm. 92.

Gaji orang Afrika tidak hanya rendah, tetapi jika memperhitungkan naiknya biaya hidup, daya belinya pun semakin kecil dan posisinya dibanding pekerja kulit putih semakin buruk. Para propagandis pemerintah Afrika Selatan menyatakan bahwa standar kehidupan orang Afrika di Afrika Selatan adalah yang tertinggi di benua itu. Tetapi para pengkritik menjawab bahwa mengingat fakta Afrika Selatan sejauh ini adalah wilayah terkaya di benua Afrika, sangat aneh bila para pekerja Afrika tidak mendapat keuntungan dari kekayaan negara tersebut, atau dari asosiasi mereka yang sudah lama dengan peradaban barat. Para pengkritik tersebut juga merujuk pada laporan-laporan seperti laporan *The Council For Social And Industrial Research* No.172 dan investigasi yang lebih baru oleh *South African Institute of Race Relations* yang menunjukkan bahwa separuh dari keluarga-keluarga Afrika yang tinggal di pusat-pusat perkotaan hidup di bawah garis kemiskinan, yakni dalam kondisi sangat membutuhkan⁹⁴. Angka-angka medis mendukung temuan-temuan *Council* tersebut. Insiden penyakit gizi buruk di bagian-bagian Afrika Selatan sangat tinggi. Tingkat kematian anak-anak Afrika antara usia satu dan empat tahun, tiga belas kali lebih banyak daripada anak-anak kulit putih pada kelompok usia yang sama.

Pada tahun 1962, petugas medis di Port Elizabeth melaporkan bahwa di Rumah Sakit Livingstone sendiri, rata-rata anak non kulit putih yang meninggal karena gizi buruk setiap bulannya mencapai lima puluh orang. Selama tahun 1962, di antara kasus-kasus tuberkulosis baru yang dilaporkan terdapat 1,261 orang kulit putih dan 53,801 orang Afrika, yang berarti angka kejadiannya 39.6 per 100.000

⁹⁴ Tom Hopkinson, *loc.it*, hlm. 93

bagi orang kulit putih dan 473.6 per 100.000, 12 kali lebih besar bagi orang Afrika. Ketika mengaitkan insiden penyakit dengan kemiskinan dan kondisi perumahan yang buruk, petugas medis di Pretoria mengatakan: “Kondisi ekonomi seperti saat ini memaksa banyak orang bekerja hingga mereka benar-benar mati.”

Bagaimana dengan situasi di daerah luar kota? Para pelancong yang melintasi wilayah-wilayah *reserve*⁹⁵ khususnya daerah Transkei, daerah pertama yang baru saja ditangani oleh Pemerintah bagi penduduk Bantu, akan segera menyaksikan keindahan pemandangan dan penampilan yang baik dari penduduknya, dan publikasi-publikasi yang disponsori pemerintah berbicara dengan penuh semangat tentang “penampilan fisik yang bahagia dari orang-orang yang menikmati kebebasan hidup” dan “kehidupan mereka yang bebas dan damai di gubung-gubuk kecilnya.” Tetapi mereka yang melihat dari dekat akan menjumpai pemandangan yang berbeda. Ketika *Rand Daily Mail* melakukan penelitian pada tahun 1962 terhadap beberapa daerah *reserve* yang dilanda kekeringan, mereka menemukan bahwa insiden pellagra (penyakit kusta) dan penyakit-penyakit defisiensi lainnya semakin meningkat, dan bahwa ratusan penduduk berada dalam ambang kelaparan⁹⁶.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang mendiskriminasikan orang-orang kulit hitam dalam bidang ekonomi mengakibatkan kehidupan ekonomi rakyat Afrika Selatan tidak mengalami kemajuan. Hal ini disebabkan oleh adanya diskriminasi terhadap orang

⁹⁵ *Reserve* adalah daerah-daerah khusus yang disediakan untuk ditempati ras tertentu (dalam konteks apartheid *reserve* adalah daerah-daerah yang khusus ditempati oleh kulit hitam). Lihat lampiran VI, foto 3, hlm. 178.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 93.

kulit hitam yang menetapkan bahwa orang kulit hitam hanya boleh melakukan pekerjaan non terampil atau dengan kata lain mereka hanya dijadikan sebagai pekerja-pekerja kasar misalnya sebagai buruh. Akibatnya, upah yang diperoleh sangat rendah dan tidak cukup untuk membiayai kehidupan mereka. Dengan demikian, kondisi ekonomi seperti ini menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan.

C. BIDANG SOSIAL

1. *The Prohibition of Mixed Marriages Act 1949* (Undang-Undang Larangan Kawin Campur) dan *The Immorality Act tahun 1950* (Undang-Undang Immoralitas).

Tindakan *apartheid* paling awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi kemurnian ras yang dicita-citakan kelompok masyarakat kulit putih yaitu menetapkan Undang-Undang Larangan Perkawinan Campur tahun 1949 dan Amandemen terhadap Undang-Undang Immoralitas tahun 1950. Pada tahun 1949 pemerintah mensahkan Undang-Undang Larangan Kawin Campur (*The Prohibition of Mixed Marriages Act*) yang melarang perkawinan campur antara kulit hitam dan kulit putih. Undang-undang tersebut diikuti oleh undang-undang lain yaitu *The Immorality Act* tahun 1950 (Undang-Undang Immoralitas) yang memperluas larangan yang ada sampai mencakup persetubuhan yang tidak legal antara orang Eropa dan pribumi dan tindakan-tindakan tidak bermoral dan tidak sopan antara orang kulit putih dan semua orang non Eropa⁹⁷, dengan kata lain orang kulit putih tidak boleh mempunyai hubungan sentimental atau seksual

⁹⁷ Cassese Antonio, *Catatan-Catatan Tentang Apartheid* (terjemahan), Jakarta, yayasan Obor, 1994, hlm. 160.

dengan salah satu dari ketiga ras lain (kulit Hitam, Berwarna, atau Asia). Undang-undang ini pada dasarnya menetapkan bahwa hubungan seksual orang kulit putih dengan orang yang berbeda ras dianggap sebagai suatu tindakan kriminal.

Sejak saat itu, orang kulit putih hanya dapat melakukan hubungan seksual secara endogamous (perkawinan yang terjadi di dalam kekerabatan sesama suku; anjuran menikah dengan suku yang sama), seluruhnya terisolasi dari kelompok manusia yang lain. Dengan demikian didirikanlah dinding-dinding yang tidak dapat ditembus yang mencegah kemungkinan terjadi pembauran dan integrasi, sekurang-kurangnya antara orang kulit putih dan kelompok-kelompok rasial lain.

2. *The Population Registration Act 1950* (Undang-Undang Pendaftaran Penduduk)

Di tahun 1950 ada dua Undang-Undang penting yang dibuat untuk menciptakan segregasi di tingkat perkotaan yaitu *Population Registration Act* (Undang-Undang Pendaftaran Penduduk) dan *Group Areas Act* (Undang-Undang Area Kelompok)⁹⁸. Undang-undang Pendaftaran Penduduk mengklasifikasi penduduk ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan ras. Ada tiga kelompok yang teridentifikasi yaitu : orang kulit putih, orang kulit hitam dan orang kulit berwarna. Kelompok kulit berwarna dipilah lagi menjadi beberapa kelompok kecil yaitu etnis Melayu, India, China dan kelompok kulit berwarna yang lain.

Kalau sebelumnya pengelompokan tersebut belum diatur secara resmi, maka kini ras menjadi faktor utama dalam masyarakat Afrika Selatan. Karena telah terjadi percampuran selama ratusan tahun, tidak semua orang memiliki

⁹⁸ A.J.Christopher, *The Atlas of Apartheid*, New York, Routledge, hlm. 25.

golongan ras yang jelas. Untuk keperluan itu sebuah badan khusus dibentuk untuk menangani kasus pecampuran seperti itu yaitu “dewan penggolongan ras”. Kriteria yang dipakai oleh dewan penggolongan ras dalam mengklasifikasi penduduk didasarkan pada kenampakan fisik. Misalnya, sebuah pensil seperti sisir ditusukkan menembus ke rambut orang yang diperiksa untuk menentukan seberapa “keriting” rambutnya. Semakin keriting rambut seseorang maka makin “berwarna” pula kulitnya. Begitulah anggapan mereka. Kuku jari juga diperiksa karena dipercaya dapat memperlihatkan seberapa “berwarnanya” kulit seseorang⁹⁹. Secara umum pengelompokkan penduduk berdasarkan rasnya diterapkan dengan tujuan untuk mencegah orang luar masuk ke dalam kelompok orang kulit putih.

Tes-tes yang tidak wajib (misalnya tes tipe rambut, warna kulit/kenampakan fisik) yang memisahkan Hitam dari Campuran dan Campuran dari Putih, sering menghasilkan kasus tragis ketika anggota keluarga yang sama diklasifikasikan secara berbeda, semuanya berdasarkan apakah anak-anak mempunyai warna kulit lebih gelap atau lebih terang. Tempat seseorang akan diizinkan tinggal atau bekerja bisa ditentukan oleh perbedaan menggelikan seperti warna rambut seseorang atau ukuran bibirnya. Selain itu, keluarga-keluarga pun mulai terpecah, karena banyak keluarga terbagi dua ketika anak-anak dari orangtua yang sama dimasukkan dalam klasifikasi yang berbeda, misalnya seseorang digolongkan kulit putih sedangkan saudara kandungnya dinyatakan

⁹⁹ Benjamin Poground, *Nelson Mandela, Pemimpin Afrika Selatan yang Dipenjara Selama 27 tahun Karena Menentang Apartheid* (terjemahan), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 37.

sebagai kulit berwarna. Akibatnya anggota dari keluarga yang sama, tidak mungkin tinggal di bawah satu atap.

Undang-undang ini juga memungkinkan pengelompokkan ulang ketika deskripsi-deskripsi yang ada tidak tepat lagi. Di akhir dekade 80-an sebanyak seribu orang setiap tahunnya menginginkan pengelompokkan ulang untuk menjadi orang kulit berwarna (daripada menjadi orang kulit hitam) atau menjadi orang kulit putih (daripada orang kulit berwarna). Antara tahun 1983-1990 ada tujuh ribu orang yang deskripsi rasnya berubah. Selama itu, hanya 120 orang berubah status rasnya menjadi orang kulit hitam, dan sekitar 3561 orang berubah menjadi orang kulit putih¹⁰⁰. Perubahan klasifikasi ras tersebut terjadi karena telah terjadi campuran dan tidak semua orang memiliki golongan ras yang jelas.

3. *Group Areas Act 1950* (Undang-Undang Wilayah Kelompok)

Group Areas Act adalah Undang-Undang Wilayah Kelompok yang menetapkan area atau wilayah tempat tinggal bagi masing-masing golongan rasial di Afrika Selatan. Berdasarkan undang-undang ini banyak orang kulit hitam yang sejauh itu tinggal di daerah kulit putih harus menjual miliknya dan pindah ke wilayah yang khusus diperuntukkan bagi mereka. Selanjutnya ditetapkan bahwa orang kulit hitam tidak boleh tinggal di daerah perkotaan kulit putih lebih dari tujuh puluh dua jam tanpa izin dari *Native Labour Office* dan bahwa orang kulit hitam memerlukan izin untuk meninggalkan daerahnya dan memasuki perkotaan. Undang-undang ini memperkuat *Natives Lands Act* (Undang-Undang Tanah Pribumi) tahun 1913 dan *Natives (Urban Areas Constitution) Act* tahun 1945

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.103-104.

yang melarang orang kulit hitam memiliki atau membeli tanah di daerah perkotaan¹⁰¹. *Group Areas Act* menurut Menteri Dalam Negeri Dr. T. F. Donges merupakan salah satu cara penting untuk mempertahankan supremasi Kulit Putih di Afrika Selatan. Konsepnya adalah membagi tanah di mana kulit hitam dan kulit putih mempunyai pemukiman atau tempat tinggal yang terpisah, khususnya di daerah perkotaan¹⁰². Kota-kota harus dibagi ke dalam beberapa daerah kelompok yang eksklusif. Orang yang tidak termasuk dalam kelompok yang bersangkutan akan dipaksa untuk keluar daerah tersebut dan tinggal di daerah lain yang telah diperuntukkan baginya. Di bawah aturan undang-undang tersebut setiap kelompok rasial hanya bisa memiliki tanah, tinggal dan berdagang di daerahnya sendiri. Orang-orang India hanya boleh tinggal di daerah India, orang Afrika hanya boleh tinggal di daerah Afrika dan orang berdarah Campuran hanya boleh tinggal di daerah Campuran. Kalau orang Putih menginginkan tanah atau rumah kelompok lainnya, mereka dengan mudah mengatakan bahwa tanah itu sebagai milik kulit putih dan mengambilnya. Jadi, targetnya adalah segregasi total di daerah perkotaan, bukan segregasi setengah-setengah seperti pada masa kolonial dan akibat dari segregasi total tersebut kontak sosial antara komunitas akan berkurang.

Penerapan Undang-undang Area Kelompok mengakibatkan terjadinya penggusuran secara paksa atau pemindahan yang tak terelakkan atas ribuan keluarga non kulit putih yang tadinya tinggal di daerah-daerah yang sekarang diperuntukkan bagi orang kulit putih. Masyarakat Afrika yang berada di daerah yang baru saja dinyatakan khusus untuk kulit putih saja, segera digusur dan

¹⁰¹ Kirdi Dipoyudo, *Masalah Rasial di Afrika Selatan*, 1978, CSIS, Analisa, Volume VIII-2.

¹⁰² A.J. Christopher, *loc.it*, hlm. 106.

dipindahkan dengan paksa karena pemilik tanah di sekitarnya tidak ingin orang Afrika tinggal di dekat mereka atau hanya karena mereka ingin mendapatkan tanah itu.

Pengusuran atas ribuan orang non kulit putih terjadi di sebuah kota yang bernama Sophiatown, empat mil di sebelah barat dari Johannesburg. Sophiatown merupakan bagian dari daerah yang dikenal dengan nama *Western Area Township*, selain Martindale dan Newclare. Daerah ini sebetulnya diperuntukkan bagi orang putih dan seorang *developer* (ahli pembangunan) pernah membangun rumah-rumah yang diperuntukkan bagi pembeli kulit putih. Tetapi karena kehadiran suatu pembuangan sampah di dekatnya, orang putih menolak tinggal di sini. Akhirnya *developer* itu terpaksa menjual rumah-rumah itu ke orang-orang Afrika. Sophiatown adalah salah satu dari beberapa lokasi, tempat di mana orang Afrika boleh membeli tanah sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkotaan tahun 1923. Dengan berkembangnya industri di Johannesburg, Sophiatown menjadi tempat tinggal bagi penduduk Afrika yang jumlahnya semakin berkembang. Pada tahun 1953, Pemerintah Nasionalis menggusur Sophiatown, Martindale, dan Newclare, dengan penduduk sebanyak 60.000 hingga 100.000 jiwa. Pemerintah Nasionalis membeli sebidang tanah bernama Meadolands, sejauh tiga belas mil dari Sophiatown. Penduduk akan dipindahkan ke Meadolands ke dalam tujuh kelompok etnis yang berbeda. Alasan pemerintah melakukan pengusuran adalah pembersihan daerah kumuh, sebagai topeng tujuan pemerintah sesungguhnya yang menganggap seluruh daerah perkotaan sebagai daerah kulit putih, tempat orang Afrika hanya boleh berstatus sebagai

pendatang sementara. Orang Afrika sudah lama tinggal di Sophiatown selama lebih dari lima puluh tahun, tetapi pemerintah dengan kejamnya memindahkan semua penghuni Sophiatown yang berkulit hitam ke kota yang lain yaitu Meadolands¹⁰³.

Pengusuran massal ini mempunyai keuntungan sampingan. Sejak tahun 1948, sebelum dilakukannya pengusuran Pemerintah Nasionalis telah membangun atau memberi subsidi bagi banyak pembangunan perumahan bagi orang-orang Afrika. Daerah-daerah perkotaan yang kumuh telah disingkirkan dalam skala yang cukup besar, meski sejumlah lokasi kumuh yang mengerikan masih ada. Antara tahun 1948 dan 1960 pemerintah memberikan pinjaman kepada pihak berwenang di daerah yang memungkinkan mereka bisa membangun lebih dari seratus ribu rumah bagi tiga perempat juta penduduk.

Tindakan tersebut sebenarnya mempunyai manfaat yang besar, tetapi sayang tindakan tersebut menjadi tidak bermanfaat karena keputusan pemerintah yang menyatakan bahwa semua orang Afrika yang berada di luar daerah-daerah *reserve* (daerah-daerah khusus yang disediakan untuk ditempati ras tertentu, untuk kulit hitam atau untuk kulit putih) hanya dianggap sebagai “migran temporer”, yang keberadaannya semata-mata tergantung pada apakah mereka masih bisa dimanfaatkan atau dibutuhkan oleh orang kulit putih atau tidak.

4. *Pass Law Act* 1952 (Undang-Undang Pas Jalan/Kartu Tanda Pengenal)

Pass Law Act atau Undang-Undang Pas Jalan yang disahkan pada tahun 1952, dirancang untuk membatasi kebebasan pergerakan orang Afrika. Prinsip

¹⁰³ Nelson Mandela, *Perjalanan Panjang Menuju Kebebasan, Otobiografi Nelson Mandela* (terjemahan), Jakarta, Bina Rupa Aksara, hlm. 153-154.

dasarnya adalah bahwa semua orang Afrika dewasa (termasuk wanita) yang berumur di atas 16 tahun harus memiliki “*passbook*”¹⁰⁴. *Passbook* (buku pas/pas jalan) adalah sebuah buku kecil yang bentuknya mirip paspor, tetapi lembarannya lebih banyak disertai dengan informasi yang luas (memuat data-data yang terkait dari pemegangnya) bila dibanding dengan paspor normal. Di setiap lembar “*passbook*” akan tertera cap jari, foto, data pribadi, keterangan mengenai di mana pemilikinya diizinkan tinggal dan bekerja, kualifikasi pekerjaan atau pencari kerja dalam suatu daerah, laporan ketenagakerjaan dan tingkah laku kerja. Bila seseorang pekerja tidak menyenangi majikannya, dan mereka menolak untuk mengesahkan *passbook* pada saat yang sama maka hak pekerja untuk tinggal di daerah tersebut akan terancam. Berdasarkan *pass law* (undang-undang pas jalan), pejabat pemerintahan memiliki kekuatan untuk menolak tenaga kerja di suatu daerah dengan cara menolak untuk mengesahkan *passbook* yang dimilikinya. Cara ini dikenal dengan nama “*endorsing out*” dan dapat dilaksanakan kapan saja dan untuk alasan apa saja. Pihak kepolisian tidak perlu memberikan penjelasan apa pun untuk tindakannya tersebut. Anggota keluarga dari pekerja yang mendapatkan “*endorsing out*” akan kehilangan haknya untuk tetap tinggal di daerahnya, khususnya daerah perkotaan tempat di mana ia bekerja¹⁰⁵.

Passbook (buku pas/pas jalan) tersebut harus dibawa setiap saat, di mana dan kapan saja dan diperlihatkan setiap kali diminta oleh polisi atau petugas pemerintah. Setiap polisi berhak menghentikan orang kulit hitam di mana saja untuk memeriksa *pass* jalan ini. Jika terbukti tidak memiliki *passbook* atau lupa

¹⁰⁴ Contoh *Passbook*, lihat lampiran V(foto 1 dan 2) hlm.177.

¹⁰⁵ Tom Hopkinson, *Apartheid In Action* dalam *History of South Africa*, 1964, Life World Library South Africa, hlm. 93-94.

membawanya atau hilang atau dicuri maka terancam akan ditangkap dan dipenjara. Tujuan utama dari undang-undang pas jalan adalah untuk mengendalikan masuknya orang Afrika ke daerah-daerah perkotaan, tujuan kedua adalah untuk menghalangi setiap orang Afrika meninggalkan pekerjaannya dan untuk memudahkan pelacakan tindakan-tindakan kejahatan. Bagi orang kulit hitam, pas jalan ini adalah tanda perbudakan terhadap mereka. Hanya orang kulit hitamlah yang harus memiliki pas jalan seperti ini dan hanya mereka pula yang dapat ditangkap jika tidak dapat menunjukkannya pada saat pemeriksaan. Akibat yang ditimbulkan oleh undang-undang pas, yang didukung oleh perundang-undangan tambahan yang disahkan pada tahun 1964 adalah semakin sulitnya orang Afrika membangun tempat tinggal permanen di daerah perkotaan. Banyak wanita, anak-anak, telah dikirim keluar kota, dan masih banyak lagi hingga ribuan wanita telah ditolak permohonannya untuk menemani suami mereka di kota. Undang-undang Pas Jalan sangat dibenci oleh orang Afrika, dan dari sudut pandang ekonomi undang-undang itu mempunyai dampak negatif yaitu menciptakan suatu hambatan serius bagi pergerakan tenaga kerja yang bebas dan semakin menghambat pembentukan tenaga kerja yang mapan dan bertanggungjawab. Selain itu, dengan mengurangi hak pekerja untuk tetap tinggal di suatu daerah perkotaan, dengan membuat ijin tinggalnya tergantung pada apakah tenaganya masih dibutuhkan oleh orang kulit putih atau tidak, dan dengan memberikan berbagai macam hambatan baginya untuk mendirikan rumah dan mengumpulkan keluarganya, tindakan tersebut benar-benar menambah

ketidaknyamanan dan kegelisahan yang tak pernah berakhir bagi kehidupan orang Afrika Selatan di perkotaan.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pemerintah Afrika Selatan berusaha untuk membatasi interaksi sosial antara orang-orang kulit putih dan orang-orang kulit hitam dengan menetapkan berbagai macam undang-undang segregasi rasial dalam bidang sosial. *The Prohibition of Mixed Marriages Act* 1949 (Undang-Undang Larangan Kawin Campur) dan *The Immorality Act* tahun 1950 (Undang-Undang Immoralitas) dibuat untuk menjaga kemurnian ras “putih” di Afrika Selatan dengan melarang perkawinan campur antara kulit hitam dan kulit putih. *The Population Registration Act* 1950 (Undang-Undang Pendaftaran Penduduk) dibuat untuk mengklasifikasi penduduk ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan ras/warna kulit dan berdasarkan kriteria tersebut seseorang akan diidentifikasi dalam kelompok Putih, Hitam atau berwarna. *Group Areas Act* (Undang-Undang Wilayah Kelompok) bertujuan untuk menciptakan pemukiman yang terpisah antara kulit putih dan non kulit putih atau dengan kata lain, kelompok rasial non kulit putih akan dipaksa untuk tinggal di wilayah teritorial yang berbeda dari orang kulit putih. *Pass Law Act* 1952 (Undang-Undang Pas Jalan/kartu Tanda pengenal) mengharuskan orang kulit hitam untuk membawa sebuah dokumen identitas yang disebut *pass book* yang harus dibawa ke manapun ia pergi untuk menunjukkan di mana ia tinggal dan bekerja. Dengan demikian, semua undang-undang tersebut selain untuk membatasi interaksi sosial dan integrasi ras juga digunakan oleh pemerintah sebagai sarana untuk mengontrol kehidupan sosial di Afrika Selatan.

D. BIDANG POLITIK

1. *Bantu Authorities Act 1951 (Undang-Undang Otoritas Bantu)*

Dalam bidang politik, pemerintah memberlakukan dua Undang-undang yang secara langsung menyerang hak-hak politik orang Campuran dan orang-orang Afrika, yaitu Undang-Undang Perwakilan Pemilihan Terpisah (*Separate Representation of Voters Act*) dan Undang-Undang Otoritas Bantu (*Bantu Authorities Act*). Undang-Undang Perwakilan Pemilihan Terpisah berusaha memindahkan orang Campuran di Cape Town ke dalam daftar pemilih yang berbeda, dengan demikian mengurangi hak-hak perwakilan yang telah mereka nikmati selama lebih dari seratus tahun¹⁰⁶. Undang-Undang Otoritas Bantu menghapus Dewan Perwakilan Rakyat Pribumi dan sebagai gantinya menetapkan pembentukan pemerintahan suku, regional dan teritorial di negeri-negeri Bantu, dan fungsi-fungsi administratif, eksekutif dan kehakimannya yang disebut *Bantustan* atau *Homelands*¹⁰⁷.

Undang-undang Otoritas Bantu diciptakan oleh Dr. Hendrik Frensch Verwoerd, Menteri Urusan Penduduk Asli, sebagai cara untuk menghentikan kritik internasional kepada kebijaksanaan pemerintah Afrika Selatan yang rasial, tetapi sekaligus untuk memberikan status resmi kepada apartheid. Undang-undang tersebut berisi rencana pengembangan daerah-daerah yang dinamakan Area Bantu atau Bantustan yang khusus ditempati oleh orang kulit hitam. Bantustan juga disebut suaka, yaitu daerah-daerah terpisah atau *homeland* (tanah air) tersendiri bagi semua orang Afrika. *Homeland* adalah negara bagian yang independen dan

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 190.

¹⁰⁷ Lihat lampiran XVI (Peta *Homelands*) hlm. 188.

menjadi dasar pemerintah kesukuan di kalangan orang Afrika. Setiap orang Afrika diberi oleh pemerintah sebuah *homeland* sesuai dengan kesukuannya. Tujuan pembentukan *homeland* adalah untuk memaksa orang-orang Afrika agar mereka tetap menegakkan loyalitasnya kepada *homeland* yang dihormatinya, dengan melepas kewarganegaraan Afrika Selatannya. Akibatnya, orang Afrika harus memerlukan paspor (disebut *pass*) untuk masuk ke daerah lain. Dengan demikian orang kulit hitam menjadi orang asing di negerinya sendiri. Secara ekonomis tujuan pemerintah menciptakan *homeland* adalah untuk menjadikan daerah-daerah Afrika sebagai cadangan tenaga kerja murah untuk industri kulit putih. Dengan kapasitas bukan sebagai warga negara, orang kulit hitam bekerja di Afrika Selatan hanya sebagai pekerja temporer saja dengan mengantongi izin kerja tertentu. Pada saat yang sama tujuan tersebut pemerintah adalah untuk menciptakan kelas menengah Afrika agar mengurangi daya tarik *African National Congress* (Kongres Nasional Afrika)¹⁰⁸ dan perjuangan kebebasan.

Dr. Hendrik Frensch Verwoerd mengatakan bahwa melalui sistem Bantustan tersebut orang Afrika harus berdiri di atas kaki mereka sendiri di suka-suka itu, tempat mereka akan berkembang sesuai dengan garis kehidupan mereka sendiri. Gagasannya adalah mempertahankan status quo bahwa tiga juta orang putih memiliki delapan puluh tujuh persen tanah dan memindahkan delapan juta orang Afrika ke tiga belas persen dari luas tanah yang tersisa. Diciptakannya Bantustan merupakan suatu upaya untuk menumpulkan ujung nasionalisme Afrika

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 191.

yang tajam dengan jalan menggalakkan perbedaan-perbedaan kesukuan di daerah-daerah penampungan yang telah disegregasikan.

Undang-undang Otoritas Bantu dimulai dengan menghapus Dewan Perwakilan Penduduk Asli di Parlemen dan di Dewan Propinsi Cape, satu-satunya forum perwakilan tidak langsung bagi orang Afrika dan menggantinya dengan sistem hirarkis para kepala suku yang diangkat oleh pemerintah. Selanjutnya, penduduk Afrika Selatan dibagi ke dalam delapan unit etnis Bantustan yaitu Sotho Utara dan Selatan, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, dan Zulu¹⁰⁹. Delapan etnis tersebut akan mengalami perkembangan secara berangsur-angsur ke arah pemerintahan sendiri di bawah pimpinan kepala suku dari masing-masing etnis. Gagasannya adalah mengembalikan kekuasaan ke tangan para pemimpin etnis yang pada umumnya bersikap tradisional dan konservatif, dan untuk meningkatkan kembali perbedaan etnis yang mulai berkurang. Dengan kata lain, melalui Undang-Undang Otoritas Bantu rakyat Afrika Selatan dipecah-pecah menjadi unit-unit kesukuan yang kecil, yang masing-masing terisolasi dengan yang lain, untuk mencegah timbul dan berkembangnya kesadaran nasional di kalangan mereka dan untuk menggalakkan pandangan kesukuan yang sempit dan terisolasi.

Tindakan ini digambarkan oleh Dr. Hendrik Frensch Verwoerd sebagai suatu 'langkah yang luar biasa positifnya' ke arah menempatkan orang-orang Afrika 'di jalan pemerintahan sendiri'. Mr. De Wet Nel, Menteri Urusan Bantu

¹⁰⁹ Delapan etnis tersebut ditempatkan di masing-masing *homeland*. Etnik **Zulu** ditempatkan di daerah **Kwazulu**, etnik **Xhosa** (**Transkei**, **Ciskei**), etnik **Tswana** (**Bophuthatswana**), **Sotho Utara** (**Lebowa**), **Sotho Selatan** (**Qwaqwa**), **Vhavenda** (**Venda**) dan etnik **Swazi** di **Kangwane**. Penempatan etnis-etnis tersebut di *homeland*nya masing-masing dapat dilihat pada Lampiran XVI : Peta *homelands* di Afrika Selatan, hlm. 188

mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di Area Bantu secara berangsur-angsur akan diberi kekuasaan yang lebih besar untuk memerintah sendiri. Menurut pemerintah, Undang-Undang Otoritas Bantu memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut ¹¹⁰ :

- pengakuan terhadap Unit Nasional Bantu dan mengangkat Komisaris Jenderal yang tugasnya memberikan bimbingan dan nasihat kepada unit-unit untuk meningkatkan perkembangan umum mereka, dengan petunjuk khusus pada bidang administrasi.
- menghubungkan orang-orang Afrika yang bekerja di daerah-daerah perkotaan dengan pihak penguasa teritorial yang dibangun berdasarkan Undang-Undang Otoritas Bantu, yang memberikan kekuasaan kepada otoritas Bantu untuk menunjuk beberapa orang sebagai wakil mereka di daerah perkotaan.
- dihapuskannya perwakilan orang Afrika (berkulit putih) dalam badan-badan pemerintahan Eropa yang tertinggi.
- mendidik orang Afrika untuk memahami secara mendalam masalah-masalah tanah dan pertanian sehingga semua hak dan pertanggungjawaban mengenai tanah di daerah-daerah orang Afrika dapat diberikan kepada mereka. Dalam hal ini termasuk digantikannya secara berangsur-angsur para pejabat pertanian Eropa dalam segala tingkat oleh orang-orang Afrika yang kompeten dan memenuhi syarat.

¹¹⁰ Nelson Mandela, *Langkah Menuju Kebebasan, Surat-Surat dari bawah Tanah* (terjemahan), Yayasan Obor, Jakarta, 1993, hlm. 69-70.

- meningkatkan secara sistematis suatu ekonomi yang beragam di daerah-daerah orang Afrika yang dapat diterima oleh orang-orang Afrika itu sendiri dan dikembangkan oleh mereka sendiri.

“Pemerintahan Sendiri” yang dijanjikan oleh pemerintah terhadap delapan unit etnis Bantustan, bertentangan dengan prinsip menentukan nasib sendiri karena tidak memiliki dua unsur utama dari pemerintahan sendiri yaitu demokrasi dan kedaulatan. Kedua unsur tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang Otoritas Bantu. Unit Nasional Bantu itu pada akhirnya akan diperintah oleh komisaris Jenderal yang ditunjuk oleh Pemerintahan Bantu, dan diperintah oleh para pejabat Departemen Urusan Bantu yang dikuasainya. Ketika pemerintah mengatakan bahwa delapan unit etnis Bantustan tersebut secara berangsur-angsur akan diberi pemerintahan sendiri, maka yang dimaksudkannya hanyalah bahwa lebih banyak kekuasaan di masa depan akan dilakukan oleh dewan-dewan yang terdiri dari kepala suku dan pemuka yang diangkat. Tidak ada persyaratan yang dibuat untuk pemilihan umum. Kaum Nasionalis mengatakan bahwa kepala suku itulah yang merupakan ‘tradisi Bantu’, bukan badan legislatif yang dipilih.

Jadi, otoritas Bantu yang diusulkan itu tidak akan dapat menjadi representatif atau demokratis. Tidak ada kedaulatan, otonomi dan tidak ada pemerintahan sendiri. Tidak ada apa-apa selain dari penipuan yang kasar dan kosong, untuk menyesatkan rakyat dan agar dapat berfungsi sebagai suatu alasan untuk lebih memperbanyak lagi kesukaran dan ketidakadilan terhadap rakyat Afrika Selatan. Secara politik, pembicaraan tentang pemerintahan sendiri bagi delapan unit etnis Bantustan (tanah air terpisah) tersebut merupakan suatu tipu

muslihat belaka. 'Pemerintahan sendiri' sebagai suatu langkah yang luar biasa positifnya', seperti yang dikatakan oleh Dr. Hendrik Frensch Verwoerd, sama saja dengan skema-skema apartheid yang lain yaitu hanya suatu kebohongan tingkat tinggi untuk menutup-nutupi suatu kebijakan penindasan yang kejam terhadap orang bukan kulit putih dan untuk mendukung hak-hak istimewa yang tidak beralasan dari golongan minoritas kulit putih. Sedangkan secara ekonomi, pembicaraan tentang pemerintahan sendiri bagi delapan unit etnis Bantustan juga merupakan suatu kemustahilan. Daerah Bantustan merupakan daerah yang padat penduduk dan penuh penderitaan, yang sama sekali tidak mampu menghidupi penduduknya. Tiga belas persen tanah yang ditempati oleh rakyat Afrika Selatan tidak mungkin menghidupi delapan puluh persen penduduk Afrika Selatan. Pemerintah Nasionalis di Afrika Selatan pun sama sekali tidak mempunyai niat untuk menciptakan daerah-daerah Afrika Selatan yang benar-benar berswasembada, karena hal tersebut bisa menciptakan kemungkinan bagi pemerintahan sendiri yang sesungguhnya.

Dengan demikian, di balik kata yang indah tentang 'pemerintahan sendiri' itu, terdapat sebuah rencana yang menyeramkan. Dihapuskannya perwakilan Afrika di parlemen dan Dewan Propinsi Cape membuktikan bahwa tujuan yang sesungguhnya dari rencana itu bukanlah memberikan otonomi bagi orang-orang Afrika Selatan akan tetapi menjadikan mereka tidak memiliki hak untuk bersuara tentang apa pun juga mengenai pemerintahan di Afrika Selatan dan sebagai gantinya merupakan suatu sistem pemerintahan setempat yang dikuasai oleh seorang Menteri yang tidak bertanggungjawab kepada mereka akan tetapi

kepada sebuah Parlemen di mana mereka tidak memiliki suara. Ini bukanlah otonomi tetapi otokrasi (kekuasaan yang tak terbatas).

Di samping itu, berdasarkan tujuan-tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Otoritas Bantu maka akan diambil langkah-langkah untuk menghubungkan orang-orang Afrika Selatan yang bekerja di perkotaan dengan orang-orang yang ada di daerah Bantustan dengan jalan memberikan kekuasaan kepada pihak Bantustan untuk menunjuk beberapa orang sebagai wakil mereka di daerah perkotaan. Pada hakikatnya ini berarti bahwa akan dilakukan upaya-upaya untuk menempatkan orang-orang Afrika Selatan di kota-kota di bawah pengawasan kepala-kepala suku mereka.

Dalam Undang-Undang Otoritas Bantu atau dalam berbagai pernyataan yang berhubungan dengan pembentukan otoritas Bantu itu sama sekali tidak ada persyaratan tentang pemilihan umum yang demokratis. Berdasarkan fakta-fakta ini, tidak masuk akal untuk berbicara mengenai Afrika Selatan yang akan melakukan 'langkah positif yang hebat ke arah menempatkan orang Afrika Selatan di jalan yang menuju ke arah pemerintahan sendiri', atau bahwa mereka itu telah diberi lebih banyak kekuasaan untuk memerintah diri sendiri. Seperti dikemukakan oleh Dr. Eiselen dengan jelas sekali dalam makalahnya *Optima*, bahwa didirikannya Bantustan itu sama sekali tidak akan mempengaruhi supremasi kulit putih, karena bahkan di daerah Bantustan itu orang kulit putih akan tetap memiliki supremasi¹¹¹. Bantustan itu tidak dimaksudkan untuk menyuarakan aspirasi rakyat Afrika, tetapi hanyalah alat untuk merendahkan

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 80.

mereka. Di bawah alasan berpura-pura memberikan pemerintahan sendiri kepada rakyat Afrika Selatan, maka pada hakikatnya mereka itu dibagi-bagi kepada unit-unit kesukuan agar pertumbuhan dan perkembangan mereka menuju kebangsaan yang sesungguhnya dapat dihalangi. Undang-undang di atas menggarisbawahi etos pemerintahan Nasionalis, yang pura-pura mempertahankan hal-hal yang sebetulnya ingin mereka hancurkan. Undang-undang yang menghapus hak orang-orang pasti akan mereka gambarkan sebagai undang-undang yang bertujuan mengembalikan hak-hak tersebut. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa dalam bidang politik pemerintah menetapkan Undang-Undang Otoritas Bantu (*Bantu Authorities Act*) dengan tujuan untuk menciptakan *independent homelands* (pemerintahan sendiri) bagi orang kulit hitam berdasarkan kesukuannya. Melalui Undang-Undang Otoritas Bantu rakyat Afrika Selatan dipecah-pecah menjadi unit-unit kesukuan yang dipimpin oleh kepala sukunya masing-masing atau dengan kata lain delapan etnis yang ada di Afrika Selatan akan mengalami perkembangan secara berangsur-angsur ke arah pemerintahan sendiri (*homelands*) di bawah pimpinan kepala suku dari masing-masing etnis. Akibatnya, kekuasaan politik menjadi monopoli kulit putih sedangkan aspirasi-aspirasi politik rakyat Afrika Selatan disalurkan dengan mengembangkan struktur-struktur kekuasaan di wilayah *homelands* masing-masing suku dengan tidak membahayakan kedudukan istimewa minoritas kulit putih. Gagasan *independent homelands* itu tidak lain adalah tipudaya untuk menggiring orang hitam agar mereka terisolasi, yang selanjutnya membelenggu mereka dalam ketergantungan sepenuhnya pada kekuasaan rezim Afrika Selatan.

Demikianlah berbagai peraturan rasial yang dibuat oleh pemerintah melalui Undang-Undang yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan rakyat di Afrika Selatan. Menurut Cassese Antonio berbagai daftar perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan di atas, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan politik dengan jelas memperlihatkan apa artinya sistem segregasi itu dan alangkah bertentangnya dengan setiap prinsip etika. Ada tiga pengamatan yang diajukan oleh Cassese Antonio berkaitan dengan berbagai perundang-undangan tersebut.

Pengamatan pertama mengenai *kandungan perundang-undangan itu*. Banyak pemimpin Afrika Selatan mempertahankan berbagai perundang-undangan tersebut dengan mengemukakan alasan bahwa dalam kenyataan sehari-hari, orang Afrika Hitam di Afrika Selatan, dipandang dari segi materi lebih baik hidupnya daripada orang-orang kulit hitam yang hidup di negara-negara Afrika lain (standar hidup orang kulit hitam di Afrika Selatan lebih tinggi). Pendapat ini mungkin benar. Namun apa yang tidak dirasakan pemimpin ini, atau yang pura-pura tidak memahaminya adalah bahwa kondisi individu tidak dapat diukur hanya dengan ukuran standar hidup yang bersifat materi saja¹¹². Di negara-negara Afrika lain, orang kulit hitam mungkin lebih miskin, sukar mendapat pekerjaan, tinggal di daerah hunian yang lebih kumuh, kurang kesempatan memperoleh pendidikan, akan tetapi sekurang-kurangnya di depan hukum dianggap sebagai manusia. Di Afrika Selatan, orang kulit hitam pada dasarnya dianggap sebagai makhluk “hina”. Para pemimpin Afrika Selatan menolak untuk melihat bahwa bagian pokok dari

¹¹² Antonio Cassese, *Catatan-Catatan Tentang Apartheid* (terjemahan), Yayasan Obor, Jakarta, 1994, hlm. 161.

konsep “diri manusia” yang diterima oleh semua negara dan disetujui oleh Deklarasi Universal tahun 1948 adalah bahwa hak setiap orang untuk dianggap sama dengan yang lain.

Pengamatan kedua berkaitan dengan pilihan alat untuk mengharuskan *apartheid*, yaitu perundang-undangan yang lebih banyak dilihat bukan karena kandungannya akan tetapi lebih banyak karena fungsinya sebagai *alat kontrol sosial*¹¹³. Artinya, undang-undang dilihat bukan dalam arti yang sesungguhnya yaitu sebagai alat untuk mengatur ketertiban seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan golongan atau rasnya, tetapi oleh pemerintah Nasionalis undang-undang yang dibuat lebih dilihat sebagai alat untuk mengatur atau mengontrol kehidupan Hitam dan Putih dengan tujuan mempertahankan supremasi kulit putih.

Hukum, yang dianggap Rousseau sebagai pemusatan kebebasan dan logika, di tangan mereka telah menjadi suatu cara yang canggih untuk melembagakan ketidakadilan dan ketidaklogisan. Memang sukar untuk menemukan suatu sistem sosial lain di mana dimensi normatifnya demikian membengkak dan di mana hukum itu telah menjadi mekanisme dominasi dan pengendalian sosial yang demikian berkuasanya. Kepincangan di Afrika Selatan antara hukum dalam aspeknya sebagai sebuah instrumen yang utama untuk mengarahkan anggota masyarakat, dan hukum dalam aspeknya yang sangat menindas, merupakan salah satu dari masalah pokok dari kritik yang tenang dan pahit, yang ditujukan oleh Nelson Mandela (seorang pemimpin Kongres Nasional Afrika, *African National Congress*) kepada rezim Afrika Selatan dalam pidato

¹¹³ *Ibid*, hlm. 162

pembelaannya ketika ia diadili di Pretoria tahun 1962. Profesinya adalah pengacara, karena itu ia ahli tentang hukum dan sadar akan kepentingannya.

“Hakim Yang Mulia, saya ingin mengatakan bahwa seluruh kehidupan setiap orang Afrika yang berpikir di negeri ini selalu mendorongnya kepada suatu konflik antara hati nuraninya di satu pihak dan hukum di pihak lain. Ini bukanlah konflik yang khas di negeri ini saja. Konflik itu timbul dalam diri orang yang berhati nurani, dalam diri orang yang berpikir dan merasa secara mendalam di setiap negeri. Baru-baru ini di Inggris, seorang bangsawan tinggi, Earl Russell, barangkali filsuf yang paling dihormati di dunia Barat, dijatuhi hukuman, disalahkan karena persis melakukan jenis kegiatan yang telah menyebabkan saya berdiri di depan Anda sekarang ini, karena mengikuti hati nuraninya dengan menentang hukum, sebagai suatu proses menentang kebijaksanaan tenaga nuklir yang sedang dilaksanakan oleh pemerintahnya. Baginya, tugasnya terhadap publik, kepercayaannya terhadap moralitas dari benarnya pada intinya sikap yang dipertahankannya, tampak lebih agung daripada penghormatannya terhadap hukum. Ia tidak dapat berbuat lain daripada menentang hukum dan menanggung akibatnya. Demikian pula keadaan saya. Demikian pula keadaan orang Afrika di negeri ini.

Hukum sebagaimana dilaksanakan sekarang ini, hukum sebagaimana telah dikembangkan dalam jangka waktu demikian lama dalam sejarah, dan terutama sekali hukum sebagaimana ditulis dan dibentuk oleh pemerintahan kaum Nasionalis, adalah suatu hukum yang dalam pandangan kami tidak bermoral, tidak adil dan tidak dapat diterima. Hati nurani kami mengatakan bahwa kami harus mengajukan protes terhadapnya, bahwa kami harus menentangnya, dan bahwa kami harus berupaya untuk mengubahnya¹¹⁴”

Pengamatan ketiga berkaitan dengan penerapan segregasi rasial di Afrika Selatan. Segregasi rasial yang terjadi di Afrika Selatan sebenarnya sudah terjadi sebelum tahun 1948, tetapi pemisahan suatu masyarakat secara sistematis dan menyeluruh antara kulit putih dan kulit hitam secara resmi hanya terjadi pada tahun 1948. Tahun 1948 merupakan tahun di mana Pemerintah Nasionalis di Afrika Selatan berkuasa setelah memenangkan pemilihan umum dan secara resmi mulai menerapkan *apartheid*. Hal tersebut sangat bertolak belakang, karena pada

¹¹⁴ *Ibid* hlm.163

tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan suatu ajaran baru bagi seluruh umat manusia yaitu Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Abstainnya Afrika Selatan dalam pemungutan suara terakhir memiliki motivasi dalam bentuk serentetan argumentasi yang ditandai oleh kemunafikan yang paling terang-terangan. Alasan utama sikap abstain ini adalah karena mereka tidak ingin melakukan komitmen moral bagaimanapun kecilnya, yang dilambangkan oleh sikap memberikan suara yang mendukung Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia¹¹⁵.

Sesungguhnya, setiap undang-undang segregasi yang dibuat oleh pemerintah Nasionalis di Afrika Selatan merupakan suatu tamparan keras terhadap Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, suatu penolakan yang khusus dan keras kepala untuk tidak menghiraukan Deklarasi tersebut. Dengan diciptakannya apartheid, kehidupan antara Putih dan Hitam serta orang-orang non kulit putih lainnya sangat jauh berbeda. Dalam setiap aspek kehidupan, orang hitam hampir tidak mencapai taraf hidup yang layak, sedangkan orang putih mempunyai standar kehidupan yang paling tinggi.

Undang-undang *apartheid* di Afrika Selatan telah mengubah sekian banyak orang yang tidak bersalah menjadi kriminal pelanggar hukum. Tindak pidana kekerasan selalu bertambah dalam masyarakat apartheid karena terjadi pelanggaran-pelanggaran kecil terhadap peraturan-peraturan rasial yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya, menganggur adalah suatu tindakan pidana, karena tidak satu pun orang Afrika yang dapat menghindar dari penangkapan jika buku

¹¹⁵ *Ibid* hlm.164.

pas jalannya tidak berisi cap mempunyai pekerjaan yang diakui dan disetujui. Berdampingan dengan orang kulit putih dapat merupakan tindak pidana, tinggal di daerah yang salah, (daerah yang telah dinyatakan untuk kulit putih atau India atau Berwarna) dapat menjadi tindakan kriminal bagi orang-orang Afrika. Membuat bir Afrika, meminumnya, atau menggunakan hasilnya untuk menambah penghasilan keluarga yang sangat kecil merupakan suatu tindakan kriminal, dan para wanita yang melakukannya terkena denda yang berat dan hukuman penjara¹¹⁶. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Afrika Selatan dianggap sebagai negeri dengan penghuni penjara terbesar. Penjara yang dipenuhi oleh orang-orang Afrika yang dipenjarakan karena kejahatan-kejahatan serius atau karena pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai undang-undang segregasi rasial yang dibuat oleh pemerintah Nasionalis.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa berbagai struktur perundang-undangan rasial yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan rakyat di Afrika Selatan baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial maupun politik, membuat orang-orang Afrika Selatan dan orang-orang non kulit putih lainnya benar-benar menjadi orang asing di kampung halamannya sendiri. Kehidupan rakyat Afrika Selatan sangat berbeda dengan warga kulit putih, suatu kehidupan yang jelas-jelas buruk di mana mereka hidup di dalam kungkungan berbagai perundang-undangan yang sengaja dirancang khusus bagi mereka. Undang-Undang segregasi rasial tersebut digunakan oleh Pemerintah sebagai sarana untuk mengatur segala aspek kehidupan rakyat di Afrika Selatan. Kondisi

¹¹⁶ Nelson Mandela, *Langkah Menuju Kebebasan Surat-Surat dari Bawah Tanah* (terjemahan), Yayasan Obor, Jakarta, 1993, hlm. 13.

seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan dengan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Membedakan mereka berdasarkan warna kulit/ras atau suku bangsa merupakan suatu penolakan dari persamaan ini dan juga merupakan suatu ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut tentu bisa menimbulkan kebencian dan kekecewaan di kalangan rakyat dalam bentuk reaksi atau perlawanan terhadap kebijakan rasial yang dilakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih baik di Afrika Selatan.



BAB IV

REAKSI TERHADAP PELAKSANAAN POLITIK *APARTHEID*

DI AFRIKA SELATAN TAHUN 1948-1990

Politik *apartheid* di Afrika Selatan yang secara sistematis dilembagakan dan dituangkan dalam undang-undang setelah Partai Nasional berkuasa tahun 1948 telah menyebabkan adanya perlakuan yang diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan rakyat Afrika Selatan. Golongan-golongan rasial lainnya, khususnya rakyat kulit hitam, menolak politik *apartheid* itu dan menentangnya dengan tegas. Mereka melihatnya sebagai siasat minoritas kulit putih untuk mempertahankan supremasi dan kedudukan istimewanya dan menganggapnya sebagai salah satu bentuk diskriminasi yang tidak adil. Rakyat kulit hitam menolak klaim kulit putih bahwa secara kodrat orang kulit putih memiliki keunggulan dan hak untuk memimpin. Mereka menyatakan penolakan itu dengan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan minoritas kulit putih sebagai reaksi terhadap politik *apartheid* yang telah membatasi kebebasan mereka baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Perjuangan mereka dalam melakukan perlawanan terhadap *apartheid*, mendapat dukungan dan bantuan dari negara-negara Afrika dan banyak negara lainnya yang dengan keras mengutuk politik *apartheid* dan dengan berbagai cara berusaha menekan rezim kulit putih Afrika Selatan agar menghapusnya dan menghormati hak-hak golongan-golongan rasial lainnya. Berikut ini uraian tentang reaksi terhadap pelaksanaan politik *apartheid*

di Afrika Selatan baik reaksi yang berasal dari dalam negeri maupun reaksi dari luar negeri.

A. Reaksi Dalam Negeri terhadap *Apartheid*

Menjadi orang Afrika di Afrika Selatan berarti bahwa kehidupan seseorang sudah mulai dipengaruhi kehidupan politik sejak kelahirannya, diakui atau tidak. Seorang bayi Afrika dilahirkan di Rumah Sakit Khusus Afrika, dibawa pulang naik bis Khusus Afrika, tinggal di daerah Khusus Afrika, dan hanya boleh menghadiri Sekolah Khusus Afrika. Kalau ia menjadi dewasa, ia hanya bisa memegang jabatan Khusus Afrika, hanya menyewa rumah di kota satelit khusus Afrika, naik kereta api Khusus Afrika dan ia bisa dihentikan setiap saat siang atau malam dan diperintahkan untuk menunjukkan tanda pengenalnya (*book pass*) dan kalau gagal melakukannya, ia akan ditangkap dan dipenjara. Kehidupannya dibatasi oleh undang-undang dan peraturan rasial yang membatasi pertumbuhannya, yang membatasi potensinya dan memperpendek kehidupannya. Ini adalah kenyataan, dan kenyataan ini dapat dihadapi dengan jutaan cara¹¹⁷.

Salah satu cara agar kenyataan tersebut tidak selamanya menindas orang kulit hitam adalah dengan membentuk suatu organisasi sebagai wadah atau sarana untuk mengusahakan perubahan di Afrika Selatan dan merupakan tempat orang hitam menaruh harapan dan aspirasi. Organisasi tersebut adalah *South African Native National Congress*, yang kemudian diganti menjadi ANC (*African National Congress*/Kongres Nasional Afrika). ANC dibentuk pada tanggal 8 Januari 1912 dengan tujuan untuk membela hak dan kebebasan orang-orang

¹¹⁷ Nelson Mandela, *Perjalanan Panjang Menuju Kebebasan* Otobiografi Nelson Mandela (terjemahan), BinarupaAksara, Jakarta, 1995, hlm. 95.

Afrika. ANC adalah satu-satunya organisasi yang menerima setiap orang dan merupakan tempat berlindung untuk semua orang Afrika. Di samping itu ANC juga merupakan unsur terpenting dalam perjuangan melawan *apartheid* di Afrika Selatan. Sejak terbentuknya ANC pada tanggal 8 Januari 1912, prinsip dasar yang digunakan ANC adalah prinsip tanpa kekerasan melalui diskusi, delegasi ke Kongres, mengajukan penawaran-penawaran dan resolusi. Prinsip ini dituruti karena para pemimpin ANC percaya kepada protes damai sebagai hasil cara pandang Kristen mereka. Prinsip tanpa kekerasan ini juga dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan Kongres India Afrika Selatan dan pelajaran yang mereka peroleh dari perlawanan Mahatma Gandhi, pelopor metode aksi tanpa kekerasan yang membebaskan orang-orang India di Afrika Selatan dari perlakuan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih.

Terbentuknya ANC pada tanggal 8 Januari 1912 merupakan salah satu bukti adanya reaksi atas perlakuan diskriminatif oleh orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam. Melalui ANC orang-orang kulit hitam berjuang menentang politik *apartheid*. Semula, perlawanan menentang *apartheid* dengan prinsip non kekerasan dimulai sejak terbentuknya *African National Congress* pada tahun 1912. Pada tahun 1919 sampai tahun 1920 ANC melancarkan suatu kampanye untuk menentang peraturan-peraturan yang mewajibkan rakyat kulit hitam membawa *Passbook*, yang bukan hanya merupakan tanda kenal tetapi juga alat untuk menguasai migrasi penduduk kulit hitam. Peristiwa lain yaitu terjadinya pemogokan buruh tambang pada tahun 1946 sebagai reaksi atas perlakuan pemerintah yang tidak memperhatikan kehidupan buruh tambang Afrika. Pada

tahun yang sama pemerintah pimpinan Smuts memaklumkan Undang-Undang Pemilikan Tanah Asia yang membatasi kebebasan bergerak orang-orang India, membatasi daerah tempat orang India boleh tinggal dan berdagang, dan sangat membatasi hak-hak mereka untuk membeli properti. Sebagai balasannya, mereka diberi wakil di parlemen oleh wakil-wakil berkulit putih yang diangkat untuk mewakili mereka. Undang-undang ini dikenal dengan nama *Ghetto Act* dan undang-undang tersebut merupakan penghinaan besar terhadap masyarakat India dan menjadi pembuka jalan untuk *Group Area Act* (Undang-Undang Daerah Kelompok, yang dibentuk pada masa pemerintahan Dr. F. Malan) yang akan membatasi kebebasan semua penduduk Afrika Selatan. Sebagai reaksi terhadap adanya Undang-Undang Pemilikan Tanah Asia/*Ghetto Act*, masyarakat India melakukan perlawanan pasif selama dua tahun melalui kampanye terorganisasi di bawah pimpinan Drs. Dadoo dan G. M. Naicker, Presiden Kongres India Natal. Berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Afrika maupun India, nampaknya tidak memperoleh hasil karena setiap perlawanan ditanggapi pemerintah dengan penindasan dan kekerasan.

Perlawanan tersebut berlanjut pada masa pemerintahan Dr. Francois Malan tahun 1948, ketika pemerintahannya menetapkan undang-undang diskriminasi rasial yang tidak adil terhadap rakyat Afrika Selatan. Kampanye pembangkangan dimulai pada tahun 1952. Nelson Mandela ditunjuk sebagai ketua sukarela untuk mengatur kampanye pembangkangan, sebuah protes yang berlandaskan non-kerjasama dan non-kekerasan menentang aturan pemerintah yang tidak adil. Kampanye dimulai dengan melanggar undang-undang di daerah,

memasuki daerah-daerah terbatas tanpa izin, menggunakan fasilitas khusus kulit putih seperti toilet, kereta api khusus putih, ruang tunggu dan pintu kantor pos yang dikhususkan bagi orang putih. Kampanye itu berkembang di Witwatersrand, Durban, Port Elizabeth, East London dan Cape Town. Sekitar delapan ribu lima ratus orang melanggar hukum apartheid dan dipenjara. Meskipun banyak orang yang ditangkap, keanggotaan ANC justru meningkat dari tujuh ribu orang menjadi seratus ribu orang¹¹⁸. Pemerintah menganggap kampanye tersebut sebagai suatu ancaman terhadap keamanannya dan terhadap apartheid. Kampanye pembangkangan ditanggapi pemerintah dengan meresmikan dua undang-undang yaitu undang-undang Kemanan Masyarakat yang memberikan kepada pemerintah kekuasaan untuk menyatakan keadaan darurat dan menahan orang tanpa sidang dan undang-undang Amandemen Tindakan Kriminal yang mengancam hukuman badan terhadap para pembangkang. Selain itu, pemimpin ANC seperti Nelson Mandela dikenai larangan-larangan. Dalam larangan itu tertera perintah baginya untuk mengundurkan diri dari ANC dan dikenai BAN¹¹⁹ (tidak boleh menghadiri pertemuan politik di mana pun).

Dengan meningkatnya diskriminasi rasial terhadap rakyat bukan kulit putih terutama sejak tahun 1948, meningkat pula oposisi nasionalisme Afrika. Pada tahun 1955 kelompok-kelompok rasial yang menentang apartheid, termasuk ANC (*African National Congres*), SAIC (*South Africa Indian Congres*), SACPO

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 128.

¹¹⁹ BAN adalah perintah pelarangan pemerintah, dan pada umumnya tindakan ini berarti memaksa seseorang mundur dari berbagai organisasi yang ditentukan dan larangan untuk mengikuti pertemuan apa saja. Ini merupakan strategi pemerintah untuk mengeluarkan seseorang dari perjuangan, mengizinkan ia tetap menjalani kehidupan yang dibatasi dengan sempit di luar politik.

(*South African Coloured People's Organization*) dan COD (*Congress of Democrats*)¹²⁰ mengadakan pertemuan di Kliptown, sebuah desa multirasial dekat Johannesburg dan menyusun suatu *Freedom Charter* (Piagam Kebebasan), yang menggariskan dasar-dasar bagi Afrika Selatan yang demokratis dan non rasial¹²¹. Isi dari Piagam Kebebasan tersebut adalah sebagai berikut: 1) rakyat akan memerintah, 2) semua kelompok nasional akan mempunyai hak yang sama, 3) rakyat akan berbagi kekayaan negara, dan 4) tanah akan dibagi antara orang-orang yang mengerjakannya¹²².

Dokumen Piagam Kebebasan tersebut meskipun hanya menguraikan hak-hak dasar dan harapan-harapan orang Afrika Selatan, tetapi bagi pemerintah merupakan suatu ancaman yang sangat berbahaya dan sangat subversif. Untuk mengatasi ancaman ini, pada bulan Desember 1956 polisi negara melakukan penangkapan secara besar-besaran terhadap Nelson Mandela dan 156 pemimpin Piagam Kebebasan, yang dilanjutkan dengan pengadilan para penghianat. Mereka dituduh berkomplot untuk menggulingkan pemerintah dengan menggunakan kekerasan. Proses persidangan terhadap Nelson Mandela dan 156 orang lainnya

¹²⁰ ANC (*African National Congress*) : Kongres Nasional Afrika, dibentuk pada tanggal 8 Januari 1912, lahir dari upaya untuk mempertahankan hak-hak dan kebebasan orang Afrika. Lambang ANC lihat lampiran X hlm. 182

SACPO (*South African Coloured People's Organization*) : Organisasi Masyarakat Kulit Berwana Afrika Selatan, dibentuk pada bulan September 1953 di Cape Town oleh para pemimpin Campuran dan serikat-serikat buruhnya, lahir dari upaya terlambat untuk mempertahankan hak suara orang Campuran di Cape dan organisasi ini bertujuan mewakili kepentingan orang Campuran.

COD (*Congress of Democrats*) : Partai orang kulit putih yang radikal, dan anti pemerintah, dibentuk pada akhir tahun 1952 dan bertujuan memperlakukan orang hitam sebagai orang sederajat. Partai ini merupakan satu-satunya partai orang kulit putih yang anti putih dan mendukung perjuangan ANC dalam membela hak-hak orang kulit hitam.

¹²¹ Kirdi Dipoyudo, *Masalah Rasial di Afrika Selatan*, Volume VII, CSIS Analisa, 1978, hlm.135.

¹²² Nelson Mandela, *Perjalanan Panjang Menuju Kebebasan, Otobiografi Nelson Mandela* (terjemahan), Binarupa Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 174-175. Isi Piagam Kebebasan Afrika, selengkapnya lihat lampiran XVII hlm. 189.

berlangsung lama, kurang lebih 4,5 tahun dan baru pada tahun 1961 berakhir dengan pembebasan.

Peristiwa lain, yang terkenal ke dunia luar sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap politik *apartheid* adalah tragedi Sharpeville tanggal 21 Maret tahun 1960. Tragedi Sharpeville yang dilakukan oleh PAC (*Pan Africanist Congress*) merupakan perlawanan dari orang kulit hitam sebagai reaksi terhadap *Pass Laws* 1952 (Undang-Undang Pas Jalan/Tanda Pengenal) yang mewajibkan orang kulit hitam membawa kartu identitas. Peristiwa tersebut terjadi di Sharpeville (sekarang disebut Provinsi Gauteng, terletak di timur laut dari Afrika Selatan) untuk mendemonstrasikan anti *pass laws*. Sekitar dua puluh ribu orang kulit hitam menawarkan diri mereka untuk ditahan karena tidak membawa kartu identitas. Aksi tersebut ditanggapi oleh polisi negara dengan memberikan tembakan peringatan kepada para demonstran dan pada akhirnya menyebabkan enam puluh sembilan orang terbunuh dan seratus delapan puluh enam orang luka-luka. Peristiwa ini menghadirkan Afrika Selatan di halaman depan koran-koran di seluruh dunia. Di Afrika Selatan, tragedi Sharpeville menimbulkan amarah massa. Nelson Mandela adalah salah satu di antara pemimpin ANC yang membakar pas jalannya di depan umum. ANC menyerukan aksi mogok sebagai protes. Reaksi seketika dari pemerintahan Verwoerd adalah menyatakan negara dalam keadaan bahaya (menetapkan status darurat). Verwoerd mendeklarasikan keadaan darurat dan memberikan hak kepada pihak keamanan untuk menahan orang tanpa sidang termasuk anggota Kongres Nasional Afrika (*African National Congress*) dan *Pan*

Africanist Congress dan kedua organisasi tersebut dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Pembantaian di Sharpeville dan larangan terhadap organisasi-organisasi politik di kalangan rakyat kulit hitam merupakan titik balik dalam sejarah pembebasan Afrika Selatan. Kejadian-kejadian itu meyakinkan pemimpin-pemimpin kulit hitam terutama Nelson Mandela dan pengikut-pengikutnya, bahwa sasaran-sasaran perjuangan mereka tidak dapat dicapai dengan cara-cara damai tetapi hanya lewat kekerasan¹²³. Prinsip non kekerasan yang dianut oleh ANC yang dimulai tahun 1912 ternyata tidak mampu menggulingkan supremasi kulit putih dengan segala kebijakan rasialnya, karena setiap aksi non kekerasan untuk menentang berbagai macam peraturan rasial ditanggapi oleh pemerintah dengan kekerasan dengan menggunakan polisi negara. Oleh karena itu pada tahun 1961 ANC mengubah prinsip organisasinya, yang sejak awal menggunakan prinsip non kekerasan kemudian beralih menggunakan cara-cara kekerasan.

Prinsip baru yang ditempuh ANC melalui jalan kekerasan terorganisasi dilakukan dengan memberikan wewenang kepada Nelson Mandela untuk membentuk organisasi militer baru yang terpisah dari ANC. Nama organisasi baru tersebut adalah Umkhonto we Sizwe atau disingkat MK¹²⁴, dan diketuai oleh Nelson Mandela. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Umkhonto we Sizwe adalah sabotase. Menurut Nelson Mandela sabotase merupakan pilihan yang logis,

¹²³ Kirdi Dipoyudo, *Afrika Dalam Pergolakan 2*, Yayasan Proklamasi Centre For Strategic and International Studies, Jakarta, 1983, hlm. 136.

¹²⁴ Umkhonto we Sizwe adalah sayap militan dari ANC yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Umkhonto we Sizwe atau MK secara harafiah berarti tombak/leming bangsa. Simbol leming dipilih karena dengan senjata sederhana inilah orang Afrika telah bertahan melawan pendudukan orang putih selama berabad-abad.

karena selain membutuhkan tenaga manusia paling sedikit tindakan ini tidak melibatkan kehilangan nyawa dan memberikan harapan terbesar bagi terwujudnya rekonsiliasi antar ras di masa selanjutnya. Semua anggota Umkhonto we Sizwe dilarang bersenjata ketika beroperasi dan tidak boleh membahayakan kehidupan dengan cara apa pun.

Pelaksanaan sabotase dilakukan dengan menyerang instalasi-instalasi militer, pembangkit tenaga listrik, saluran telepon, dan jaringan transportasi; sasaran yang bukan hanya akan menghambat efektivitas negara, tetapi juga membuat para pendukung partai Nasionalis takut, mengusir modal asing dan melemahkan ekonomi¹²⁵. Semua tindakan sabotase tersebut dilakukan berdasarkan analisis yang teliti tentang situasi di Afrika Selatan. Menurut Nelson Mandela Afrika Selatan sangat tergantung pada modal asing dan perdagangan luar negeri. Dihancurkannya pusat-pusat tenaga listrik dan dikacaukannya komunikasi dengan kereta api dan telepon akan cenderung menyebabkan modal asing lari dari negeri ini, menjadikan lebih sukar bagi barang-barang untuk diangkut dari daerah-daerah industri ke pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana dan dalam jangka panjang akan menegangkan bagi kehidupan ekonomi Afrika Selatan. Serangan-serangan terhadap garis kehidupan ekonomi Afrika Selatan akan dihubungkan dengan sabotase terhadap gedung-gedung pemerintah dan simbol-simbol apartheid yang lain¹²⁶. Dengan demikian, tindakan-tindakan seperti ini akan

¹²⁵ Nelson Mandela, *Perjalanan Panjang Menuju Kebebasan, Otobiografi Nelson Mandela* (terjemahan), Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 283.

¹²⁶ Nelson Mandela, *Langkah Menuju Kebebasan Surat-surat dari Bawah Tanah* (terjemahan), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 192.

memaksa para pemimpin negara Afrika Selatan untuk meninjau kembali sikap mereka terhadap rakyat Afrika Selatan.

Umkhonto we Sizwe melakukan aksi pertama pada tanggal 16 Desember 1961, tepat pada saat kaum Afrikaner melakukan pesta tahunan memperingati kemenangan mereka terhadap bangsa Zulu tahun 1838. Momen ini dimanfaatkan oleh unit-unit Umkhonto we Sizwe dengan melakukan serangan terencana terhadap pusat-pusat tenaga listrik, kantor-kantor pemerintah Johannesburg, Port Elizabeth, Durban dan terutama instalasi-instalasi yang berhubungan dengan kebijaksanaan apartheid dan diskriminasi ras. Sabotase hanya diarahkan pada benda-benda dan pembunuhan sepenuhnya dihindari. Bersamaan dengan aksi tersebut Umkhonto we Sizwe menyebarkan selebaran yang berisi manifesto Umkhonto we Sizwe dan mengumumkan kelahiran Umkhonto we Sizwe. Selama beberapa tahun aksi kekerasan hanya ditujukan pada alat-alat atau benda-benda namun di tahun-tahun selanjutnya baru disebarkan bom-bom yang bertujuan membunuh manusia. Setelah memimpin Umkhonto we Sizwe melakukan sabotase, Nelson Mandela meninggalkan Afrika Selatan tanpa paspor untuk menghadiri Konferensi PAFMECSA (*Pan African Freedom Movement for East, Central and Southern Africa*/Gerakan Pan Afrika Demi Kemerdekaan di Afrika Timur, Tengah dan Selatan) di Addis Ababa pada bulan Februari 1962. Tujuan beliau menghadiri Konferensi Addis Ababa adalah untuk mendapatkan dukungan politik terutama dalam menyerang apartheid, dukungan ekonomi dan latihan militer bagi anggota Umkhonto we Sizwe¹²⁷. Keikutsertaannya dalam konferensi

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 287-288.

tersebut ternyata membawa hasil, karena negara-negara Afrika yang tergabung dalam PAFMECSA memberikan dukungan kepada Nelson Mandela untuk membantu rakyat Afrika Selatan menentang apartheid. Dukungan tersebut akan dilakukan dengan cara memboikot Afrika Selatan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan perhubungan.

Pemerintah menganggap bahwa tindakan Nelson Mandela memimpin Umkhonto we Sizwe dalam melakukan sabotase dan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mencari dukungan terhadap perjuangannya menentang politik apartheid merupakan suatu tindakan yang berusaha menggulingkan pemerintah dengan kekerasan. Oleh karena itu ia ditangkap dan diadili bersama tujuh orang lainnya (Walter Sisulu, Thabo Mbeki, Mhlaba, Motsoaledi, Mlangeni, Ahmed Kathrada dan Goldberg) dengan tuduhan melakukan sabotase dan mencoba melakukan revolusi dengan cara kekerasan. Pada tanggal 12 Juni 1964 ia dan tujuh orang lainnya dihukum penjara seumur hidup di Pulau Robben¹²⁸, tempat narapidana politik Afrika Selatan dipenjarakan.

Meskipun Nelson Mandela dan tokoh politik lainnya menjadi tahanan politik di Afrika Selatan, perjuangan menentang apartheid tidak surut. Bahkan tekanan-tekanan di dalam negeri semakin meningkat terutama tahun 1970-an. Pada tahun 1973, kaum buruh kulit hitam mengadakan pemogokan untuk menuntut perbaikan nasib dan upah yang lebih tinggi serta menuntut perlunya meningkatkan kesempatan latihan bagi buruh kulit hitam dan berwarna agar

¹²⁸ Pulau Robben adalah sebuah penjara, tempat untuk menampung para tahanan politik era *apartheid*, termasuk Nelson Mandela, lihat lampiran XI, hlm. 183.

mereka dapat maju dalam perekonomian¹²⁹. Pada tahun 1976 bulan Juni, terjadi Tragedi Soweto di mana sekitar lima belas ribu orang pelajar melancarkan suatu demonstrasi protes di Soweto¹³⁰ di bawah pimpinan Steve Biko untuk memprotes peraturan yang menetapkan bahwa setengah dari semua mata pelajaran (Matematika, Ilmu Sosial, Sejarah, dan Geografi) di sekolah diberikan dengan menggunakan bahasa Afrikaans. Para siswa tidak ingin belajar dan para guru tidak ingin mengajar menggunakan bahasa penindas. Permohonan dan petisi para guru untuk menolak penggunaan bahasa Afrikaans di sekolah-sekolah kulit hitam diabaikan oleh pemerintah. Akhirnya pada tanggal 30 April 1976, anak-anak di Sekolah Junior Orlando Barat di daerah Soweto melakukan aksi demonstrasi, menolak untuk pergi ke sekolah. Pemberontakan mereka menyebar ke sekolah-sekolah lainnya di Soweto. Pelajar-pelajar tersebut mengadakan aksi massa pada tanggal 16 Juni 1976, yang kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan. Polisi meresponnya dengan melemparkan batu ke arah anak-anak itu. Hector Pieteron, usia 12 tahun, adalah salah satu dari lima ratus enam puluh enam anak yang meninggal di tangan polisi-polisi tersebut (anak pertama yang tertembak polisi adalah Hastings Ndlovu, usia 15 tahun)¹³¹. Insiden itu meluas menjadi kekerasan di seluruh Afrika Selatan, dan berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang bermukim di situ.

Dengan demikian pergolakan demi pergolakan pun terjadi di Afrika Selatan. Meskipun pemerintah menanggapi setiap pergolakan dengan penindasan,

¹²⁹ Kirdi Dipoyudo, *Afrika Dalam Pergolakan 2*, Yayasan Proklamasi Centre for Strategic And International Studies, Jakarta, 1983, hlm. 84.

¹³⁰ Soweto merupakan daerah yang khusus ditempati oleh orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan. Lihat lampiran VI, hlm 178.

¹³¹ http://www.en.wikipedia.org/wiki/History_of_South_Africa_In_The_Apartheid_Era.

rakyat Afrika Selatan tetap melakukan perlawanan. Perlawanan tersebut memang belum menghasilkan perubahan yang total, tetapi setidaknya telah mengancam keberadaan pemerintah kulit putih dengan segala kebijakan rasialnya. Ancaman tersebut akan semakin melemahkan kedudukan pemerintah ketika reaksi terhadap perlawanan menentang apartheid tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga berasal dari luar Afrika Selatan.

B. Reaksi Luar Negeri terhadap *Apartheid*

1. *Organization of African Unity* (OAU)/ Organisasi Kesatuan Afrika

Politik *apartheid* yang diterapkan oleh pemerintahan minoritas kulit putih di Afrika Selatan tidak hanya mendapat kecaman dari rakyat Afrika Selatan tetapi juga dari negara-negara di luar Afrika Selatan yang tergabung dalam Organisasi Kesatuan Afrika (*Organization of African Unity*/OAU). Organisasi ini meliputi negara-negara Afrika Kontinental, Madagaskar dan lain-lain pulau sekitar Afrika untuk menyelesaikan berbagai masalah antar-Afrika yang sulit dan rumit. Tujuannya (menurut piagam) :a) memajukan persatuan dan solidaritas negara-negara Afrika, b) mengkoordinasi dan meningkatkan kerjasama dan usaha mereka untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik untuk bangsa-bangsa Afrika, c) pertahanan kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan mereka, d) menghapus segala bentuk kolonialisme dari Afrika, dan e) memajukan kerjasama internasional dengan memperhatikan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi hak-Hak Asasi Manusia¹³². Selain itu, OAU juga memiliki lima tugas pokok :1) perjuangan melawan kolonialisme dan rasisme, 2) perwakilan bersama

¹³² Kirdi Dipoyudo, *Afrika Dalam Pergolakan 2*, CSIS, Jakarta, 1983, hlm.200.

dalam Afrika terhadap luar, kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional, 3) penanganan konflik (persengketaan daerah yang disebabkan masalah daerah terbagi, sengketa perbatasan, serta etnis historis) di dalam dan antarnegara Afrika, 4) integrasi ekonomi, pengorganisasian kerja sama ekonomi antar-Afrika (sejak tahun “70-an dan 80-an”) mengatasi krisis utang, dan 5) sejak tahun 1981 tema hak asasi manusia menjadi tema OAU selanjutnya¹³³. Berdasarkan tujuan dan tugas pokok tersebut pada bulan Pebruari 1962 OAU menyelenggarakan konferensi di Addis Ababa dengan mengundang negara-negara di benua Afrika. Konferensi ini diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara Afrika dan merumuskan rencana-rencana konkret untuk mempercepat perjuangan bagi pembebasan daerah-daerah di kawasan Afrika yang masih diperintah oleh penjajah asing, secara khusus menangani masalah apartheid yang terjadi di Afrika Selatan.

Dalam konteks benua Afrika, pertemuan para pemimpin Afrika dalam konferensi di Addis Ababa telah sepakat bahwa satu-satunya pilihan untuk mengakhiri pemerintahan minoritas kulit putih di Afrika Selatan adalah mengintensifkan perjuangan bersenjata dengan lebih memberikan dukungan moral dan material pada gerakan pembebasan di Afrika Selatan. Ethiopia menawarkan kesediaan untuk melatih sepuluh ribu gerilyawan Afrika Selatan. Negara anggota OAU juga didesak untuk membayar iuran kepada Komite Pembebasan OAU yang diberi tugas untuk menyalurkan dana bagi gerakan

¹³³ Pieter Nohlen (ed), *Kamus Dunia Ketiga*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994, Jakarta, hlm. 497

pembebasan seperti ANC, PAC, dan SWAPO¹³⁴. Selain itu, empat negara Afrika yang telah merdeka, yang merupakan bagian dari konferensi ini yaitu Ethiopia, Somalia, Sudan, dan Tanganyika telah melaksanakan sanksi-sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap Afrika Selatan. Beban OAU akan terus berlanjut sampai tercapainya pemerintahan mayoritas kulit hitam. Akan tetapi, OAU tidaklah gagal. Organisasi ini telah berhasil merangsang timbulnya solidaritas Afrika yang merupakan senjata ampuh bagi hubungan Afrika dengan dunia luar.

2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Afrika Selatan menjadi pusat perhatian dalam kancah internasional setelah Perang Dunia II, yang ditandai oleh kecaman universal atas politik *apartheid*. Politik *apartheid* yang sarat dengan diskriminasi ras telah menggugah perhatian negara-negara di luar Afrika Selatan terutama negara-negara Afrika dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk membantu perjuangan rakyat Afrika Selatan mengakhiri rezim minoritas kulit putih yang telah bertahun-tahun memperlakukan mereka secara tidak manusiawi melalui kebijakan rasialnya.

Negara-negara Afrika memanfaatkan kedudukan mereka di PBB di mana mereka menguasai sekitar sepertiga suara, untuk mempengaruhi opini dunia dan memperjuangkan resolusi-resolusi yang dapat menekan Afrika Selatan. Berkat perjuangan negara-negara Afrika, PBB mulai menangani masalah *apartheid* dengan mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengutuk politik *apartheid*. Tujuan PBB berkenaan dengan kebijakan rasial Pemerintah Afrika Selatan sebagaimana dinyatakan dalam sebuah resolusi Sidang Umum tahun 1982 adalah penghapusan

¹³⁴ Wisnu Dewanto, *Apartheid dan Perkembangan di Afrika Bagian Selatan*, Analisa, 1987, Volume XIV No.2.

apartheid secara keseluruhan dan ditegakkannya suatu masyarakat demokratis di mana semua rakyat Afrika sebagai keseluruhan, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin atau kepercayaan, akan menikmati hak-hak asasi dan kebebasan fundamental manusia yang penuh dan sama serta ikut serta secara bebas dalam menentukan nasib sendiri¹³⁵. Berdasarkan tujuan tersebut, badan-badan PBB berusaha menyetujui sejumlah besar sanksi tindakan yang tujuannya mengakhiri *apartheid*. Beberapa tindakan berupa sanksi-sanksi yang dilakukan oleh PBB terhadap Afrika Selatan adalah sebagai berikut :

a. Embargo Senjata

Tindakan PBB memberikan sanksi embargo senjata terhadap Afrika Selatan bertujuan untuk menghentikan impor senjata Afrika Selatan yang di antaranya, sebagaimana telah dicatat oleh Dewan Keamanan, sering digunakan untuk memperkokoh kebijakan rasial pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Badan Kepolisian Negara yang dibentuk oleh pemerintah Afrika Selatan dalam rangka menghindari pemberontakan dengan orang-orang kulit hitam. Embargo sukarela terhadap pemasokan senjata ke Afrika Selatan diberlakukan pada bulan Agustus 1963. Dewan Keamanan menyerukan kepada negara-negara untuk menghentikan penjualan dan pengiriman senjata, amunisi, dan kendaraan militer ke Afrika Selatan. Empat bulan kemudian, Dewan keamanan memperluas embargo sukarela itu sehingga mencakup peralatan dan bahan-bahan untuk membuat dan merawat senjata dan amunisi di Afrika Selatan. Selain itu Dewan Keamanan

¹³⁵ Donna del Gaudio, *Perjuangan Menentang Apartheid* dalam Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai (terjemahan), Yayasan Obor, Jakarta, 1994, hlm. 95.

mengecam pelanggaran-pelanggaran terhadap embargo itu dan mempertegasnya dengan jalan meminta negara-negara lain untuk melaksanakan sepenuhnya tanpa syarat : menghentikan pemasokan semua kendaraan, perlengkapan, dan suku cadang untuk keperluan angkatan bersenjata Afrika Selatan dan organisasi-organisasi militernya, mencabut semua lisensi dan hak paten militer yang telah diberikan kepada pemerintah atau perusahaan-perusahaan Afrika Selatan untuk memproduksi amunisi dan senjata, pesawat terbang atau kapal atau alat pengangkutan militer lainnya. Pada tanggal 4 November 1977 Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mewajibkan embargo senjata. Diputuskan secara aklamasi bahwa semua negara mulai saat itu harus menghentikan setiap pengiriman ke Afrika Selatan senjata dan segala jenis barang lain yang ada hubungannya dengan senjata, termasuk penjualan atau pemindahan senjata dan amunisi, alat pengangkutan dan peralatan militer, perlengkapan kepolisian dan suku cadang serta pengaturan pemberian lisensi pembuatannya. Meskipun Dewan Keamanan PBB telah memutuskan embargo senjata wajib, tetapi sanksi ini sangat sedikit pengaruhnya, karena hanya beberapa negara yang melakukan embargo senjata dan secara militer Afrika Selatan cukup tangguh dan juga berswasembada.

b. Isolasi Diplomatik

Afrika Selatan selama menjalankan politik *apartheid* telah lama menjadi sasaran tekanan internasional. Hal ini nyata tidak saja dalam sejumlah resolusi yang dikeluarkan oleh PBB dan organisasi

internasional yang lain, tetapi juga nyata dengan pengucilan terhadap Afrika Selatan dalam bentuk isolasi diplomatik. Perwakilan diplomatik dari negara-negara luar yang ada di Afrika Selatan sangat sedikit dan sebaliknya banyak negara luar yang secara efektif tertutup bagi misi diplomatik Afrika Selatan.

Diakhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an pemerintah Afrika Selatan mencoba keluar dari isolasi ini dengan memperluas jaringan diplomasinya terutama ke negara-negara militeristis dan fasis di Amerika Latin. Tetapi, hasilnya kurang memuaskan karena makin meningkatnya tekanan internasional. Relasi formal dengan negara-negara Afrika juga sedikit kecuali Malawi. Relasi dengan negara seperti Uni Soviet berakhir ketika Afrika Selatan bersikeras atas kebijakannya yang rasis dan antikomunis. India juga memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Afrika Selatan menyusul kegagalan Afrika Selatan menunjukkan keinginan baik untuk memperbaiki keturunan India di Afrika Selatan¹³⁶.

c. Sanksi Penerbangan

Salah satu contoh penerapan sanksi spasial terhadap Afrika Selatan adalah sanksi penerbangan. Di tahun 1962, Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta negara-negara anggotanya untuk menolak pesawat-pesawat terbang milik pemerintah Afrika Selatan atau milik perusahaan-perusahaan yang terdaftar beroperasi di Afrika Selatan, mendapatkan fasilitas pendaratan atau sekedar lewat. Pelarangan penerbangan menuju

¹³⁶ A.J.Christopher. *The Atlas of Apartheid*, Routledge, New York, 1994, hal. 173.

ke Afrika Selatan juga ditetapkan oleh sejumlah negara sebagai konsekuensi resolusi PBB.

Tujuan utama penerbangan Afrika Selatan adalah Eropa Barat. Ditetapkannya sanksi penerbangan terhadap Afrika Selatan menyebabkan maskapai penerbangan Afrika Selatan yang menuju Eropa Barat terpaksa mengikuti rute yang lebih panjang (kira-kira 1.400 km) dan tidak dapat mengikuti rute yang lebih pendek lewat Nairobi, karena sejumlah negara Afrika melarang pesawat-pesawat Afrika Selatan melalui daerah mereka¹³⁷.

Rute penerbangan yang lain, lebih problematik sifatnya dan mencerminkan relasi-relasi eksternal Afrika Selatan. Misalnya, hubungan udara langsung antara Amerika Serikat dan Afrika Selatan yang diresmikan tahun 1969 sangat bersifat politis dan sejak awal penerbangan tersebut menjadi kontroversi. Baru di tahun 1986 penerbangan antara kedua negara itu dilarang dengan munculnya *Comprehensive Anti Apartheid Act* (undang-undang komprehensif anti apartheid). Hubungan melintasi Samudera India juga rumit dan sarat dengan muatan politik. Pada tahun 1952 ketika Afrika Selatan masih berada dalam commonwealth, maskapai penerbangan Australia “Qantas” mulai beroperasi antara Sydney dan Johannesburg dan maskapai penerbangan Afrika Selatan memulai penerbangan ke Australia lima tahun kemudian. Tetapi, karena tekanan politik sesudah tahun 1984 sedemikian besar sehingga di tahun 1986 pemerintah Australia juga melarang penerbangan langsung antara kedua negara sehingga pesawat-pesawat Afrika Selatan harus transit melalui negara lain sebagai jalan

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 176.

alternatif. Sanksi penerbangan ini sebenarnya sangat efektif dalam mengurangi jangkauan maskapai penerbangan Afrika Selatan.

d. Boikot Olahraga

Upaya PBB untuk menarik perhatian dunia kepada kebijakan diskriminatif Afrika Selatan di bidang olahraga telah dimulai pada tahun 1971. Konvensi Internasional tentang apartheid dalam bidang olahraga (Paris, Mei 1985) telah menyetujui sebuah deklarasi yang memperkuat boikot di bidang olahraga terhadap Afrika Selatan. Pemboikotan itu selanjutnya diperkuat lagi bulan Desember tahun 1985 oleh Sidang Umum yang telah menyetujui Konvensi Internasional menentang Apartheid dalam bidang Olahraga. Perjanjian itu, yang mulai berlaku tanggal 3 April 1988 mengharuskan negara-negara peserta perjanjian untuk tidak melakukan hubungan dalam bidang olahraga dengan negara-negara yang melakukan apartheid¹³⁸.

e. Sanksi Ekonomi

Sejak tahun 1962, Sidang Umum PBB menganjurkan Dewan Keamanan untuk memaksakan sanksi-sanksi ekonomi wajib terhadap Afrika Selatan. Permintaan Sidang Umum agar Dewan Keamanan mempertimbangkan sanksi ekonomi wajib diperbaharui kembali setelah Dewan itu memutuskan embargo senjata wajib. Pada tahun 1977, Sidang Umum PBB meminta semua negara untuk melakukan embargo terhadap penanaman modal dalam industri perminyakan di Afrika Selatan. Selain itu Dewan Keamanan menganjurkan semua negara anggota untuk melakukan tindakan-tindakan konkret seperti menghentikan

¹³⁸ Donna Del Gaudio, *Perjuangan Menentang Apartheid* dalam Hak-Hak Asasi Manusia (terjemahan), Yayasan Obor, Jakarta, 1994, hlm.189.

penanaman modal asing di Afrika Selatan, melarang penjualan mata uang, menghentikan penjualan ekspor terjamin, melarang kepentingan ekonomi dan keuangan untuk bekerjasama dengan pemerintah Afrika Selatan dan dengan perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada pemerintah Afrika Selatan¹³⁹. Sanksi ekonomi dalam beberapa kesempatan juga telah direkomendasikan oleh Sidang Umum (mulai tahun 1976) tetapi secara *de facto* hanya disetujui oleh negara-negara yang hanya sedikit mempunyai hubungan ekonomi dengan Afrika Selatan¹⁴⁰ sedangkan negara-negara Barat yang memiliki kepentingan ekonomi di Afrika Selatan pada awalnya tidak berbuat sesuatu atau tidak mengadakan perubahan yang berarti untuk melenyapkan apartheid selain mendukung resolusi-resolusi anti apartheid PBB. Alasan utamanya adalah ketergantungan ekonomi negara-negara Barat terhadap kekayaan mineral Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan salah satu sumber utama bahan-bahan mentah yang sangat penting sekali bagi industri negara-negara Barat. Misalnya, Amerika Serikat mengimpor dari Afrika Selatan 87 persen dari mangannya, 82 persen dari platinumnya, 73 persen dari vanadiumnya dan 48 persen dari chromiurnya. Perusahaan Amerika Serikat mengendalikan 70 persen dari industri komputer di Afrika Selatan, lebih dari 40 persen dari sektor minyak dan gas dan sepertiga dari industri mobil. Di samping itu, Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi di Afrika Selatan yang diperkirakan sebesar US\$2,5 milyar. Jumlah ini meliputi penanaman modal hampir sekitar tiga ratus perusahaan multinasional Amerika Serikat yang beroperasi di sana. Sedangkan Perancis, misalnya, mengimpor dari Afrika Selatan

¹³⁹ *Ibid*, hlm.100-101.

¹⁴⁰ Antonio Cassese, *Catatan-Catatan Tentang Apartheid dalam Hak Asasi Manusia di Dunia yang berubah* (terjemahan), Yayasan Obor, Jakarta, 1994, hlm. 171-172.

41 persen dari uraniumnya dan 40 persen dari chromiumnya. Selanjutnya hubungan ekonomi antara Afrika Selatan dengan negara-negara Barat sangat kuat. Inggris, selain memiliki hubungan historis yang sangat kuat dengan pemerintahan Pretoria juga merupakan partner dagang utama Afrika Selatan karena memiliki investasi industri yang sangat besar di Afrika Selatan (nilai investasinya sekitar lima milyar pound) dan juga situasi-situasi lain (misalnya, seperdua dari impor tahunan buah dan sayur dari Afrika Selatan ke negara-negara masyarakat Eropa, sebagian besar diimpor ke Inggris Raya dan kira-kira delapan puluh ribu orang Afrika Selatan berhak bermukim di Kerajaan Inggris seandainya mereka memutuskan untuk meninggalkan negara mereka)¹⁴¹. Selain itu, letak geografis Afrika Selatan mempunyai arti yang sangat penting bagi strategi global negara-negara Barat. Afrika Selatan menguasai jalur-jalur pelayaran Tanjung Harapan yang merupakan urat nadi bagi pengangkutan suplai minyak dan suplai bahan-bahan mentah negara-negara industri Barat.

Meskipun pada awalnya sikap negara-negara Barat yang memiliki kepentingan ekonomi di Afrika Selatan acuh tak acuh terhadap resolusi PBB mengenai sanksi ekonomi, lambat laun mengubah sikap mereka karena meningkatnya tekanan-tekanan internasional atas politik apartheid. Sikap tersebut ditunjukkan dengan tindakan nyata di mana Inggris dan Amerika Serikat menghentikan perdagangan mereka dengan Afrika Selatan. Pada tahun 1984, Dewan Keamanan PBB, Masyarakat Eropa (EC), negara-negara yang tergabung dalam *Commonwealth* dan Amerika Serikat semuanya menerapkan embargo

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 171.

secara sukarela diikuti dengan pembekuan kredit, embargo minyak dan pembatasan ekspor logam strategis dan berharga.

Pada tahun 1985 negara-negara Barat terutama Amerika Serikat menarik kembali investasi mereka di Afrika Selatan dan juga diikuti oleh beberapa perusahaan asing dan multinasional yang beroperasi di Afrika Selatan. Sejumlah perusahaan Amerika, termasuk *General Motors (GM)*, *International Business Machine (IBM)* *Warner Group* dan *Coca Cola* telah berhenti beroperasi di Afrika Selatan dan telah menjual semua kepentingan mereka kepada pihak lokal. Hal serupa juga ditempuh oleh perusahaan-perusahaan milik Inggris di Afrika Selatan. Bank-bank seperti *Barclays Bank* dan *Standard Charter* yang mendominasi perbankan di Afrika Selatan telah menurunkan sahamnya sekitar 50 persen. Bahkan *Barclays Bank* akhirnya menghentikan kegiatannya dan menjual aset-asetnya di Afrika Selatan, akhir November 1986¹⁴².

Di samping dukungan politik berupa sanksi-sanksi seperti yang telah disebutkan di atas, PBB juga memberikan dukungan moral dan materi kepada rakyat yang tertindas di Afrika Selatan. Dukungan moral ditunjukkan dengan memberikan dukungan bagi gerakan-gerakan pembebasan terutama seruan untuk membebaskan tahanan-tahanan politik dan mendukung perjuangan organisasi politik mayoritas penduduk Afrika Selatan seperti ANC (*African National Congress/Kongres Nasional Afrika*) dan OAU (*Organization of African Unity/Organisasi Persatuan Afrika*) untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri. Dukungan materi direalisasikan dengan mendirikan dua lembaga dana

¹⁴² *Ibid*, hlm. 111-112.

sukarela yang berkenaan dengan perjuangan anti apartheid yaitu Program Pendidikan dan Latihan PBB untuk Afrika Selatan yang didirikan tahun 1976 untuk memberikan beasiswa bagi anak negeri Afrika Selatan dan Namibia untuk belajar dan berlatih di luar negeri, dan Badan Dana untuk Publisitas menentang apartheid yang didirikan tahun 1975 untuk membiayai percetakan penerbitan-penerbitan PBB dalam beberapa bahasa dan untuk memberikan bantuan keuangan kepada organisasi-organisasi yang menyebarkan bahan-bahan audiovisual tentang apartheid¹⁴³.

Selain kecaman universal atas politik *apartheid* dan sanksi-sanksi PBB terhadap Afrika Selatan baik sanksi ekonomi, politik, dan sosial, usaha lain yang dilakukan PBB adalah menyelesaikan sengketa antara PBB dan Pemerintah Afrika Selatan mengenai masalah Namibia. Namibia pernah dijajah Jerman tahun 1884-1914, tetapi pada awal Perang Dunia I diduduki oleh Afrika Selatan dan pada tanggal 17 Desember 1920 oleh LBB (Lembaga Bangsa-Bangsa) diserahkan kepada Afrika Selatan sebagai suatu negara mandat. Mandat tersebut ada dalam kategori C yang menggarisbawahi beberapa batasan atas kebebasan kekuasaan negara penerima mandat untuk memerintah seperti yang diinginkannya, karena tidak ada konsep pemerintahan sendiri tertulis ke dalam kategori perwalian ini. Pemerintahan Afrika Selatan diizinkan untuk mengurus Afrika Barat Daya (Namibia) sebagai bagian integral dari Union, dibatasi hanya oleh kewajiban untuk memajukan perkembangan moral dan materi dan pertumbuhan sosial

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 111.

penduduk pribumi yang berada di daerah-daerah tertentu¹⁴⁴. Akan tetapi Pemerintah Afrika Selatan selaku pemegang mandat tidak memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan sosial rakyat, bahkan meneruskan perampasan tanah dan segregasi rasial yang telah dimulai oleh pemerintah kolonial Jerman. Pemerintahan Afrika Selatan menerapkan kontrol kaum kulit putih di Namibia sesuai dengan kebijakannya di Afrika Selatan. Setelah Perang Dunia II, Liga Bangsa-Bangsa digantikan oleh PBB dan sistem mandatnya diubah menjadi sistem perwalian. Akan tetapi Afrika Selatan menolak menandatangani suatu persetujuan perwalian dengan PBB dengan dalih bahwa PBB tidak berhak untuk mengawasi pemerintahan atas Namibia. Sebaliknya PBB menolak permintaan Afrika Selatan untuk menganeksasi Namibia¹⁴⁵. Dengan demikian Namibia menjadi bahan sengketa antara PBB dan Afrika Selatan sampai pada akhirnya Namibia memperoleh kemerdekaan tahun 1990. Kemerdekaan Namibia tahun 1990 sebagai hasil perjuangan rakyat Namibia dan negoisasi internasional yang dilakukan oleh PBB dalam mengakhiri pendudukan Afrika Selatan atas Namibia, ternyata berpengaruh dalam memberi motivasi baru bagi perjuangan anti apartheid di Afrika Selatan untuk menuntut kebebasan terhadap pemerintahan minoritas kulit putih.

Dengan demikian, usaha-usaha yang telah dilakukan oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam Organisasi Kesatuan Afrika dan PBB dalam membantu rakyat Afrika Selatan untuk mengakhiri politik apartheid, mulai dari resolusi-resolusi yang dapat menekan Afrika Selatan seperti sanksi-sanksi

¹⁴⁴ A.J.Christopher, *The Atlas of Apartheid*, Routledge, New York, 1994, hlm. 180.

¹⁴⁵ Kirdi Dipoyudo, *Afrika dalam Pergolakan 2*, Yayasan Proklamasi Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1983, hlm. 94-95.

ekonomi, politik, sosial, dan usaha PBB dalam menyelesaikan masalah Namibia, kampanye melawan apartheid menjadi lebih mudah. Di samping itu juga membuktikan bahwa negara-negara Afrika dan PBB memiliki kepedulian dalam menghapus diskriminasi rasial serta membantu rakyat yang tertindas di Afrika Selatan dalam memperjuangkan persamaan martabat dan hak bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Meskipun neraca tindakan internasional dalam menentang apartheid mengalami banyak hambatan dan kekurangan, namun masih memiliki beberapa unsur positif. Unsur positifnya terletak pada ide atau gagasan dan keyakinan PBB dalam mengakhiri apartheid. Gagasan dan keyakinan tersebut, selain memiliki dampak jangka panjang juga sangat berpengaruh terhadap pendapat umum dunia terutama pendapat umum negara-negara besar Barat yang semula hanya sedikit mengeritik tindakan-tindakan rasial yang terjadi di Afrika Selatan. Di bawah tekanan pendapat umum itulah pemerintah Afrika Selatan meninjau kembali kebijaksanaan rasialnya dan mulai mengambil serangkaian tindakan guna mengakhiri politik *apartheid*.

C. Upaya Penyelesaian.

Reaksi terhadap politik *apartheid* di Afrika Selatan baik reaksi yang terjadi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar Afrika Selatan membuat pemerintah Afrika Selatan merasa tertekan karena begitu banyak negara dengan berbagai cara berusaha menekan rezim minoritas kulit putih Afrika Selatan agar mengakhiri politik apartheid dan menghormati hak-hak rakyat kulit hitam. Di bawah tekanan-tekanan baik dalam maupun luar negeri, Pemerintah Afrika Selatan berusaha menangani masalah *apartheid*. Usaha untuk mengatasi masalah

apartheid pernah dicoba oleh Pieter Williem Botha ketika ia menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan periode 1984-1989. Pada awal tahun 1980-an, pemerintahan Afrika Selatan di bawah pimpinan P. W. Botha mulai mengakui adanya kebutuhan untuk berubah, karena adanya kombinasi antara kekerasan internal, penghukuman internasional, dan perubahan demografis di mana orang kulit putih hanya ada 16 persen dari keseluruhan populasi, dibandingkan dengan masa lima puluh tahun sebelumnya yang jumlahnya sekitar 20 persen. Pada tahun 1984 Presiden P. W. Botha berusaha menangani masalah apartheid dengan memperkenalkan suatu “konstitusi baru” dalam suatu referendum yaitu dengan mendirikan Parlemen Tri Kameral yang terdiri dari Parlemen Campuran, India dan Parlemen Putih. Cara ini adalah usaha untuk memancing orang Campuran dan India ke dalam sistem dan memisahkan mereka dari orang Afrika dan juga merupakan cara untuk menipu dunia luar agar berpikir bahwa pemerintah mulai mereformasi *apartheid*¹⁴⁶. Akan tetapi, tipuan ini gagal karena lebih dari 80 persen pemilih India dan Campuran menolak untuk bekerjasama. Selain itu banyak penduduk kulit hitam dan komunitas internasional lainnya menyatakan bahwa hal itu ditujukan untuk memecah belah kesatuan historis rakyat Afrika Selatan yang tertindas dengan menciptakan parlemen-parlemen palsu. Setelah usaha mendirikan Parlemen Tri Kameral gagal, pada tanggal 31 Januari tahun 1985 Presiden P. W. Botha dalam perdebatan parlemen dengan resmi menawarkan kebebasan kepada Nelson Mandela dan para tahanan politik lainnya dengan syarat meninggalkan aksi kekerasan. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak.

¹⁴⁶ Nelson Mandela, *Perjalanan Panjang Menuju Kebebasan*, Otobiografi Nelson Mandela, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 522.

Pada tahun 1989 peristiwa politik berkembang dengan cepat. Tekanan internasional juga semakin meningkat, seiring mulai bertambah kerasnya sanksi ekonomi yang ada dan keadaan ekonomi Afrika Selatan memburuk karena jatuhnya nilai mata uang Afrika Selatan (Rand). Pada tanggal 13 Februari 1989, P. W. Botha, di bawah tekanan dari negara Amerika Serikat dan Inggris, mengundurkan diri dan di tahun berikutnya digantikan oleh Frederik Willem de Klerk¹⁴⁷. F.W de Klerk menjabat sebagai Presiden pada tahun 1989-1994. Tidak mendukung *apartheid*, seperti yang diharapkan, F.W de Klerk menyatakan bahwa dominasi kulit putih harus musnah atau tidak akan ada perdamaian di Afrika Selatan. Pada awal karirnya di depan parlemen yang ada pada bulan Februari 1990, Presiden F. W de Klerk menyatakan bahwa dia akan berupaya untuk menghapuskan hukum diskriminasi dan dicabutnya larangan terhadap keberadaan Kongres Nasional Afrika, PAC (*Pan African Congress*), dan Partai Komunis. Undang-undang *apartheid* mulai dihapus secara perlahan-lahan, mulai dari menghapus Undang-Undang Pemisahan Fasilitas, Undang-Undang Tanah, Undang-Undang Wilayah Kelompok dan Undang-Undang Pendaftaran/Registrasi Penduduk. Pelarangan publikasi media pun kemudian akan dicabut, dan F.W de Klerk membebaskan tahanan-tahanan politik yang tidak bersalah atas tuduhan kejahatan hukum, dimulai dengan pembebasan Walter Sisulu dan rekan-rekannya pada tanggal 10 Oktober 1989 yang kemudian dilanjutkan dengan pembebasan Nelson Mandela pada tanggal 11 Februari 1990, setelah selama dua puluh tujuh tahun dipenjara.

¹⁴⁷ Lihat lampiran IX (Foto Frederick Willem de Klerk), hlm. 181.

Dengan demikian, usaha Frederick Williem de Klerk dalam mengakhiri politik apartheid dengan mencabut beberapa undang-undang segregasi rasial dan dibebaskannya Nelson Mandela pada tahun 1990, membawa harapan baru bagi rakyat Afrika Selatan dalam menyelesaikan masalah apartheid. F.W de Klerk dan Nelson Mandela adalah tokoh harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan keduanya bertekad untuk menciptakan situasi politik baru di Afrika Selatan. Setelah melalui berbagai negoisasi yang telah dilakukan, perubahan politik pun mulai nampak ketika pada tahun 1994 diadakan pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis di mana setiap orang mempunyai hak suara untuk memilih. Hasilnya, Kongres Nasional Afrika memenangkan pemilihan umum dengan persentase suara 62,50 persen dan Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. Terpilihnya Nelson Mandela sebagai Presiden kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan menandai lahirnya suatu demokrasi yang baru di Afrika Selatan.

BAB V**AFRIKA SELATAN SETELAH MASA APARTHEID****A. Situasi di Afrika Selatan Pasca *Apartheid*.**

Kemenangan Partai Kongres Nasional Afrika (ANC) dalam pemilihan umum nasional tahun 1994 dan terpilihnya Nelson Mandela sebagai Presiden kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan menunjukkan keberhasilan rakyat Afrika Selatan dalam memperjuangkan kebebasannya, untuk terlepas dari dominasi kulit putih yang telah memperlakukan mereka secara diskriminatif dalam setiap aspek kehidupan mereka. Namun, kemenangan ini bukan berarti pembebasan secara total bagi seluruh rakyat Afrika Selatan, mengingat dampak dari politik *apartheid* terhadap setiap aspek kehidupan rakyat di Afrika Selatan.

Setelah masa *apartheid*, rakyat Afrika Selatan (khususnya orang kulit hitam)¹⁴⁸ menghadapi masa-masa sulit sebagai akibat dari politik *apartheid* yang telah menindas dan mengeksploitasi mereka bertahun-tahun. Oleh karena itu pemerintahan setelah masa *apartheid* mempunyai kewajiban yang berat untuk menciptakan situasi yang memungkinkan bagi semua kalangan, entah putih atau hitam untuk mengembangkan diri dalam berbagai bidang kehidupan agar mereka bisa hidup secara layak. Hal ini mencakup mengatasi masalah sosial dan ekonomi akibat kekejaman *apartheid*. Berikut ini deskripsi tentang situasi di Afrika Selatan

¹⁴⁸ Afrika Selatan adalah negara yang penduduknya multiras. Meskipun di negara ini terdapat beberapa kelompok ras (kulit hitam, kulit putih, kulit berwarna dan Asia), kelompok masyarakat kulit hitam lah yang mengalami kondisi paling buruk akibat kekejaman *apartheid* karena mereka adalah kelompok mayoritas yang menjadi sasaran utama *apartheid*.

setelah masa *apartheid* terutama dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi di Afrika Selatan.

1. Dalam Bidang Politik

Di tengah-tengah harapan untuk menciptakan masa depan Afrika Selatan yang demokratis, damai tanpa diskriminasi, masyarakat kulit hitam justru semakin jauh masuk dalam jurang pertikaian dan perpecahan yang timbul karena adanya kecemburuan-kecemburuan politik, terutama setelah Nelson Mandela yang juga wakil Presiden ANC (Kongres Nasional Afrika) dibebaskan dari penjara dan ternyata menimbulkan kegoncangan-kegoncangan baru di antara kulit hitam.

Situasi politik di Afrika Selatan pasca *apartheid* ditandai dengan adanya pertikaian antara Kongres Nasional Afrika (*African National Congress/ANC*) di bawah pimpinan Nelson Mandela dan Partai Kebebasan Inkhata¹⁴⁹ (*Inkatha Freedom Party/IFP*) di bawah pimpinan Mangosuthu Buthelezi. Pertikaian di antara pendukung ANC (*African National Congress*) pimpinan Nelson Mandela dengan IFP (*Inkatha Freedom Party*) telah menyebabkan ribuan kulit hitam menjadi korban. Sesungguhnya, ANC dan IFP sama-sama menentang *apartheid*, tetapi masing-masing partai mempunyai perbedaan mengenai kepemimpinan dan rencana dalam menentukan masa depan Afrika Selatan. ANC lebih terbuka sedangkan IFP menjadi duri dalam gerakan demokrasi. IFP menentang perjuangan bersenjata, menentang gagasan Afrika Selatan sebagai negara kesatuan, menyatakan partainya menjadi partai non rasial, sebuah partai yang

¹⁴⁹ Partai Kebebasan Inkatha (*Inkatha Freedom Party*) merupakan organisasi budaya kulit hitam yang berasal dari suku Zulu. Mangosuthu Buthelezi (pemimpin partai) karena kegiatannya dengan pimpinan kulit putih, oleh banyak orang lebih dianggap bagian dari kelompok mapan dan bukan sebagai pemimpin oposisi yang berpengaruh kuat.

keanggotaannya hanya terdiri dari orang-orang kulit hitam, tanpa kehadiran ras lain¹⁵⁰.

Untuk memastikan kontrol orang kulit putih atas kekuasaan di Afrika Selatan di mana mayoritas orang kulit hitam mempunyai hak suara (memilih) yang efektif, pemerintah minoritas kulit putih didesak untuk mengebiri ANC. ANC yang memiliki pendukung yang melimpah di hampir semua wilayah penduduk kulit hitam, jika memegang kekuasaan, tentu akan dapat mengimplementasikan sejenis perubahan ekonomi dan masyarakat yang berdaya jangka jauh, suatu perubahan yang oleh orang kulit putih dianggap sebagai “ancaman bagi kepentingan-kepentingannya”. Selain itu ANC adalah gerakan nasionalis radikal yang tidak akan toleran terhadap minoritas yang mengontrol kekayaan negara¹⁵¹. Inilah sebabnya mengapa golongan kulit putih di Afrika Selatan berusaha memecah basis ANC dengan memperkuat Partai Kebebasan Inkatha/IFP yang konservatif dan pro Barat. Tujuannya adalah untuk memecah belah masyarakat kulit hitam. Golongan kulit putih bukan hanya membiayai kegiatan politik Inkatha tetapi juga memanfaatkan media massa untuk memproyeksikan partai dan pemimpinnya Mangosuthu Buthelezi sebagai alternatif popularitas agar menyaingi ANC dan Nelson Mandela. Untuk memperlihatkan bahwa kedua kelompok sama-sama kuat dan sama-sama bertarung dalam persaingan meraih dukungan, golongan kulit putih diduga keras telah mendorong bentrokan-bentrokan bersenjata antara ANC dan Inkatha yang

¹⁵⁰ Emerita Wagiyah, *Sekilas Tentang Politik Apartheid di Afrika Selatan*, Arena Almamater, 1995, Volume X-35 hlm. 65.

¹⁵¹ Chandra Muzaffar, “*Apartheid dan Zionisme Dalam Tata Dunia Baru*”, *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru*, Penerbit Dwipa, Jakarta, 1994, hlm.78-79.

telah menyebabkan ribuan kulit hitam tewas dalam pertikaian tersebut¹⁵². Pertikaian itu terjadi di seluruh daerah Midland, Natal dan sekitar kota Pietermaritzburg (basis ANC), di mana pendukung Inkhata yang bersenjata menyatakan perang terhadap ANC. Desa-desa dibakar secara menyeluruh, puluhan orang terbunuh, ratusan orang terluka, dan ribuan orang mengungsi. Di Natal, Zulu membunuh Zulu, karena anggota Inkhata maupun pendukung ANC semuanya suku Zulu¹⁵³. Pertikaian antara kulit hitam memang diinginkan oleh golongan kulit putih, yang nanti dijadikan alasan bahwa masyarakat kulit hitam belum siap untuk mendapatkan kesamaan dan kebebasan.

2. Dalam Bidang Ekonomi

Kemiskinan dari kalangan kulit hitam merupakan masalah utama pemerintah Afrika Selatan sebagai akibat dasar dari *apartheid* yang dilaksanakan selama kurang dari empat dasawarsa. Pasca *apartheid*, Afrika Selatan adalah negara yang kesenjangan ekonominya sangat tajam di mana orang-orang kulit putih menguasai perekonomian sedangkan orang-orang kulit hitam hidup dalam kemiskinan. Dengan kata lain orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Krisis ekonomi dan sosial yang ditinggalkan oleh sistem *apartheid* menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah. Pada tahun 1990, empat puluh dua persen masyarakat hidup dalam kemiskinan yang sebagian besarnya adalah warga kulit hitam dan sekitar 2,3 juta orang beresiko kekurangan gizi dan kekurangan pangan. Pada tahun 1991, diketahui bahwa di Afrika Selatan 40 % rumah tangga dari kalangan bawah ternyata hanya memperoleh 4% dari keseluruhan pendapatan

¹⁵² *Ibid*, hlm. 89.

¹⁵³ Nelson Mandela, *Perjalanan Panjang Menuju Kebebasan* (terjemahan), Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 583.

nasional, sementara itu masyarakat yang termasuk ke dalam kelas atas menerima lebih dari separuhnya yaitu sebesar 10 %. Kondisi ekonomi yang buruk terutama dialami oleh mayoritas kulit hitam yang ditandai situasi-situasi berikut : hanya seperlima rumah orang Afrika yang mendapatkan fasilitas ledeng, sedangkan setiap orang kulit putih mendapatkan fasilitas ledeng, seperempat orang Afrika memiliki penghasilan yang kurang dari 300 R sebulan, dua pertiga berpenghasilan kurang dari 900 R sebulan sedangkan dua pertiga orang kulit putih memiliki penghasilan di atas 2000 R per bulan, dua pertiga anak-anak kulit hitam yang ada di Afrika Selatan dan setengah anak-anak dari kulit berwarna lainnya bermukim di area yang sangat padat penduduknya. Kesenjangan ini semakin hari semakin bertumbuh. Di tahun 1995, pendapatan orang-orang kulit hitam menurun sampai dengan 19% sedangkan pendapatan orang kulit putih mengalami peningkatan sampai dengan 15%¹⁵⁴.

3. Dalam Bidang Sosial

Pemerintahan yang baru juga menghadapi masalah yang bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi terutama oleh sistem politik *apartheid* yang dikuasai oleh kalangan orang-orang kulit putih. Menurut laporan yang dibuat oleh Nelson Mandela kepada PBB bulan Maret tahun 1994, 15% orang Afrika tinggal dalam kegoncangan, tujuh juta orang Afrika dari tiga puluh lima juta penduduk tidak memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan sekitar 17% dari antara mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Selain itu, lebih dari dua juta penduduk hidup terpisah dari sanak keluarga mereka. Tingkat pengangguran diperkirakan

¹⁵⁴ Alex Callinicos, *South Africa After Apartheid*, <http://www.pubs.socialistreviewindex.org.uk/safrica>

mencapai 40 persen dan banyak daerah yang belum memiliki listrik. Jaminan dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada waktu itu belum mencapai tingkat yang memuaskan. Berdasarkan informasi tentang pendidikan di Afrika Selatan pasca *apartheid*, tingkat buta huruf di Afrika Selatan mencapai 86% untuk pria dan 85% untuk wanita dari 44 juta jumlah penduduk¹⁵⁵. Dalam bidang kesehatan, penyakit AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah. Wabah AIDS merupakan masalah yang kritikal di Afrika Selatan dan merupakan negara dengan kasus AIDS terbesar. Diperkirakan 4,79 juta penduduknya dijangkiti AIDS dan pemerintahan Afrika yang baru terpaksa mengeluarkan berjuta-juta Rand untuk menangani masalah ini. Tindakan kriminal juga meningkat tajam sebagai akibat dari tekanan ekonomi. Perbedaan etnis dan status sosial sebagai akibat dari sistem *apartheid* masih sangat dirasakan oleh sebagian besar penduduk.

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut pemerintah ANC¹⁵⁶ berupaya mengadakan reformasi dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Reformasi dalam bidang politik dilakukan dengan memberikan hak-hak politik kepada rakyat Afrika Selatan¹⁵⁷. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada rakyat Afrika Selatan meskipun bantuan yang disediakan pemerintah sangat tidak cukup untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi rakyat Afrika Selatan pasca *apartheid*. Di samping berbagai institusi yang dibentuk pada waktu itu

¹⁵⁵ *Human Development Report* 2003 dalam <http://www.refrat.hu-Berlin.de/huch/article.php3?id>

¹⁵⁶ Lihat lampiran X (lambang ANC), hlm. 182.

¹⁵⁷ Reformasi dalam bidang politik yang dilakukan dengan memberikan hak-hak politik kepada rakyat Afrika Selatan dibuktikan dengan keikutsertaan rakyat Afrika Selatan dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan umum tahun 1994, di mana Nelson Mandela terpilih menjadi Presiden kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan.

dibentuklah suatu lembaga *National Economic Development and Labour Council* (NEDLAC) dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang melayani pekerja, orang muda, dan pengangguran, juga dibentuk berbagai organisasi yang terbuka bagi semua kalangan, Pada waktu itu juga di Afrika Selatan dibuat UU yang melindungi hak-hak para pekerja dan untuk pertama kalinya ditetapkan asuransi sosial. Pada tahun 1994, pemerintah berusaha menangani masalah ekonomi dengan membentuk lembaga Rekonstruksi dan Pengembangan negara dalam berbagai bidang kehidupan, yang dikenal dengan sebutan *Reconstruction and Development Programme/Program Rekonstruksi dan Pembangunan* (RDP)¹⁵⁸.

Lembaga ini bertugas membuat program-program umum yang dapat membantu upaya rekonstruksi dan pertumbuhan kehidupan negara dalam berbagai bidang kehidupan. Program-program tersebut yaitu:

- pembangunan 260 klinik yang dipusatkan di wilayah pedesaan yang paling tidak beruntung dan meningkatkan kondisi 2.358 klinik.
- perbaikan 1.597 sekolah dan pembangunan 4.308 ruang kelas.
- penyediaan makanan bagi 5,5 juta anak-anak melalui program pemberian makan di sekolah.
- imunisasi bagi 63,3 persen dari seluruh bayi yang berusia di bawah setahun dan sebagai tambahan 10 persen untuk usia dua tahun.
- memberikan perawatan kesehatan gratis untuk anak-anak di bawah usia enam tahun dan untuk ibu hamil.

¹⁵⁸ <http://www.sadocc.at/indaba/leseproben>

- menyetujui program pemberian pelayanan dasar pengairan dan sanitasi bagi jutaan rakyat.
- menyediakan subsidi perumahan bagi jutaan rakyat dan membangun hampir satu jutaan rumah tinggal.
- menyediakan infrastruktur kotapraja termasuk listrik, air, sanitasi, pembuangan sampah padat jalan, saluran angin dan fasilitas masyarakat bagi kepentingan 3,5 juta rakyat.
- program penyediaan listrik untuk 313.179 rumah tangga yang menghubungkan 1,5 juta orang.
- program-program penyediaan listrik bagi 25.900 sekolah desa dan sekitar 2.000 klinik desa¹⁵⁹.

Reconstruction and Development Programme (RDP) juga berupaya mengembangkan perekonomian tradisional dengan meningkatkan peran pasar-pasar tradisional di daerah pedesaan.

Reconstruction and Development Programme (RDP) memiliki peran yang sangat vital bagi pertumbuhan dan pengembangan politik, ekonomi, dan pendidikan di Afrika Selatan. Pada bulan Juni 1996 pemerintah menjabarkan program *Reconstruction and Development Programme* (RDP) melalui GEAR (*Growth, Employment and Redistribution Strategy*). Meskipun program ini hanya dilihat secara resmi sebagai instrumen dari program *Reconstruction and Development Programme* (RDP), tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan politik secara keseluruhan. Untuk

¹⁵⁹ Nabila, Jurnal Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume IX, Nomor 1, 2006.

mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan politik GEAR menjalin kerjasama dengan badan-badan internasional dan LSM-LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) lokal. Melalui cara ini GEAR berupaya untuk membuka diri terhadap perkembangan-perkembangan global dalam bidang politik dan ekonomi yang sampai dengan tahun 1994 masih terisolasi. Hubungan kerjasama dalam bidang politik dan ekonomi dengan lembaga-lembaga internasional membawa dampak yang positif bagi penyelesaian berbagai masalah dalam negeri pasca apartheid. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi melalui RDP dan GEAR memang menunjukkan perubahan tetapi belum mencapai hasil yang maksimal. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi tetapi tidak menciptakan banyak lapangan kerja bagi penduduk. Terintegrasinya negara Afrika Selatan dalam era globalisasi mengakibatkan kurang lebih setengah juta penduduk kehilangan lapangan kerja. Hal tersebut disebabkan karena di era globalisasi banyak perusahaan dan lapangan pekerjaan lainnya sudah tidak lagi membutuhkan tenaga manusia tetapi menggunakan tenaga mesin yang didatangkan dari luar Afrika Selatan.

B. Upaya Rekonsiliasi Dan Rehabilitasi

Politik *apartheid* yang diterapkan di Afrika Selatan selama kurang lebih empat puluh enam tahun meninggalkan banyak konsekuensi negatif bagi rakyat Afrika Selatan, terutama bagi kalangan kulit hitam. Luka-luka masa lalu masih sangat membekas di hati dan pikiran para korban dari sistem tersebut. Banyak di antara mereka yang cacat seumur hidup karena perlakuan kasar para polisi negara dan tidak sedikit pula yang mengalami gangguan kejiwaan karena begitu beratnya

tekanan yang mereka alami di masa lalu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa masa lampau bagi mereka adalah masa yang penuh dengan penderitaan karena kekejaman *apartheid*. Misalnya, banyak istri kehilangan suami, banyak anak kehilangan ayah dan banyak orang tua pula yang harus rela menerima kenyataan kehilangan anak-anak mereka. Kehidupan mereka dipenuhi penderitaan baik secara fisik maupun psikis akibat perlakuan kejam politik *apartheid*. Bahkan ada yang mengatakan bahwa “secara fisik kami hidup, tetapi emosional kami mati”.

Untuk menyembuhkan dan memulihkan luka-luka di masa lampau memang bukanlah hal yang mudah, karena perasaan sakit tertanam sangat dalam di hati para korban. Oleh karena itu proses penyembuhannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Para korban membutuhkan suatu pendampingan yang khusus untuk mencapai kesembuhan. Mereka didorong untuk melihat masa lampau sebagai masa sulit yang telah lewat dan berusaha untuk berdamai dengan situasi tersebut. Dengan itu diharapkan para korban mampu mengampuni orang-orang yang telah melukai mereka di masa lalu. Yang paling penting dan terutama adalah mengutamakan rekonsiliasi dan rehabilitasi. Pemerintah dan badan-badan internasional yang bertanggungjawab atas upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi, harus mampu membantu para korban untuk secara positif mengolah masa lampau mereka yang begitu kelam. Negara berupaya memulihkan kembali hak-hak para korban yang telah dirampas oleh sistem *apartheid* dengan bekerjasama dengan komisi-komisi kemanusiaan untuk mengatasi beban berat warisan rezim *apartheid* berupa konflik politik, sosial dan rasial; yang terberat adalah konflik vertikal dan horizontal antara rezim *apartheid* dengan rakyat bukan kulit putih (Berwarna,

Asia) serta antara rakyat kulit hitam yang merupakan mayoritas dengan warganegara kulit putih, tiang penyangga dari sistem *apartheid*.

Salah satu komisi kemanusiaan yang berupaya untuk menangani warisan periode *apartheid* yaitu komisi yang dikenal dengan nama *Truth and Reconciliation Committee*/Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC). Komisi ini dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Nelson Mandela, di bawah pimpinan Uskup Mpilo Desmond Tutu. Tujuannya adalah untuk mengatasi konflik-konflik politik, sosial dan etnis melalui rekonsiliasi nasional yang ditunjukkan dengan proses memaafkan, maju menuju pembangunan suatu Afrika Selatan merdeka yang baru, demokratis, adil, modern, bersatu dan harmonis. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terdiri atas tiga subkomisi. Pertama, subkomisi pelanggaran HAM yang bertanggungjawab memberi status korban kepada individu-individu. Komisi ini menerima kedatangan pihak-pihak terkait untuk membuat pernyataan, juga bertugas menerima dan memeriksa kesaksian publik, mengenai sejumlah kasus. Kedua, subkomisi amnesti yang bertanggungjawab memberi amnesti kepada para pelaku yang terbukti membuat tindakan, kesalahan, dan kejahatan politis. Ketiga, subkomisi rehabilitasi. Secara umum tugas-tugas komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi antara lain:

- mengumpulkan data-data para korban
- mengupayakan rekonsiliasi dan rehabilitasi bagi para korban
- ada bersama para korban sebagai upaya untuk mengembalikan rasa percaya diri mereka, karena kehadiran menumbuhkan rasa penghargaan yang tinggi terhadap martabat para korban.

- menciptakan struktur masyarakat yang berlandaskan keadilan, yang di dalamnya hak-hak setiap manusia tanpa membedakan ras mendapat tempat yang layak

Pemerintahan Nelson Mandela dan Uskup Mpilo Desmond Tutu memilih tipe rekonsiliasi karena melalui tipe ini diharapkan rakyat Afrika Selatan yang menjadi korban kekejaman apartheid mampu melihat masa lalu sebagai masa sulit yang telah lewat dan berusaha untuk berdamai dengan situasi tersebut melalui sikap saling memaafkan atau mengampuni antara para korban dan pelaku apartheid, seperti yang diungkapkan oleh Uskup Mpilo Desmond Tutu “*No Future Without Forgiveness*” (Tanpa Saling Memaafkan, Tidak Ada Hari Depan). Proses rekonsiliasi dimulai dengan memberikan kesempatan kepada para korban untuk menceritakan pengalaman kekerasan yang mereka derita selama rezim apartheid berkuasa. Para korban dan pelaku apartheid dipertemukan melalui sidang dengar pendapat di depan anggota TRC. Melalui sidang dengar pendapat, para korban diperkenankan menceritakan kembali kisah-kisah pelecehan hak-hak asasi manusia yang mereka alami selama masa apartheid, sedangkan para pelaku yang terbukti telah terlibat dalam kekejaman apartheid berusaha untuk menyingkapkan fakta yang relevan berkenaan dengan berbagai tindakan yang bertalian dengan politik apartheid. Kesaksian yang diungkapkan oleh para korban apartheid kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, meskipun menimbulkan kekacauan emosional (marah, sedih, dukacita dll.) tetapi merupakan awal dari proses pemulihan karena penderitaan mereka diakui dan inilah awal dari suatu martabat yang dibaharui. Seluruh negeri mendengarkan kesaksian mereka baik

melalui media televisi atau radio, dan cerita mengenai penderitaan mereka masuk dalam kenangan bangsa. Nama-nama para penyiksa, yang beberapa tahun silam berada di luar jangkauan, kini dapat disebutkan secara terbuka¹⁶⁰. Dengan demikian semakin banyak kesaksian yang diungkapkan oleh para korban apartheid dan pengakuan tulus secara terbuka dari para pelaku, semakin banyak fakta pelanggaran HAM yang terbongkar. Salah satu buktinya yaitu adanya penemuan secara bertahap atas keterlibatan langsung anggota-anggota partai yang bergengsi seperti Partai Kemerdekaan Inkhata dan para politisi Partai Nasional termasuk mantan Presiden P. W. Botha yang disebut oleh Jenderal van der Merwe sebagai mantan pemimpin Kepolisian Afrika Selatan, karena secara langsung memerintahkan pemboman atas *Khotso House*, markas besar Dewan Gereja-Gereja Afrika Selatan¹⁶¹. Bukti ini menunjukkan kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam mengungkapkan kebobrokan rezim apartheid.

Menurut Geiko Muller Fahrenholz, melalui metode rekonsiliasi martabat para korban yang semula dihina dan dilecehkan, dipulihkan kembali melalui kisah-kisah yang diceritakan oleh para korban dan yang terpenting adalah kerelaan untuk saling memaafkan atau saling mengampuni karena hanya dengan jalan demikian rekonsiliasi bisa berhasil dengan baik. Di samping itu, metode rekonsiliasi memberi sumbangan untuk mengatasi keterpecahan di masa silam dalam semangat kesatuan nasional dalam rangka mengelakkan munculnya pelecehan serupa di masa depan atas hak-hak asasi manusia. Namun, upaya rekonsiliasi menjadi tidak bermakna dan akan menjadi usaha yang sia-sia apabila

¹⁶⁰ Geiko Muller Fahrenholz, *Rekonsiliasi, Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam Masyarakat*, Ledalero, Maumere, 2005, hlm.185.

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 180.

tidak diikuti dengan tindakan yang nyata dalam bentuk kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban. Upaya melakukan rehabilitasi telah dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan pada tahun 1995 dengan mengambil langkah-langkah konkret yaitu, memberikan bantuan sosial secara gratis kepada para korban, memberikan bantuan finansial untuk jangka panjang (ditentukan bahwa setiap korban mendapat bantuan sosial selama kurang lebih enam tahun). Bantuan juga diberikan kepada keluarga-keluarga yang anggotanya meninggal karena kekejaman sistem *apartheid*. Bantuan-bantuan tersebut sebenarnya belum cukup, karena begitu banyaknya masalah yang diakibatkan oleh sistem *apartheid*. Oleh karena itu, keberhasilan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam mengupayakan rekonsiliasi dan proses rehabilitasi amat bergantung pada seberapa cepat teratasinya beberapa dari antara masalah-masalah yang paling mendesak yaitu kemiskinan merajalela, kesenjangan antara segelintir elite dan massa kaum miskin sedemikian mencolok dan pemukiman khusus bagi kulit hitam membutuhkan perhatian khusus. Meskipun demikian, kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berhasil dengan baik karena mampu memenuhi kepentingan korban serta publik luas dan tak kalah pentingnya adalah prosesnya berlangsung di hadapan komisi yang memiliki kredibilitas tinggi dan legitimasi moral. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Afrika Selatan menjadi tempat pengungkapan penyesalan para pelaku kejahatan yang menjadi wahana pemulihan kembali martabat para korban *apartheid*.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan pokok-pokok pembahasan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Latar belakang munculnya politik *apartheid* di Afrika Selatan terdiri dari tiga hal yaitu latar belakang historis, latar belakang keagamaan dan latar belakang ekonomi. Latar belakang historis yang mendorong munculnya politik *apartheid*, berkaitan dengan sejarah pemukiman Belanda (orang-orang *Boer/Afrikaner*) di Afrika Selatan. Orang-orang *Boer* yang bermukim di Afrika Selatan adalah para pemukim pertama yang telah memisahkan diri dengan tanah airnya dan menganggap Afrika Selatan sebagai satu-satunya tanah air mereka. Mereka berambisi untuk mempertahankan eksistensi dan supremasi kulit putih, agar kedudukan mereka sebagai kelompok minoritas tidak tersingkirkan oleh kelompok mayoritas. Latar belakang keagamaan, karena adanya asumsi yang menyatakan bahwa orang-orang kulit putih adalah orang-orang pilihan Allah dan bahwa orang hitam merupakan ras yang bernilai sangat rendah. Asumsi tersebut digunakan oleh orang-orang yang pro *apartheid*, dan didukung oleh Gereja Reformasi Belanda untuk melegalkan ideologi *apartheid* melalui pandangan teologis yang palsu. Latar belakang ekonomis, karena pemerintah kulit putih ingin menguasai kekayaan sumber daya alam yang ada di Afrika Selatan dengan cara melakukan eksploitasi ekonomi baik terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

2. Pelaksanaan politik *apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948-1990 diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan rakyat Afrika Selatan terutama dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan pendidikan. Penerapan *apartheid* dalam bidang-bidang tersebut dilakukan dengan menetapkan berbagai macam peraturan rasial yang secara sistematis dilembagakan dan dituangkan dalam undang-undang yang bersifat diskriminatif.
3. Reaksi terhadap pelaksanaan politik *apartheid* di Afrika Selatan tahun 1948-1990 berasal dari reaksi dalam negeri (intern) dan reaksi luar negeri (ekstern). Reaksi intern dibuktikan dengan munculnya perlawanan-perlawanan dari rakyat Afrika Selatan dalam menentang *apartheid* melalui organisasi-organisasi politik, diantaranya yang paling berpengaruh adalah ANC (*African National Congress*). Reaksi ekstern berasal dari negara-negara di luar Afrika Selatan yang tergabung dalam OAU (*Organization of African Unity*/ Organisasi Kesatuan Afrika) dan PBB melalui sejumlah resolusi berupa, sanksi ekonomi, embargo senjata, isolasi diplomatik, boikot olahraga, dan sanksi penerbangan, yang semuanya dilakukan dengan tujuan mengakhiri politik *apartheid*.
4. Situasi di Afrika Selatan pasca *apartheid*. Dalam bidang politik, adanya pertikaian etnis antara masyarakat kulit hitam terutama antara Kongres Nasional Afrika (*African National Congress/ANC*) pimpinan Nelson Mandela dan Partai Kebebasan Inkatha (*Inkatha Freedom Party/IFP*) pimpinan Mangosuthu Buthelezi. Dalam bidang ekonomi, rakyat Afrika Selatan hidup dalam kemiskinan. Dalam bidang sosial, meningkatnya pengangguran dan kriminalitas, meningkatnya buta huruf, dan sebagian besar penduduk Afrika Selatan terjangkit

penyakit AIDS. Pemerintah Afrika Selatan di bawah pimpinan Nelson Mandela berupaya mengatasi warisan *apartheid* dengan mengusahakan perbaikan atau perubahan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, yang dibuktikan dengan memberikan hak-hak politik, mengupayakan perlindungan terhadap hak-hak para pekerja melalui asuransi sosial, memberikan bantuan sosial secara gratis kepada para korban apartheid dan berusaha menangani masalah sosial ekonomi dengan membentuk lembaga yang disebut Program Rekonstruksi dan Pembangunan (*Reconstruction and Development Programme*) serta membentuk sebuah komisi kemanusiaan yang disebut Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran (*Truth and Reconciliation Committee*) yang dipimpin oleh Uskup Mpilo Desmond Tutu. Tujuannya adalah untuk mengatasi konflik-konflik politik, sosial dan etnis melalui rekonsiliasi nasional yang ditunjukkan dengan proses memaafkan, maju menuju pembangunan suatu Afrika Selatan merdeka yang baru, demokratis, adil, modern, bersatu dan harmonis yang kemudian ditindaklanjuti dengan upaya rehabilitasi bagi para korban. Dengan demikian, melalui rekonsiliasi nasional dan rehabilitasi hubungan antar ras dipulihkan kembali dan bersatu membangun Afrika Selatan yang demokratis tanpa pembedaan warna kulit. Rekonsiliasi nasional ditegakkan, sebab kemenangan demokrasi bukanlah ajang untuk membalas dendam warga kulit putih. Rekonsiliasi nasional berarti, baik orang kulit putih maupun kulit hitam hendaknya hidup berdampingan secara damai, punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara penuh Afrika Selatan, dengan demikian dapat menciptakan situasi yang dapat mendukung tercapainya

perdamaian di Afrika Selatan dan menjadi anggota warga dunia yang makin beradab.

Politik *apartheid* yang dialami oleh mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan dapat dijadikan pengalaman bagi kita semua untuk belajar mencintai perbedaan, mengakui hak asasi manusia universal dan pluralisme karena semua orang dilahirkan dengan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Oleh karena itu, membedakan manusia berdasarkan warna, ras atau suku bangsa merupakan suatu penolakan dari persamaan ini dan juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Sebagai manusia yang bermartabat kita wajib berjuang menentang diskriminasi rasial yang didasarkan atas warna kulit, melawan segala bentuk kontrol rasial, ketidakadilan dan ketidakmanusiawian dominasi untuk menegakkan keadilan, kebebasan dan persamaan. “*Say no to racism*“, tema Piala Dunia 2006 (tahun 2010 Piala Dunia akan berlangsung di Johannesburg Afrika Selatan) yang berlangsung di Jerman merupakan bukti kepedulian dunia untuk mengajak kita semua menentang rasisme dan untuk mengingatkan akan pentingnya keterlibatan kita dalam mengusahakan perdamaian di dunia ini karena harga perdamaian seperti yang dikatakan oleh Yossef Folliet adalah usaha demi kebaikan setiap manusia dan penghormatan terhadap manusia tanpa memedulikan perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah S, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanpa Tanda Identitas*. Magelang : Indonesiatara.
- Abdul Syukur. Ensiklopedi Imum Untuk Pelajar. (2005). *Jilid 8*. Jakarta : Penerbit PT Ichtiar Baru van Hoeke.
- Adam, Kuper, Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : PT.Raja Grafindo.
- Ali, Araf, dkk. 2005. *Perlindungan Terhadap Pembela HAM* . Jakarta : Penerbit Imparsial.
- Baron, A.Roberta, Byrne, Don. 2003. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Cassese, Antonio. 1994. “Catatan-Catatan Tentang Apartheid”, *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah* (terjemahan A.R. Zainuddin). Jakarta : Penerbit Yayasan Obor.
- Christoper, A, J. 1994. *The Atlas of Apartheid*. New York : Routledge
- Dagun, Save.M. 2006. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN).
- Daldjoeni, N. 1991. *Ras-Ras Umat Manusia (Biogeografis, Kulturhistoris, Sosiopolitis)*. Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya.
- Deliar Noer. (1965). *Pengantar Kepemimpinan Politik*. Medan : PT.Dwipa
- Donna del Gaudio.1994. “Perjuangan Menentang Apartheid”, *Hak – Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai* (terjemahan). Jakarta : Penerbit Yayasan Obor.
- Darsiti Soeratman. 1974. *Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Modern Jilid I*. Yogyakarta : Penerbit Vita.
- _____. 1974. *Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Modern Jilid II*. Yogyakarta : Seri Penerbitan TextBook Universitas Gajah Mada.
- Fahrenheit, Geiko Muller. 2005. *Rekonsiliasi Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam Masyarakat* (terjemahan). Maumere : Penerbit Ledalero.
- Grolier International. 1988. *Negara Bangsa Asia dan Afrika*. Jakarta : Widyadara.

- Hopkinson, Tom. 1964. *Apartheid In Action* dalam History of south Africa. Life world Library South Africa.
- Ian, Brownlie. 1993. *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai HAM* (terjemahan Berinsyah). Jakarta : Penerbit UI.
- Kirdi Dipoyudo. 1983. *Afrika Dalam Pergolakan 2*. Jakarta : Yayasan Proklamasi Centre For Strategic and International Studies.
- Dicky Lopulalan. 1999. *Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*. Jakarta : Penerbit Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Mandela, Nelson. 1993. *Langkah Menuju Kebebasan, Surat-surat dari Bawah Tanah* (terjemahan A.R.Zainuddin). Jakarta : Penerbit Yayasan Obor
- _____.1995. *Perjalanan Panjang Menuju Kebebasan, Otobiografi Nelson Mandela* (terjemahan). Jakarta : Bina Rupa Aksara.
- Masyhur, Effendi. 1994. *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mudji Sutrisno, Hendar Putranto (ed). 2004. *Hermeneutika Pascakolonial Soal Identitas*. Penerbit Kanisius : Yogyakarta..
- Nohlen, Pieter (ed). 1994. *Kamus Dunia Ketiga*. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Poground, Benjamin. 1993. *Nelson Mandela, Pemimpin Afrika yang Dipenjara selama 27 Tahun Karena Menentang Apartheid* (terjemahan Hilmar Farid). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Pramoedya Ananta Toer. 1998. *Hoakiau di Indonesia*. Jakarta : Gerba Budaya.
- Sartono, Kartodirjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Suparman, Sobirin Malin. 2003. *Ide-Ide Besar Sejarah Intelektual Amerika*. Yogyakarta : UII Press.
- Suyanto, Bagong (ed). 2006. *Sosiologi Teks dan Terapan*. Jakarta : Penada Media Group.
- Stoddard, L. 1966. *Pasang Surut Kulit Berwarna*. Jakarta

Wallbank, T. Walter. 1964. *“The Bantustan Program”* dalam Documents In Modern Africa. London : Price Town New Jersey.

Widja, IG. 1994. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Sejarah dalam Perspektif Pendidikan. Semarang : Satya Wacana

Sumber Internet

Education Under apartheid, The bantu Education Act dalam http://www.en.wikipedia.org/wiki/Bantu_Education_Act, 07/08/2006

Sejarah Pendidikan di Afrika Selatan dalam http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Pendidikan_Afrika_Selatan, 20/08/2006

Sharpeville Massacre, The Origin of South Africans Human Rights Day dalam <http://africanhistory.about.com/library/weekly/SharpevilleMassacre-a.htm>, 10/10/2006.

History of South Africa in The Apartheid Era dalam <http://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid>, 18/11/2006.

Sumber Majalah

Andi Achdian, “Tentang Kolonialisme: Multatuli dan Pemikirannya”, *Driyarkara*, No.3, Juni, Volume XXII, 1996, Jakarta.

Emerita Wagiyah, “Sekilas Tentang Politik *Apartheid* di Afrika Selatan”, *Arena Alamamater*, No.35, Pebruari, Volume X, 1995, Yogyakarta.

Fuad Hassan, “Catatan Tentang *Apartheid*”, *Eksekutif*, No.71, Agustus, 1985, Jakarta.

Kirdi Dipoyudo, “Masalah Rasial di Afrika Selatan”. *Analisa CSIS*, No.2, Mei, Volume VII, 1978, Jakarta.

Craig, Mary, “Lika-Liku Berlian Afrika Selatan”, *Intisari*, No.393, Volume XXXIII, 1996, Jakarta.

Wisnu Dewanto, “*Apartheid* dan Perkembangan di Afrika Bagian Selatan”, *Analisa*, Pebruari, Volume XIV, 1987, Jakarta.

LAMPIRAN I

Tabel 1

Pemimpin Pro Apartheid di Afrika Selatan

Sumber: http://www.en.wikipedia.org/wiki/History_of_South_Africa_in_the_Apartheid_Era

| NAMA | MASA JABATAN |
|-----------------------------|--------------|
| Louis Botha | 1910-1919 |
| Jan Christian Smuts | 1919-1924 |
| J.G.H. Hertzog | 1924-1939 |
| Jan Christian Smuts | 1939-1948 |
| Dr.Daniel.Francois Malan | 1948-1954 |
| Johannes Gerhardus Stridjom | 1954-1958 |
| Hendrik Frensch Verwoerd | 1958-1966 |
| Balthazar Jhon Voster | 1966-1978 |
| Pieter Williem Botha | 1978-1984 |
| Pieter Williem Botha | 1984-1989 |

LAMPIRAN II

Tabel 2

Tabel Perlakuan disproporsional terhadap rakyat Afrika Selatan era apartheid tahun 1978

Sumber : <http://www-cs-students.stanford.edu/~cale/cs201/apartheid.hist.html>

| Apartheid dan rakyat di Afrika Selatan | | |
|--|--|--|
| | <i>Blacks</i> (orang-orang Kulit Hitam) | <i>Whites</i> (orang-orang Kulit Putih) |
| Populasi | 19 juta | 4,5 juta |
| Alokasi Daerah (%) | 13 % | 87% |
| Pembagian Pendapatan Nasional | < 20 % | 75% |
| Ratio pendapatan rata-rata | 1 | 14 |
| Pendapatan kena wajib pajak minimum | 360 rands | 750 rands |
| Dokter/Populasi | 1/44,000 | 1/400 |
| Tingkat kematian bayi | 20% (Perkotaan) 40% (pedesaan) | 2,7 % |
| Pengeluaran tahunan pendidikan per murid/siswa | \$45 | \$696 |
| Ratio guru/murid | 1/60 | 1/22 |

LAMPIRAN III

Tabel 3 :

TABEL KETERGANTUNGAN IMPOR AMERIKA SERIKAT
PADA NEGARA-NEGARA AFRIKA BAGIAN SELATAN

Sumber : ANALISA. Volume XIV No.2. Pebruari tahun 1987.

| Mineral | Kebutuhan (%) | Kontribusi setiap Pemasok (% terhadap impor AS) | Pemasok lain (% terhadap impor AS) |
|---|---------------|---|------------------------------------|
| Crom Bijih Crom Ferocrom | 90 | Afrika Selatan (35) Afrika Selatan (38) Zimbabwe (20) | USSR (24) |
| Vanadium | 36 | Afrika Selatan (57) | USSR (8) Chili (28) |
| Antimoni | 52 | Afrika Selatan (44) | China (18) |
| Platina | 89 | Afrika Selatan (42) | USSR (26) |
| Mangaan Bijih Mangaan Feromangaan | 98 | Afrika Selatan (9) Afrika Selatan (30) | Gabon (36) |
| Intan | 100 | Afrika Selatan (81) | Zaire (11) |
| Kobalt | 97 | Zambia (7) | Zaire (42) |

LAMPIRAN IV

Tabel 4

TABEL PROSENTASE CADANGAN DAN PRODUKSI MINERAL STRATEGIS NEGARA-NEGARA AFRIKA BAGIAN SELATAN TERHADAP CADANGAN DAN PRODUKSI DUNIA

Sumber : ANALISA. Volume XIV No.2. Pebruari tahun 1987

| Mineral | Produsen Utama | Cadangan | Produksi |
|----------|----------------|----------|----------|
| Crom | Afrika Selatan | 68 | 34 |
| | Zimbabwe | 31 | 23 |
| Vanadium | Afrika Selatan | 64 | 39 |
| Antimoni | Afrika Selatan | 7 | 21 |
| Platina | Afrika Selatan | 86 | 46 |
| Mangaan | Afrika Selatan | 41 | 24 |
| Intan | Zaire | | 39 |
| | Afrika Selatan | 7 | 17 |
| Kobalt | Zaire | 31 | 52 |
| | Zambia | 16 | 9 |
| Uranium | Afrika Selatan | 17 | 13 |

LAMPIRAN V

Foto *PassBook* (1&2)

Sumber : <http://www.un.org/av/photo/subjects/apartheid.htm>

Seorang pemuda kulit hitam dari Afrika Selatan menunjukkan *PassBook* yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pass. Orang kulit hitam diharuskan membawa surat izin (*PassBook*) yang menentukan tempat dimana mereka bisa tinggal dan bekerja.

Foto 1



Foto 2

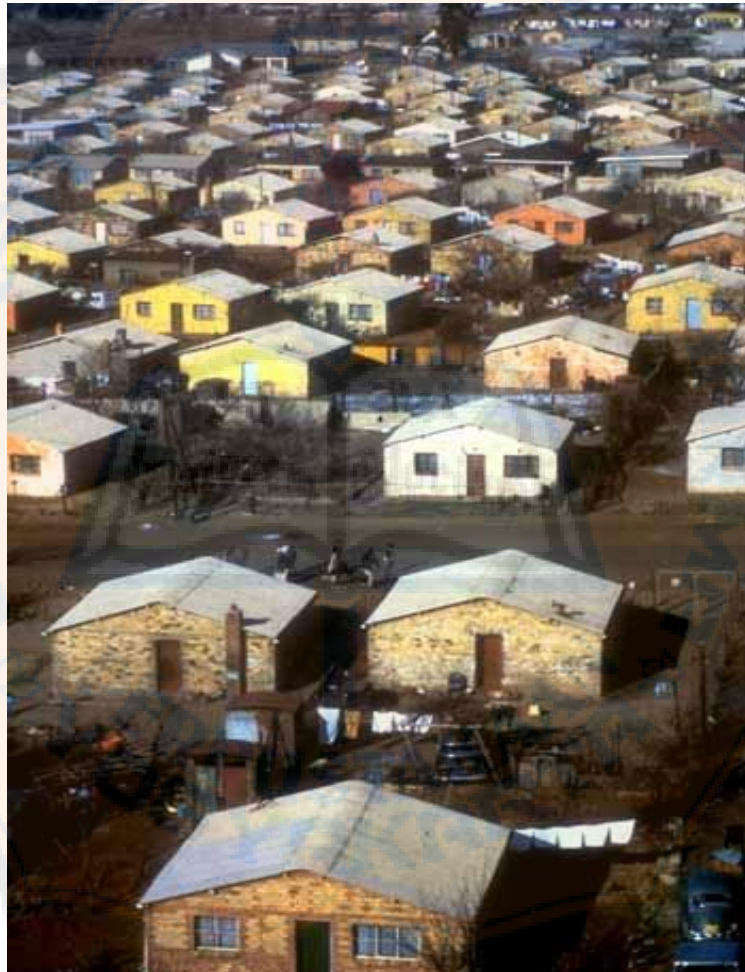


LAMPIRAN VI

Foto 3 :

Perumahan di Soweto, sebuah kota yang khusus ditempati oleh orang-orang kulit hitam (era apartheid)

Sumber : <http://www.un.org/av/photo/subjects/apartheid.htm>



LAMPIRAN VII

Foto 4

Sumber : <http://en.wikipedia.org/wiki/Image:BAHA-apartheid-signage.jpg>



Racist hatred on a private sign

(salah satu bentuk peringatan yang berbau rasis yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih di Afrika Selatan)

The sign reads (peringatan itu berbunyi)

"DANGER! (BAHAYA)

NATIVES, INDIANS & COLOURED.

(BAGI PRIBUMI, ORANG INDIAN, KULIT BERWARNA)

IF YOU ENTER THESE PREMISES AT NIGHT YOU WILL BE LISTED AS MISSING.

(APABILA MEMASUKI AREA INI PADA MALAM HARI MAKA ANDA AKAN DIANGGAP HILANG)

ARMED GUARDS SHOOT ON SIGHT. SAVAGE DOGS DEVOUR THE CORPSE.

(PENJAGA BERSENJATA AKAN MENEMBAK DI TEMPAT. ANJING GANAS AKAN MENELAN MAYAT ANDA.)

YOU HAVE BEEN WARNED"

(ANDA TELAH DIPERINGATI)

LAMPIRAN VIII

Foto 5

Nelson Mandela : Tokoh Kulit Hitam yang Berjuang Menentang Apartheid

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Selatan

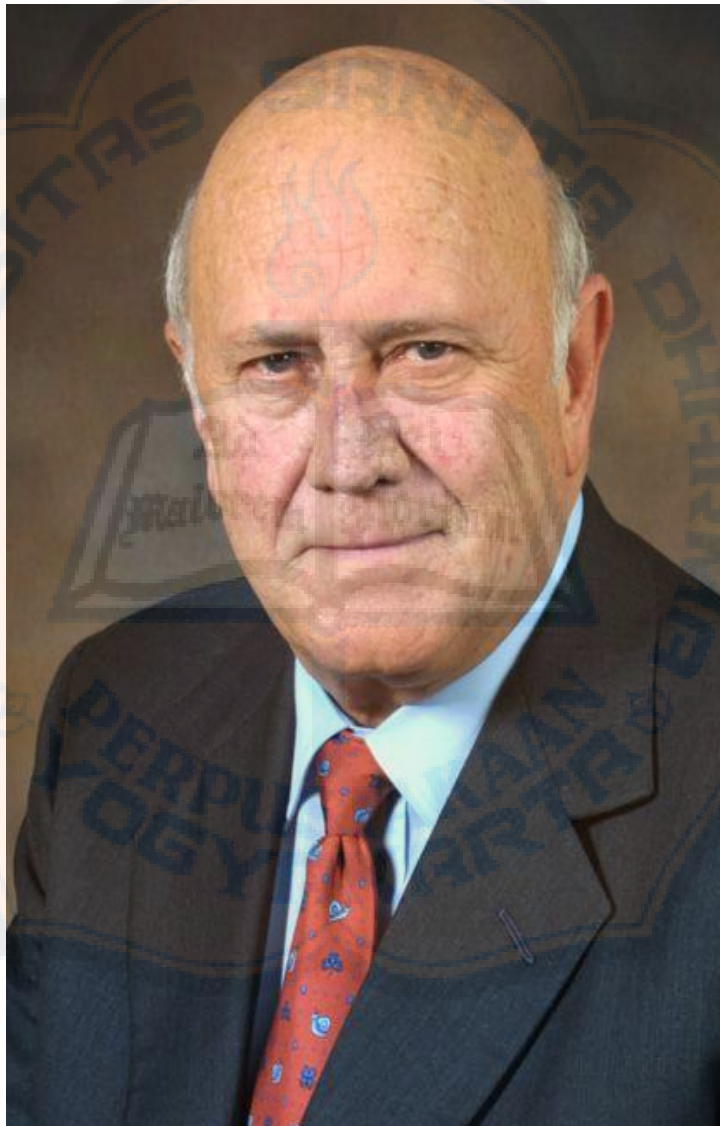


LAMPIRAN IX

Foto 6

Foto Frederick Willem de Klerk (tokoh kulit putih yang mengambil inisiatif untuk mengakhiri politik apartheid pada tahun 1990)

Sumber : <http://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid>



LAMPIRAN X

Foto 7 : Lambang *African National Congress/ANC* (Partai Afrika Selatan)

Sumber : <http://en.wikipedia.org/wiki/Image:ANClogo.svg>



LAMPIRAN XI

Foto 8

Penjara *Robben Island*. Robben Island adalah sebuah pulau di Table Bay, 12 km dari pantai Cape Town Afrika Selatan, tempat untuk menampung para tahanan politik era apartheid, termasuk Nelson Mandela, kini merupakan salah satu Warisan Dunia UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*)

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Robben_Island



LAMPIRAN XII

Foto 9

Lambang Partai Nasional (*National Party*) di Afrika Selatan

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/National_Party_%28South_Africa%29



LAMPIRAN XIII

Peta 1

PETA BENUA AFRIKA

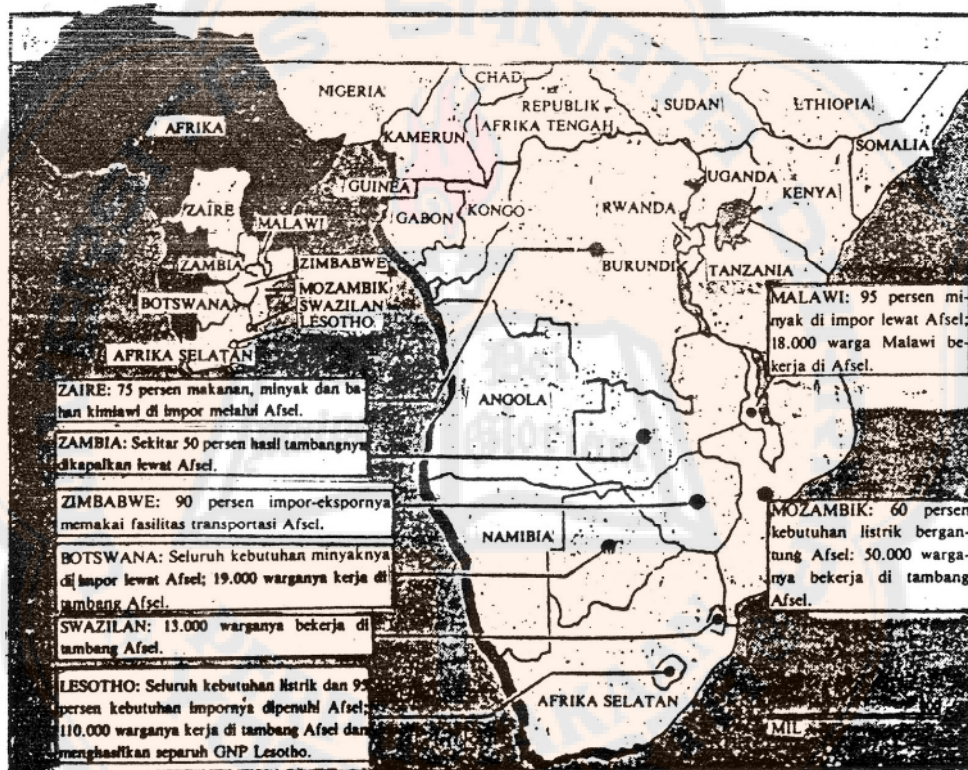
Sumber : Syukur, Abdul. Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar. (2005). *Jilid 8*. Jakarta : Penerbit PT Ichtiar Baru van Hoeke.



LAMPIRAN XV

Peta 3

Peta Ketergantungan Negara-Negara di Afrika terhadap Afrika Selatan
 Sumber : ANALISA, Volume XIV No.2. Pebruari Tahun 1987



LAMPIRAN XVI

Peta 4
Peta *Homelands* di Afrika Selatan

Sumber :

<http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Southafricanracialdemographics1979.png>

Daerah Khusus Yang Diperuntukkan Bagi Ras-Ras Di Afrika Selatan

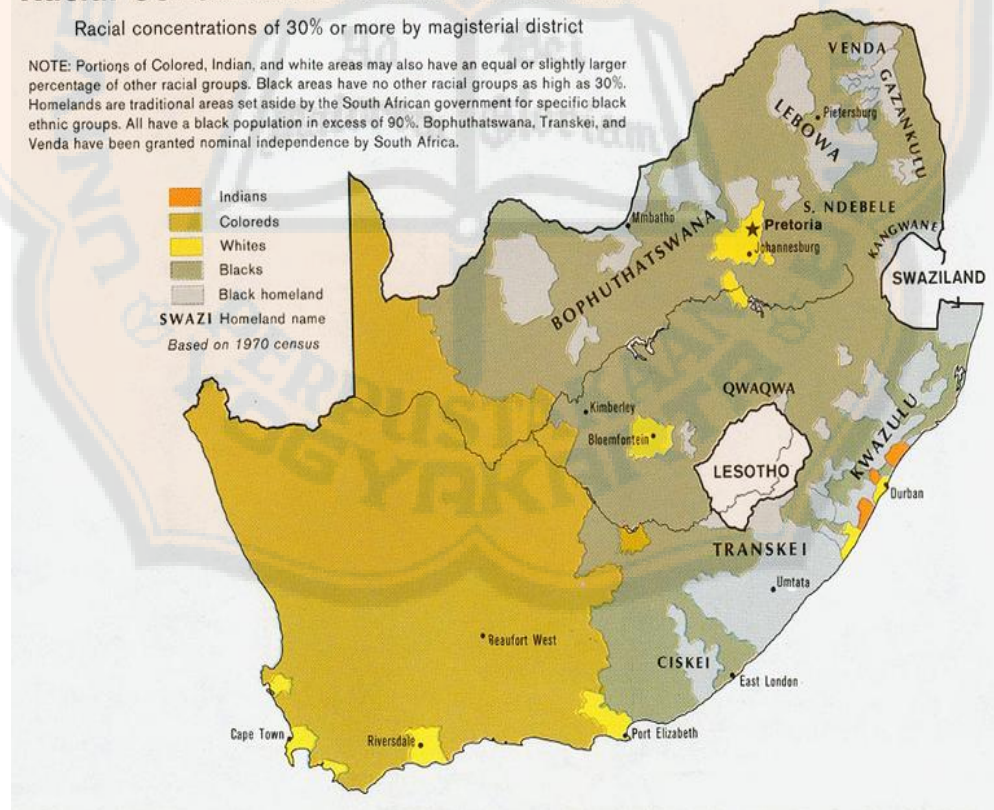
Peraturan daerah menetapkan 30% atau lebih wilayah untuk ditempati oleh setiap ras.

Catatan : Jumlah area untuk kulit Berwarna, orang Indian, dan kulit Putih persentasenya sama atau sedikit lebih luas dibandingkan kelompok ras yang lain. Daerah kulit hitam tidak ditempati oleh kelompok ras lain yang jumlahnya tidak lebih dari 30%. Homelands adalah area tradisional yang disisihkan oleh pemerintah bagi kelompok2 etnis kulit hitam tertentu. Semua kelompok itu memiliki populasi kulit hitam lebih dari 90%. telah diberikan kemerdekaan sementara oleh pemerintah Afrika Selatan

Racial Concentrations and Homelands

Racial concentrations of 30% or more by magisterial district

NOTE: Portions of Colored, Indian, and white areas may also have an equal or slightly larger percentage of other racial groups. Black areas have no other racial groups as high as 30%. Homelands are traditional areas set aside by the South African government for specific black ethnic groups. All have a black population in excess of 90%. Bophuthatswana, Transkei, and Venda have been granted nominal independence by South Africa.



LAMPIRAN XVII

PIAGAM KEBEBASAN AFRIKA

(Sumber: Nelson Mandela. 1995. *Perjalanan Panjang Menuju Kebebasan*, Otobiografi Nelson Mandela (terjemahan). Jakarta : Bina Rupa Aksara.)

1. RAKYAT AKAN MEMERINTAH

- Setiap pria dan wanita akan mempunyai hak untuk memilih dan untuk menjadi calon pada semua badan yang menyusun undang-undang
- Semua orang akan berhak berperan serta dalam pemerintahan negara ini.
- Hak semua orang akan sama, tidak berkaitan dengan ras, warna, atau jenis kelamin lainnya.
- Semua badan pemerintahan, dewan penasihat atau pemerintah lokal minoritas akan digantikan oleh badan pemerintahan sendiri yang demokratis.

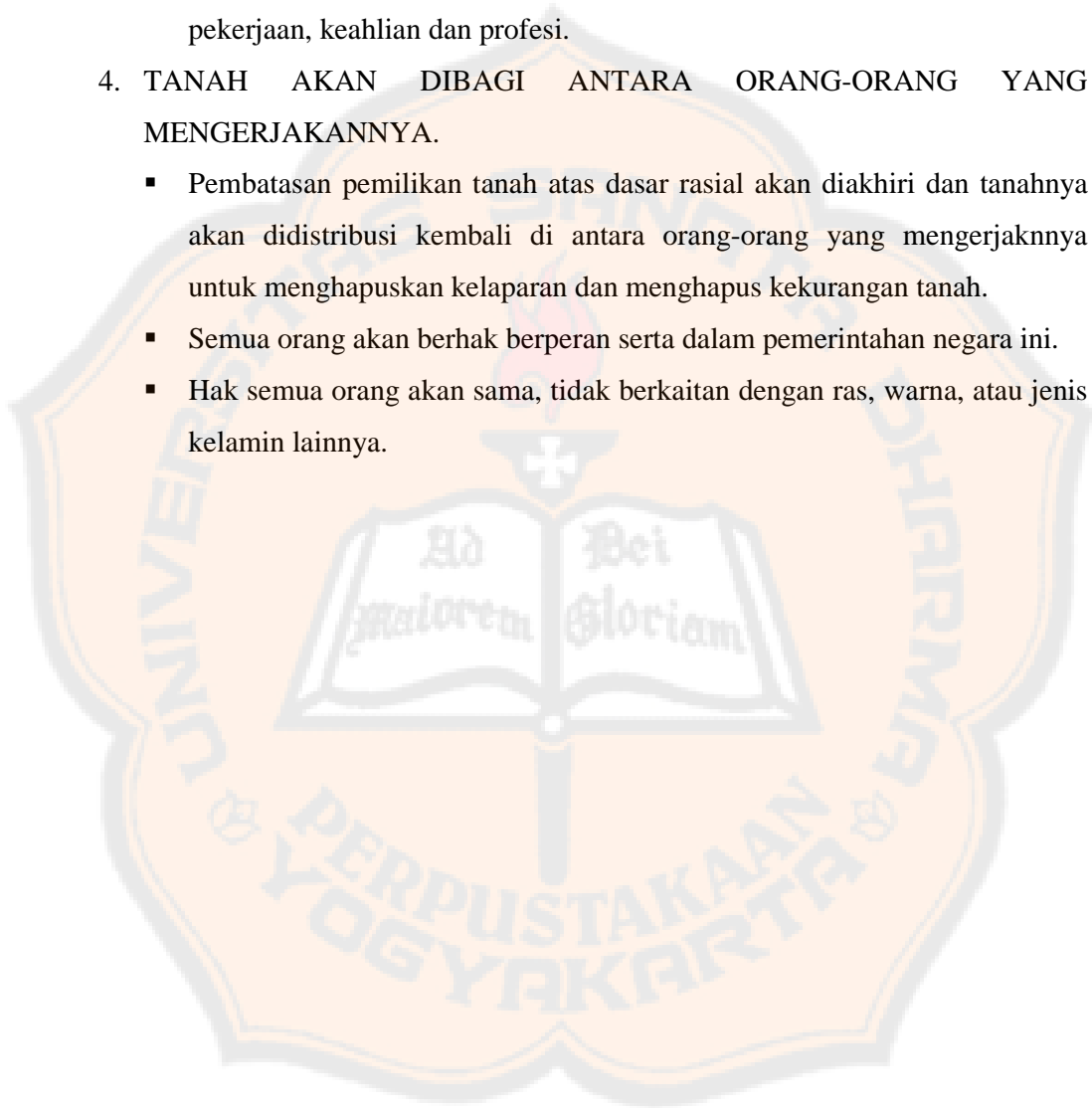
2. SEMUA KELOMPOK NASIONAL AKAN MEMPUNYAI HAK YANG SAMA

- Akan terdapat kesamaan status di dalam bidang pemerintahan, di pengadilan dan di sekolah untuk semua kelompok nasional dan ras.
- Semua kelompok nasional akan dilindungi oleh undang-undang terhadap penghinaan terhadap ras dan kebanggaan nasionalnya.
- Semua orang akan mempunyai hak yang sama untuk menggunakan bahasa mereka dan untuk mengembangkan kebudayaan dan adapt istiadat mereka sendiri.
- Mengajarkan dan mempraktekkan diskriminasi nasional, rasial, atau warna kulit serta tindakan penghinaan akan menjadi tindakan melanggar hukum.
- Semua undang-undang dan tindakan apartheid akan dihapuskan.

3. RAKYAT AKAN BERBAGI KEKAYAAN NEGARA

- Kekayaan alam negara kami, warisan milik seluruh orang Afrika Selatan, akan dikembalikan kepada rakyat.

- Kekayaan mineral di bawah tanah, bank-bank dan industri yang monopolistis akan ditransfer kepada pemilikan rakyat secara keseluruhan.
 - Semua orang akan mempunyai hak yang sama untuk berdagang di mana saja mereka menginginkan berdagang maupun untuk memasuki segala jenis pekerjaan, keahlian dan profesi.
4. TANAH AKAN DIBAGI ANTARA ORANG-ORANG YANG MENERJAKANNYA.
- Pembatasan pemilikan tanah atas dasar rasial akan diakhiri dan tanahnya akan didistribusi kembali di antara orang-orang yang mengerjakannya untuk menghapuskan kelaparan dan menghapus kekurangan tanah.
 - Semua orang akan berhak berperan serta dalam pemerintahan negara ini.
 - Hak semua orang akan sama, tidak berkaitan dengan ras, warna, atau jenis kelamin lainnya.



LAMPIRAN XVIII

SILABUS BERBASIS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Mata Pelajaran : Sejarah
 Satuan pendidikan : SMA
 Kelas, Semester : XI/2
 Tahun pelajaran : 2006/2007
 Standar Kompetensi : Kemampuan menganalisis perkembangan sejarah dunia sejak Perang Dunia II sampai dengan perkembangan mutakhir

| Kompetensi Dasar | Indikator | Materi | Pengalaman Belajar | Penilaian | | | Waktu | Sumber Bahan |
|--|---|---|--|---------------|----------------|--|-------------|--|
| | | | | Jenis Tagihan | Bentuk Tagihan | Contoh Tagihan | | |
| Memahami perkembangan politik <i>apartheid</i> di Afrika Selatan tahun 1948-1990 | Mendeskripsikan latar belakang munculnya politik <i>apartheid</i> di Afrika Selatan tahun 1948-1990 | 1. Faktor-Faktor yang mendorong munculnya politik <i>apartheid</i> di Afrika Selatan tahun 1948-1990 a. Faktor Historis b. Faktor Agama c. Faktor Ekonomis | Siswa dapat mendeskripsikan latar belakang munculnya politik <i>apartheid</i> di Afrika Selatan tahun 1948-1990. | Tes Tertulis | Esei | 1. Deskripsikan latar belakang munculnya politik <i>apartheid</i> di Afrika Selatan tahun 1948-1990. | 2x 45 menit | • Cassese, Antonio, 1994, Catatan-“Catatan Tentang Apartheid” dalam <i>Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah</i> (terjemahan A.R. Zainuddin). Jakarta, Penerbit Yayasan Obor |
| | Mendeskripsikan pelaksanaan politik <i>apartheid</i> di Afrika Selatan | 2. Pelaksanaan politik <i>apartheid</i> di Afrika Selatan a. Bidang Sosial b. Bidang Ekonomi c. Bidang Pendidikan d. Bidang Politik | Siswa dapat mendeskripsikan pelaksanaan politik <i>apartheid</i> di Afrika Selatan dalam berbagai aspek kehidupan. | | | 2. Jelaskan pelaksanaan politik <i>apartheid</i> di Afrika Selatan dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan politik disertai contoh. | | • Donna Del Gaudio, 1991, “Perjuangan Menentang apartheid” dalam <i>Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga rampai</i> (terjemahan), Jakarta, Penerbit Yayasan Obor |
| | Mendeskripsikan reaksi terhadap pelaksanaan politik <i>apartheid</i> di Afrika Selatan | 3. Reaksi terhadap pelaksanaan politik <i>apartheid</i> di Afrika Selatan. a. Reaksi Dalam Negeri | Siswa dapat Mendeskripsikan reaksi terhadap pelaksanaan politik <i>apartheid</i> di Afrika | | | 3. Deskripsikan reaksi intern dan ekstern terhadap pelaksanaan politik <i>apartheid</i> di Afrika Selatan. 4. Jelaskan situasi di | | |

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|---------------|---|--|
| | <p>Mendeskripsikan situasi di Afrika Selatan Pasca <i>apartheid</i></p> <p>Merefleksikan dan menemukan makna dari peristiwa politik <i>apartheid</i> di Afrika Selatan sebagai salah satu bentuk tindakan pelanggaran HAM di dunia</p> | <p>b. Reaksi Luar Negeri</p> <p>4. Situasi di Afrika Selatan pasca <i>apartheid</i></p> <p>a. Bidang Politik</p> <p>b. Bidang Sosial</p> <p>c. Bidang Ekonomi</p> <p>5. merefleksikan dan menemukan makna dari peristiwa politik <i>apartheid</i> bagi kehidupan bangsa Indonesia secara khusus dan bagi dunia umumnya.</p> | <p>Selatan.</p> <p>Siswa dapat mendeskripsikan situasi di Afrika Selatan Pasca <i>Apartheid</i></p> <p>Siswa dapat merefleksikan dan menemukan makna dari peristiwa politik <i>apartheid</i> di Afrika Selatan sebagai salah satu bentuk tindakan pelanggaran HAM di dunia.</p> | <p>Ulangan</p> | <p>Uraian</p> | <p>Afrika Selatan Pasca <i>Apartheid</i> baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kirdi Dipoyudo, 1983, <i>Afrika Dalam Pergolakan</i> 2, Jakarta, CSIS. |
|--|--|---|---|----------------|---------------|---|--|

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....
NIP.....

Yogyakarta, 4 Januari 2006
Guru Mata Pelajaran

OdiliaElviraHaba